



PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN

RKPD

KOTA PONTIANAK

TAHUN
2021



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - b. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi pedoman Perubahan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
27. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 45) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2021



WALIKOTA PONTIANAK,

ENRUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MUHYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 55

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Hasil Triwulan II Tahun 2021	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Nasional dan Provinsi	III-1
3.2 Kerangka Ekonomi Daerah	III-6
3.3 Kerangka Keuangan Daerah	III-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	IV-10
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Pontianak	II	-	2
Tabel	2.2.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II	-	22
Tabel	2.3.	Matrik Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021	II	-	35
Tabel	3.1.	Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021	III	-	2
Tabel	3.2.	Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2020-2021	III	-	8
Tabel	3.3.	Proyeksi Pendapatan Daerah Dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021	III	-	11
Tabel	3.4.	Proyeksi Belanja Daerah Dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021	III	-	12
Tabel	3.5.	Proyeksi Belanja Daerah Dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021	III	-	14
Tabel	3.6.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021	III	-	14
Tabel	4.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Periode 2020-2024	IV	-	2
Tabel	4.2.	Rencana Waktu Pelaksanaan Tahun Jamak/Multiyears Tahun 2020-2024	IV	-	3
Tabel	4.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020-2024	IV	-	4
Tabel	4.4.	Prioritas Pembangunan/Program Prioritas Daerah Kota Pontianak Tahun 2021	IV	-	11
Tabel	4.5.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2021	IV	-	17
Tabel	5.1.	Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2021 Per Perangkat Daerah	V	-	1
Tabel	5.2.	Rekapitulasi Perubahan Belanja Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah	V	-	3
Tabel	5.3.	Rekapitulasi Perubahan Belanja Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah	V	-	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah. Amanat tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun dan dokumen rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua dokumen perencanaan tersebut yang disusun berpedoman sesuai tahapan dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada.

RKPD yang disusun menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sebagaimana diketahui bahwa dunia saat ini mengalami pandemi virus Covid-19 termasuk Indonesia dan Kota Pontianak pada khususnya, sejak awal Maret 2020, keadaan tersebut menyebabkan Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan anggaran keuangan Pusat dan Daerah untuk menangani kondisi force major tersebut, sehingga perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan II tahun 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 yang dilakukan meliputi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan

Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD dan penetapan.

Perumusan rancangan perubahan RKPD meliputi analisis ekonomi dan keuangan Daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak untuk menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenominan nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 Nomor 32;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
 19. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
 20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
 21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49);
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191; dan

24. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 45).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 disusun dengan maksud menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kebijakan penyusunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sesuai pasal 349 berisi substansi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan dengan jelas tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

Menguraikan telahaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun berjalan dan realisasi RPJMD hingga Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah Tahun 2021 dan perkiraan Tahun 2021, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Tahun 2021 hingga Triwulan II serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi daerah berserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan sesuai prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun berjalan hingga Triwulan II, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 sampai dengan triwulan II merupakan pertimbangan dalam melaksanakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 yang dilaksanakan pada akhir Bulan Juni Tahun 2021. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) triwulan II memberikan gambaran capaian kinerja, sasaran dan program, persentase capaian fisik serta keuangan, selain itu target-target kinerja pembangunan yang belum dapat dicapai pada fase pembangunan sebelumnya maupun meningkatkan pencapaian kinerja yang telah berhasil dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pontianak. Untuk itu, dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 disusun berbagai program pembangunan yang selain mengacu kepada program prioritas RPJMD juga mengakomodir isu-isu strategis dan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat.

Dalam penyusunan perubahan RKPD 2021, salah satu faktor yang menjadi masukan pertimbangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan sampai dengan hasil evaluasi triwulan II Tahun 2021 dan permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh serta pertimbangan kondisi yang akan dihadapi sampai dengan akhir tahun 2024. Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan Program RKPD atau pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan sampai dengan triwulan II 2021 :

Tabel 2.2.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Wajib/Pendidikan	<p>Sarana dan Prasarana setiap jenjang sekolah masih belum merata.</p> <p>Penyebaran Sumber Daya Manusia baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif masih belum merata dan terdapat kekurangan tenaga pendidik.</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Wajib/Kesehatan	<p>Permasalahan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan II masih terdapat persentase realisasi penyerapan anggaran yang kurang dan bahkan belum ada realisasinya ini dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakuan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 262/Setda/Tahun 2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Pontianak Tahun 2021. 2. Refocusing dan efisiensi anggaran sehingga berdampak pada kegiatan yang sudah direncanakan tapi tidak bisa dilakukan. 3. Banyak indikator dari kegiatan program melibatkan massa dan kontak sehingga dimasa pandemi ini dikhawatirkan akan menyebabkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penyebaran dan penambahan cluster virus. <p>Upaya dari beberapa permasalahan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Realisasi Belanja dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan. 2. Pembangunan Rumah Sakit Utara sudah memasuki Tahap II. 3. Puskesmas yang dibangun (Aliyang) sudah pada Tahap Perencanaan dan dalam proses pembayaran, untuk Tahap Konstruksi dan Pengawasan dalam Tahap Pelelangan. 	Dinas Kesehatan
3	Wajib/Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Karena terjadi perubahan anggaran / refocusing yang mengakibatkan proses pelelangan terhambat, yang tadinya tender menjadi PL dan ada juga yang di hapus kegiatannya pada APBD-P, sehingga proses sistem LPSE dimulai dari nol lagi karena tidak bisa lanjut.</p> <p>Mengingat waktu perubahan anggaran / refocusing sudah mau memasuki triwulan III sehingga dikhawatirkan pelaksanaan kegiatan fisik tidak dapat direalisasikan karena jangka</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		waktunya pendek yang melalui proses pelelangan.	
4	Wajib/Perumahan dan Kawan Permukiman	<p>Perubahan kebijakan/Aturan Pusat/Pemkot mengenai pengadaan barang jasa, akibatnya terjadi penundaan proses pengadaan sambil menunggu payung hukum yang pasti.</p> <p>Perubahan sistem pengadaan barang jasa dari manual menjadi berbasis IT melalui E-PL (e-pengadaan langsung) yang berdampak pada penyedia jasa dan pejabat pengadaan harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.</p> <p>Diterapkannya persyaratan penggunaan tenaga K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dimana banyak penyedia jasa yang belum memiliki tenaga K3 sehingga mereka memerlukan waktu untuk menyiapkannya.</p> <p>Adanya pandemi yang membatasi kegiatan tatap muka, sedangkan untuk kegiatan konstruksi diperlukan interaksi langsung antara pihak penyedia dan staf teknis (konsultan dan Dinas Perkim).</p> <p>Adanya refocusing anggaran mengakibatkan berkurangnya alokasi bantuan untuk perbaikan Rumah Tak Layak Huni mengakibatkan perlunya revisi/ perubahan SK Walikota untuk calon penerima bantuan.</p> <p>Perbaikan Rumah Tak Layak Huni yang bersumber dari dana DAK memerlukan proses yang panjang melibatkan lintas SKPD.</p> <p>Penanganan Kawasan Kumuh harus disinergikan dengan kegiatan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan Program Nasional, sehingga perlu dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalbar.</p>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Wajib/Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>Terbatasnya personil Satuan Polisi Pamong Praja serta sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional.</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana baik kuantitas maupun jenis.</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>
6	Wajib/Sosial	<p>Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selalu berubah-ubah/fluktuatif.</p> <p>Kurangnya peran serta masyarakat dalam usaha mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lingkungan sekitar.</p>	Dinas Sosial
7	Wajib/Tenaga Kerja	Minimnya kesempatan kerja dan Informasi bagi pencari kerja.	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
8	Wajib/ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>Belanja Modal penyediaan barang rumah tangga dimana pada pengadaan Televisi, barang yang tersedia di penyedia/toko tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diinput di SIPD sehingga direncanakan direalisasikan pada Triwulan Ke III dan IV melalui mekanisme APBD Perubahan dengan mengganti spesifikasi barang.</p> <p>Kegiatan Bimtek belum dapat dilaksanakan sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga penyelenggara Bimtek menunda kegiatan sampai batas waktu yang belum ditentukan.</p> <p>Pada Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagian besar terdiri dari kegiatan-kegiatan advokasi dan sosialisasi yang juga terkendala dengan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga tidak bisa dilaksanakan secara optimal.</p>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Wajib/Pangan	<p>Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor belum dapat direalisasikan karena perbedaan persepsi atas Surat Walikota Pontianak Nomor 027/058.1/BPBJ.3/2021 tanggal 19 April 2021 perihal penetapan kedudukan PA/KPA dalam pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.</p> <p>Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasinya masih rendah karena dicetak sesuai dengan stok barang yang ada.</p> <p>Sub kegiatan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan belum teralisasi Karena data-data sekunder dan data-data pendukung yang diperlukan tersedia di akhir TW 2, sehingga pelaksanaan penyusunan dilaksanakan pada awal TW 3.</p> <p>Sub kegiatan cadangan pangan Pemerintah baru 32% yang terealisasi karena biaya jasa pengemasan beras bantuan cadangan pangan sampai dengan TW 2 belum dipergunakan karena bantuan beras untuk masyarakat miskin di kelurahan masih dalam proses penetapan.</p> <p>Sub kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun baru 10% terealisasi karena adanya realokasi anggaran Rapat Dewan Ketahanan Pangan karena berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Ketahanan Pangan, sedangkan biaya untuk survey</p>	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		<p>konsumsi pangan dilaksanakan setelah adanya penetapan refocusing anggaran.</p> <p>Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal masih 39% yang terealisasi karena masyarakat calon penerima bantuan pemanfaatan pekarangan masih belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, sehingga terlebih dahulu dilakukan pendampingan sebelum pemberian bantuan.</p> <p>Sub kegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota baru 20% yang terserap karena data calon penerima bantuan bahan penanganan rawan pangan masih harus diverifikasi dan divalidasi kembali secara detail, sehingga penyaluran bantuan pada TW 2 baru selesai disalurkan pada awal TW 3, sedangkan bantuan bagi masyarakat miskin di kelurahan masih dalam proses penetapan.</p> <p>Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota masih 16% yang terealisasi karena adanya penyesuaian kode rekening belanja, sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah penyesuaian kode rekening.</p>	
10	Wajib/Pertanahan	Terdapat beberapa persil yang masih dalam proses balik nama (turun waris) sehingga memerlukan waktu untuk menyelesaikannya.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Wajib/Lingkungan Hidup	<p>Meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk, pesatnya perkembangan aktivitas transportasi dan usaha/industri yang mengakibatkan meningkatnya volume limbah/sampah dan pencemaran lingkungan.</p> <p>Meningkatnya pencemaran air, dimana limbah industri dan limbah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pencemaran air.</p>	Dinas Lingkungan Hidup
12	Wajib/ Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Beberapa pengadaan belanja modal belum tayang pada e-Purchasing/e-Catalog.</p> <p>Untuk Ribbon terjadi permasalahan dalam penginputan di SIRUP, yaitu akibat adanya pemetaan kegiatan DAK Non Fisik dimana pada awalnya sudah diinput di SIRUP namun karena pemetaan harus diinput kembali, kendalanya adalah sebagian sudah diumumkan pada kegiatan asal. Selain itu Belanja Ribbon juga belum muncul di e-Catalog sehingga langkah yang diambil adalah pengadaan dilakukan dengan metode tender.</p> <p>Untuk DAK Non Fisik, pencairan berdasarkan dana yang tersedia di KASDA, saat ini untuk</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		DAK Non Fisik telah tersedia sebesar Rp.839.148.000,- sedangkan untuk pengadaan Ribbon, Film Printer dan Cleaning Kit sebesar Rp.836.817.850,- belum ditambah dengan belanja lainnya yang harus dicairkan, sehingga untuk Belanja Ribbon tidak dapat dilakukan sekaligus.	
13	Wajib/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kegiatan terkendala dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).	
14	Wajib/ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>Program Pengendalian Penduduk yang mana pada Tahun 2021 ini melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga, kegiatan pemutakhiran data dan juga sarasehan. Kegiatan-kegiatan tersebut juga tidak dapat direalisasikan secara optimal karena substansi kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang/masyarakat sehingga juga terkendala dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).</p> <p>Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) juga terdapat beberapa kegiatan Rapat, Lokakarya, Pelatihan dan Sosialisasi yang sebagian besar juga ditunda karena Pandemi Covid-19.</p> <p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera terdiri dari beberapa kegiatan yang sebagian besar berupa Pelatihan dan Sosialisasi yang menasar kepada kelompok kelompok masyarakat, sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kegiatan-kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan secara optimal.</p>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Wajib/ Perhubungan	<p>Adanya perubahan sistem pengadaan dari manual ke E-PL (Elektronik Pengadaan Langsung).</p> <p>Terdapat beberapa item kegiatan yang harus dikurangi intensitasnya karena dilakukan penghematan anggaran dan dialihkan untuk kegiatan lain.</p> <p>Pengelolaan BRT (Bus Rapid Transit) tidak berjalan maksimal karena masih harus menunggu regulasi sebagai dasar operasional.</p>	Dinas Perhubungan
16	Wajib/ Komunikasi dan Informatika	<p>Ada beberapa kegiatan yang dibuat menggunakan standar harga tahun 2020 dan terjadi kenaikan harga pada tahun 2021, sehingga pagu kegiatan tidak mencukupi</p> <p>Pembayaran internet dilakukan berdasarkan jangka waktu sehingga mempengaruhi realisasi kegiatan menginggit anggaran pembayaran</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		internet cukup banyak pertigabulannya sekitar Rp.224.612.000,-. Karena adanya pandemi covid-19 jadi kegiatan dibatasi untuk melakukan aktifitas	
17	Wajib/ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih rendahnya penguasaan dan teknologi sebagian besar pengurus dan pengelola koperasi yang berakibat lemahnya kinerja organisasi dan usaha koperasi. Lemahnya akses permodalan, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha koperasi.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
18	Wajib/ Penanaman Modal	Adanya masalah teknis yang tidak dapat dihindari yaitu pemadaman listrik pada kantor terpadu, karena belum memiliki genset. Masih banyak dijumpai kesalahan pengisian formulir oleh pelaku usaha/masyarakat sehingga menghambat proses perizinan selanjutnya, serta kekurangpahaman terhadap persyaratan perizinan.	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerjadan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Wajib/ Kepemudaan dan Olahraga	Adanya refocusing dan pandemi covid-19 sehingga kegiatan event yang melibatkan orang banyak tidak dapat dilaksanakan maksimal. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan dengan memaksimalkan penyerapan anggaran (mengalihkan kegiatan event tatap muka dengan kegiatan virtual).	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20	Wajib/ Statistik	Ada kegiatan yang ditargetkan rencana refocusing yang dituangkan dalam pemotongan anggaran sehingga kegiatannya tidak dapat dilakukan. Karena adanya pandemi covid-19 jadi kegiatan dibatasi untuk melakukan aktifitas.	
21	Wajib/ Persandian	Kegiatan pembuatan sistem yang dianggarkan dengan jasa pihak ketiga tidak dapat dilakukan disebabkan ada beberapa sumber daya manusia (sdm) dinas komunikasi dan informatika kota pontianak mampu melakukannya sehingga dananya belum dicairkan. Ada beberapa barang elektronik berkaitan dengan keamanan informasi tidak dapat dibeli dikarenakan barang tersebut harus menggunakan izin. Karena adanya pandemi covid-19 jadi kegiatan dibatasi untuk melakukan aktifitas.	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Wajib/ Kebudayaan	Belum semua kelompok sanggar seni mendaftarkan atau memperoleh tanda sah daftar.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		Perlu dilengkapinya sarana dan prasarana pertunjukan sebagai penunjang kegiatan seni dan budaya.	
23	Wajib/ Perpustakaan	Terdapat kendala dalam penginputan SIRUP.	Dinas Perpustakaan
24	Wajib/ Kearsipan	Keterbatasan tenaga pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah, Kelurahan maupun BUMD/ keterbatasan jumlah arsiparis dan kemampuan dalam pengelolaan/ ketidaktepatan jadwal pelaksanaan kegiatan fumigasi/ termit control.	
25	Pilihan/ Kelautan dan Perikanan	Untuk pengelolaan perikanan budidaya, kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, kegiatan dilaksanakan diakhir bulan Juni, sehingga pencairan di bulan Juli.	
		Kegiatan jumlah sarana perikanan budidaya masih dalam proses kontrak dan memang belum masuk waktu angkas.	
		Kegiatan jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina baru akan dilaksanakan di bulan September.	
26	Pilihan/ Pertanian	Kegiatan jumlah sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura, angkas digeser di TW 3.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Kegiatan pemanfaatan SDG hewan/tanaman baru 20% teralisasi merupakan dana POKIR dan difocusing.	
		Banyak kegiatan yang difocusing dan angkas digeser di TW 4.	
		Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis terkendala pandemi dan pemberlakuan PPKM sehingga tidak dapat melaksanakan vaksinasi seperti tahun-tahun sebelumnya.	
		Kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan 22% terealisasi karena untuk belanja modal ada yang belum terealisasi ada peralihan PPKom yang diambil alih PA, kemudian ada perubahan anggaran secara otomatis terpengaruh pada tertundanya realisasi.	
27	Pilihan/Pariwisata	Adanya refocusing dan pandemi covid-19 sehingga kegiatan event yang melibatkan orang banyak tidak dapat dilaksanakan maksimal.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan dengan memaksimalkan penyerapan anggaran (mengalihkan kegiatan event tatap muka dengan kegiatan virtual).	

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
28	Pilihan/ Perdagangan	Kios/Los pada pasar tradisional di lantai 2 (dua) masih belum dimanfaatkan secara optimal.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
29	Pilihan/ Perindustrian	Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya merk produk yang dihasilkan dan ketrampilannya dalam pengembangan produk untuk inovasi hasil produksi, dan teknik desain kemasan.	
30	Penunjang/ Perencanaan	Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta seringnya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemotongan anggaran yang berdampak pada kegiatan yang akan direalisasikan.	
		Adanya Work From Home yang diterapkan oleh pemerintah juga menghambat kegiatan yang telah terjadwal sebelumnya sehingga harus mengatur ulang jadwal untuk melaksanakan kegiatan tersebut.	
		Kurangnya ketersediaan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan juga menghambat kegiatan yang akan dilakukan.	
31	Penunjang/ Keuangan	Karena adanya refocusing sehingga ada kegiatan yang ragu untuk dilaksanakan	Badan Keuangan Daerah
		Adanya pandemi membuat Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan dan untuk mengoptimalkan pemungutan pendapatan tersebut langkah/strategi yang diambil yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <ol style="list-style-type: none"> a) Membuka layanan pemberian informasi, konsultasi dan pengawasan pajak daerah dengan media WA dan telepon di Kring Pengawasan 0853-8999-9100; b) Pengawasan berkas masuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan online untuk percepatan proses BPHTB; c) Melakukan monitoring pajak hotel, restoran, hiburan dengan media Dashboard Tapping Box dan e-Pos (alat perekaman data transaksi secara online) dan dikomunikasikan kepada Bidang lain terkait dengan media WA grup sebagai tindak lanjut hasil monitoring/pengawasan; d) Penguatan kerjasama eksternal dan menjalin koordinasi via online dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama dengan DJP/DJPB sebagai 	

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		<p>tindaklanjut pengawasan bersama dan pertukaran data pajak pusat dan pajak daerah;</p> <p>e) Razia/penertiban Objek Reklame Insidentil khususnya reklame rokok dan reklame lain yang melanggar Peraturan Daerah / pemasangan;</p> <p>f) Monitoring Objek Reklame Insidentil per jalan secara berkala;</p> <p>g) Evaluasi dan inventarisir data Objek Pajak dan Wajib Pajak dalam rangka persiapan pengawasan aktif pasca Covid-19.</p> <p>2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</p> <p>a) Melaksanakan kegiatan penyisiran Objek Pajak reklame baru belum terdaftar;</p> <p>b) Kegiatan pendaftaran dan verifikasi pendaftaran Objek Pajak secara online sebagai tindaklanjut kegiatan pendataan Objek Pajak;</p> <p>c) Penyisiran Objek Pajak parkir belum terdaftar.</p> <p>3. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p> <p>a) Mengoptimalkan pendaftaran, pelaporan dan penyetoran Pajak Daerah melalui aplikasi e-Ponti sehingga Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara langsung berkurang;</p> <p>b) Melayani Wajib Pajak melalui media elektronik (Whatsapp, SMS Gateway dan telepon).</p>	
32	Penunjang/ Kepegawaian	<p>Kegiatan Pelayanan Penyelesaian KARIS/KARSU, Peningkatan Mental Spiritual dan MCU karena pemberlakuan PPKM di Kota Pontianak, kegiatan MCU dan ceramah agama ditunda.</p> <p>Pengambilan Sumpah PNS akan dilaksanakan pada Triwulan IV</p> <p>Kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian ditunda karena pemberlakuan PPKM di Kota Pontianak</p>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33	Penunjang/Pendidikan dan Pelatihan	<p>Banyak lembaga diklat yang menunda/meniadakan kegiatan diklat</p> <p>Pengiriman ASN untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah diadakan di Triwulan III</p> <p>Tidak terlaksananya ASN yang dikirim mengikuti PKN Tk. III karena tidak ada badan diklat yang menyelenggarakan PKA</p>	

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
34	Penunjang/ Penelitian dan Pengembangan	Situasi pandemi Covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Menunggu APBD Perubahan terkait perubahan pencatatan jenis belanja yang sebelumnya belanja jasa konsultasi menjadi belanja modal.	
35	Penunjang/Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	Beberapa agenda perjalanan dinas ditunda karena situasi pandemi belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas.	Sekretariat DPRD
		Kegiatan rapat-rapat DPRD selama masa pandemi dilakukan secara lebih selektif dan efisien, misalnya jumlah tamu yang diundang hanya 50% dari kapasitas ruangan bahkan beberapa rapat dilakukan secara online, hal ini menyebabkan anggaran makan minum rapat tidak terserap secara maksimal.	
		Pengadaan kendaraan roda 4 untuk PKK dan BPN dalam anggaran dan kas pada bulan Juni namun e-katalog baru tersedia bulan Juli.	Sekretariat Daerah
		Kegiatan ibadah Haji anggarannya difocusing untuk penanganan pandemi serta terkait dengan proses.	
Sehubungan dengan kebijakan PPKM, anggaran makanan dan minuman akan direalisasikan pada perubahan anggaran.			
36	Penunjang/ Pengawasan	Pertemuan dengan BPK menggunakan zoom, sehingga belanja makanan dan minuman tidak terserap dan difocusing	Inspektorat
		Kegiatan yang melibatkan lintas sektoral (Polres, Kejaksaan) seperti cyber pungli sering dan rutin dilaksanakan sementara anggaran makanan dan minuman terbatas	
		Diklat peningkatan kapasitas aparaturnya tidak bisa terlaksana karena difocusing	
		Situasi pandemi pengawasan semakin ketat dengan mengundang pihak terkait namun anggaran makanan dan minuman terbatas dan tidak bisa ditambah lagi karena difocusing	
37	Penunjang/ Kecamatan	Kegiatan MTQ tingkat kecamatan baru dapat dilaksanakan pada bulan Juli karena kendala pada peserta yang jauh dan pembayaran secara CMS dan untuk MTQ tingkat kota baru akan dilaksanakan pada bulan September menunggu konfirmasi LPTQ Kota Pontianak.	Kecamatan Pontianak Kota
		Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena ada difocusing anggaran untuk kegiatan yang banyak mengumpulkan masyarakat.	
		Kegiatan gotong royong kecamatan dan kelurahan sudah sebagian dilakukan	Kecamatan Pontianak Barat

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		agak terkendala dikarenakan PPKM terkait covid-19 sebab kegiatan gotong royong dengan melibatkan masyarakat melalui RT/RW.	
		Adanya Refokusing maupun pergeseran anggaran yang dilakukan.	Kecamatan Pontianak Selatan
		Kegiatan/sub kegiatan yang bersifat kontra.ktual, masih dalam proses pengadaan dimana sering terdapat kendala ketidaksesuaian dengan harga pasar dari nilai ketetapan yang terdapat dalam sistem penganggaran	
		Adanya Refokusing maupun pergeseran anggaran yang dilakukan.	Kecamatan Pontianak Tenggara
		Terkait pelaksanaan PPKM di wilayah Kota Pontianak secara khusus di Tingkat Kecamatan sehingga mengakibatkan banyak pembatasan – pembatasan kegiatan terutama kegiatan/sub kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak.	
		Kegiatan dan Program yang menjadi Indikator Kinerja pada Kecamatan yaitu Pelayanan pada Masyarakat atau Pelayanan Publik seperti Kegiatan Gotong Royong dan Senam serta kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat , ditiadakan atau ditunda pelaksanaannya pada Tahun ini dikarenakan anggaran yang telah di refocusing serta kegiatan yang apabila dilaksanakan melanggar Protokol Kesehatan (PROKES) Covid 19 karena kegiatannya akan menimbulkan kerumunan orang yang berakibat berpotensi tersebarnya Virus Covid 19. Hal ini tentunya tidak sejalan dan bertolak belakang dari program Pemerintah yang sedang berusaha memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pontianak Timur. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk Tahun ini ditiadakan atau ditunda pelaksanaannya.	Kecamatan Pontianak Timur
		Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Pontianak Timur sampai dengan TW 2 sebesar 43, 93 persen dan Realisasi Kinerja sudah mendekati angka 50 Persen. , hal ini antara lain disebabkan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2021, yang dilaksanakan pada akhir Bulan Juni 2021, akan tetapi Realisasi Pembayaran baru dilaksanakan pada Bulan Juli dan Bulan Agustus, dikarenakan jadwal pelaksanaan MTQ untuk Kecamatan Pontianak Timur yang dikeluarkan oleh LPTQ Kota Pontianak yang semula awal Bulan Juni diundur pelaksanaannya menjadi akhir Bulan Juni. Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		<p>Pontianak Timur mengakibatkan Realisasi Penyerapan Anggaran yang seharusnya dapat dilaksanakan di Bulan Juni akhirnya baru dapat dilakukan pada Bulan Juli dan Agustus , hal ini berpengaruh langsung pada kurangnya prosentase penyerapan anggaran sampai di Triwulan 2 dikarenakan belum termasuk Kegiatan MTQ.</p> <p>Kegiatan Belanja Modal yang pelaksanaannya mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal semula kegiatan Belanja Modal realisasinya pada TW 2, karena adanya beberapa kendala akhirnya tidak dapat di realisasikan seluruhnya pada TW 2, dan sampai saat ini Belanja Modal masih terus direalisasikan item per item.</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kegiatan MTQ</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan MTQ Untuk kegiatan MTQ pada triwulan II belum terlaksana karena jadwal untuk Kecamatan Pontianak Utara pada tanggal 3 s.d 8 Juli 2021 (termasuk triwulan 3) Untuk belanja honor juri, makan minum dan pengisi acara terealisasi pada bulan agustus, untuk belanja hadiah sebesar Rp 130.472.000,00 belum di realisasikan karena adanya perubahan dan penambahan anggaran</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan Gotong Royong Untuk kegiatan gotong royong Kecamatan menunggu jadwal dari kelurahan</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan PKK Karena adanya pandemi dan PPKM kegiatan PKK di tingkat kota, Kecamatan dan Kelurahan di kurangi</p>	Kecamatan Pontianak Utara
		<p>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan dan /atau/ Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Anggaran di Kecamatan sebesar Rp 100.000.000,00 adalah kegiatan sspd, transportasi dan makan minum dimana 	

No.	Urusan/Bidang	Permasalahan	Perangkat Daerah
(1)	(3)	(4)	(5)
		<p>kegiatan Kecamatan mengikuti kegiatan di Kelurahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Anggaran dikelurahan masing – masing sebesar Rp 50.000.000,00 adalah kegiatan transportasi dan makan minum ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana dan untuk sosialisasi Pencegahan Covid-19 Kelurahan Siantan Tengah terlaksana pada bulan Agustus. 	
		<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pengadaan Penataan dan Mesin Lainnya</p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengadaan Komputer, Printer dan Laktop Sampai Triwulan II belum direalisasikan karena anggarannya akan di refocusing sesuai peraturan berlaku. <input type="checkbox"/> Kegiatan Rutin Lainnya <p>Kegiatan berjalan lancar , ada beberapa kegiatan sudah terlaksana tapi spjnya belum masuk ke bendahara dan menunggu pencairan GU selanjutnya.</p>	
38	Penunjang/ Unsur Pemerintahan Umum	<p>Akibat refocusing anggaran yang memangkas anggaran kegiatan sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan maksimal.</p> <p>Masa pandemi menjadi pertimbangan untuk mengurangi kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang, meskipun demikian kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pemantauan ke lapangan tetap dilaksanakan namun tidak membebankan biaya pada anggaran.</p>	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

Tabel 2.3
Matrik Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021

NO.	URUSAN/BIDANG	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	PERANGKAT DAERAH
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
01	Program Pengelolaan Pendidikan	150.107.240.834	10.662.803.882	7,10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.172.821.653	205.255.901	0,73%	
03	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	0	0	0,00%	
2	KESEHATAN				
01	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	184.493.343.701	14.025.881.509	7,60%	Dinas Kesehatan
02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	531.912.772	9.400.894	1,77%	
03	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	476.715.731	28.932.000	6,07%	
04	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	424.803.127	7.500.000	1,77%	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
01	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	13.885.257.688	2.417.852.699	17,41%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.723.061.697	0	0,00%	
03	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	149.881.205	0	0,00%	
04	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	934182660	0	0,00%	
05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	43.031.023.745	2.552.992.484	5,93%	
06	Program Pengembangan Permukiman	20.522.970.440	0	0,00%	
07	Program Penataan Bangunan Gedung	47745742639	33.000.000	0,07%	
08	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	34.566.542.645	3.119.052.996	9,02%	
09	Program Penyelenggaraan Jalan	69.208.250.693	226.117.475	0,33%	
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	460.828.241	11.000.000	2,39%	
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	789.435.510	35.600.000	4,51%	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				

01	Program Pengembangan Perumahan	4.756.679.358	182.218.156	3,83%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
02	Program Kawasan Permukiman	8.619.836.879	14.635.099	0,17%	
03	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	847.991.000	0	0,00%	
04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	99.921.849.414	40.933.994	0,04%	
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
01	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.197.853.493	202.055.000	9,19%	Satuan Polisi Pamong Praja
02	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	273.296.100	30.310.000	11,09%	
03	Program Penanggulangan Bencana	673.831.752	148.271.900	22,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	SOSIAL				
01	Program Pemberdayaan Sosial	1.739.012.731	389.874.499	22,42%	Dinas Sosial
02	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	42.443.000	2.236.000	5,27%	
03	Program Rehabilitasi Sosial	1.566.981.600	203.126.487	12,96%	
04	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.315.115.400	311.025.000	23,65%	
05	Program Penanganan Bencana	412.006.000	36.180.000	8,78%	
06	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	39.412.500	0	0,00%	
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA				
01	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	241.735.544	98.620.208	40,80%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
02	Program Penempatan Tenaga Kerja	172.269.110	0	0,00%	
03	Program Hubungan Industrial	214.333.367	6.750.000	3,15%	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
01	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	143.427.250	0	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02	Program Perlindungan Perempuan	585.641.484	18.499.276	3,16%	
03	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	3.500.000	0	0,00%	
04	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	332.279.010	73.121.577	22,01%	
05	Program Perlindungan Khusus Anak	80.021.590	4.950.000	6,19%	
3	PANGAN				

01	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.110.730.000	11.435.099	1,03%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
02	Program Penanganan Kerawanan Pangan	179.270.000	0	0,00%	
03	Program Pengawasan Keamanan Pangan	90.000.000	0	0,00%	
4	PERTANAHAN				
01	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	39.094.900	0	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
02	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	48.039.398.444	13.103.718.000	27,28%	
03	Program Pengelolaan Tanah Kosong	71.897.880	0	0,00%	
04	Program Penatagunaan Tanah	98.570.000	0	0,00%	
5	LINGKUNGAN HIDUP				
01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	10.000.000	0	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
02	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1.857.389.475	46.216.900	2,49%	
03	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	132.370.000	0	0,00%	
04	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	96.937.500	0	0,00%	
05	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	82.189.600	0	0,00%	
06	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.983.287.371	308.178.072	10,33%	
07	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	427.085.397	0	0,00%	
08	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.573.300	0	0,00%	
09	Program Pengelolaan Sampah	45.686.595.256	4.625.490.406	10,12%	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
01	Program Pendaftaran Penduduk	1.472.427.734	17.607.000	1,20%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02	Program Pencatatan Sipil	507.586.738	0	0,00%	

03	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	276.892.474	20.460.061	7,39%	
04	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	19.122.933	0	0,00%	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
01	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	247.713.924	1.000.000	0,40%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
01	Program Pengendalian Penduduk	165.750.245	41.750.000	25,19%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.298.808.488	120.354.680	3,65%	
03	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	928.300.105	59.884.250	6,45%	
9	PERHUBUNGAN				
01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30.927.669.516	488.831.885	1,58%	Dinas Perhubungan
02	Program Pengelolaan Pelayaran	868.736.180	89.365.193	10,29%	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
01	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.000.189.814	79.163.780	7,91%	Dinas Komunikasi dan Informatika
02	Program Aplikasi Informatika	3.402.691.040	69.640.047	2,05%	
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
01	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.760.100	0	0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
02	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	55.496.802	3.700.000	6,67%	
03	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	3.668.091	0	0,00%	
04	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	394.448.639	0	0,00%	
05	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	8.823.091	0	0,00%	
06	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	16.770.000	0	0,00%	
07	Program Pengembangan UMKM	231.000.000	29.707.194	12,86%	
12	PENANAMAN MODAL				
01	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	102.654.000	5.150.000	5,02%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
02	Program Promosi Penanaman Modal	38.430.000	0	0,00%	
03	Program Pelayanan Penanaman Modal	237.748.200	18.578.000	7,81%	

04	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	349.697.599	0	0,00%	
05	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	103.941.350	0	0,00%	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.877.456.865	13.100.000	0,70%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
02	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.342.015.558	234.337.755	5,40%	
03	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	86.924.330	0	0,00%	
14	STATISTIK				
01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	559.708.964	101.801.130	18,19%	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	PERSANDIAN				
01	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	246.785.480	9.671.710	3,92%	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	KEBUDAYAAN				
01	Program Pengembangan Kebudayaan	2.222.201.626	133.636.695	6,01%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	68.398.775	68.359.597	99,94%	
03	Program Pembinaan Sejarah	135.956.350	0	0,00%	
04	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	101.935.316	0	0,00%	
05	Program Pengelolaan Permuseuman	200.000.000	0	0,00%	
17	PERPUSTAKAAN				
01	Pembinaan Perpustakaan	754.789.648	86.948.300	11,52%	Dinas Perpustakaan
18	KEARSIPAN				
01	Program Pengelolaan Arsip	204.614.640	0	0,00%	Dinas Perpustakaan
02	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4.480.000	0	0,00%	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
01	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	794.200.000	0	0,00%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
02	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	687.300.000	53.014.679	7,71%	
03	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	140.600.000	0	0,00%	
2	PARIWISATA				
01	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	685.488.702	29.100.000	4,25%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
02	Program Pemasaran Pariwisata	464.320.000	14.550.000	3,13%	

03	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	867.109.510	16.200.000	1,87%	
3	PERTANIAN				
01	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.852.500.650	142.196.717	7,68%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	166.934.000	0	0,00%	
03	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.396.177.200	108.118.143	7,74%	
04	Program Penyuluhan Pertanian	598.832.000	0	0,00%	
4	PERDAGANGAN				
01	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	75.019.752	0	0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
02	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.328.693.140	210.076.850	9,02%	
03	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75.788.450	18.274.874	24,11%	
04	Program Pengembangan Ekspor	32.674.769	0	0,00%	
05	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	360.323.690	55.595.953	15,43%	
06	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	9.350.100	0	0,00%	
5	PERINDUSTRIAN				
01	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	405.636.882	52.620.400	12,97%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
02	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	3.201.000	0	0,00%	
03	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	6.439.600	0	0,00%	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	SEKRETARIAT DAERAH				
01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.681.983.152	511.991.021	4,04%	Sekretariat Daerah
02	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.077.838.576	254.598.622	5,01%	
2	SEKRETARIAT DPRD				
01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8.091.830.510	1.910.081.188	23,61%	Sekretariat DPRD
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	PERENCANAAN				
01	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.799.255.201	162.791.300	9,05%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

02	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.366.726.455	44.980.000	3,29%	
2	KEUANGAN				
01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	82.289.713.949	3.897.671.662	4,74%	Badan Keuangan Daerah
02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.647.927.693	236.372.496	2,73%	
03	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.221.090.724	0	0,00%	
3	KEPEGAWAIAN				
01	Program Kepegawaian Daerah	5.140.203.506	74.361.000	1,45%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
01	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.561.993.957	44.750.000	0,98%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
01	Program Penelitian dan pengembangan daerah	1.224.467.060	121.328.900	9,91%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1	PENGAWASAN				
01	Program Penyelenggaraan Pengawasan	123.536.200	7.595.000	6,15%	Inspektorat
02	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	833.696.000	72.800.400	8,73%	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN				
1	KECAMATAN				
01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	857.557.626	324.993.175	37,90%	Kecamatan
02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.937.910.416	870.187.076	12,54%	
03	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.226.844.092	161.956.910	7,27%	
04	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.985.666.815	113.351.400	3,80%	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
01	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.986.852.100	166.007.350	5,56%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
02	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	3.381.875.512	0	0,00%	

03	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0,00%
04	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	32.249.000	0	0,00%
05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	805.065.000	283.800.000	35,25%

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Pontianak

7	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d Trivulm II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13									
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
PENDIDIKAN																					
1	1	01	01	01	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100	90,232,653,339	100	85,087,419,561	0	0	0	0	100	85,087,419,561	100%	94.30%				
2	1	01	01	02	Program Pendidikan Dasar	100	64,200,046,630	100	60,518,052,682	0	0	0	0	100	60,518,052,682	100%	94.26%				
3	1	01	01	03	Program Pendidikan Non Formal	100	792,910,000	100	697,057,550	0	0	0	0	100	697,057,550	100%	87.91%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Tahun 2020		
4	1	01	01	04	Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan	100	425,182,000	100	413,557,027	0	0	0	0	100	413,557,027	100%	97.27%				
5	1	01	01	05	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100	1,718,265,000	100	1,653,783,585	0	0	0	0	100	1,653,783,585	100%	96.25%				
6	1	01	01	06	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	2,420,015,000	100	2,382,407,000	0	0	0	0	100	2,382,407,000	100%	98.45%				
7	1	01	01	07	Program Pengelolaan Pendidikan	400	600,108,785,009	0	0	100	150,107,240,834	35.67	18,423,504,469	36%	12.27%	35.67	18,423,504,469	100%	3.07%		
8	1	01	01	08	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	400	113,182,042,494	0	0	100	28,172,821,633	22.07	4,060,539,610	22%	14.41%	22.07	4,060,539,610	100%	3.59%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
9	1	01	01	09	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	300	603,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KESEHATAN																					
1	1	02	01	01	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Bayi Baru Lahir	12	1,498,242,950	12	1,465,650,675	0	0	0	0	12	1,465,650,675	100%	97.82%				
2	1	02	01	02	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12	19,926,000	12	19,793,500	0	0	0	0	12	19,793,500	100%	99.34%				
3	1	02	01	03	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah dan Remaja	12	135,780,000	12	135,724,500	0	0	0	0	12	135,724,500	100%	99.96%				
4	1	02	01	04	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	12	619,008,355	12	615,612,993	0	0	0	0	12	615,612,993	100%	99.45%				
5	1	02	01	05	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	12	4,593,023,974	12	4,053,173,569	0	0	0	0	12	4,053,173,569	100%	88.25%				
6	1	02	01	06	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	12	2,015,507,980	12	1,938,012,800	0	0	0	0	12	1,938,012,800	100%	96.16%				
7	1	02	01	07	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Makanan	12	630,750,000	12	614,667,250	0	0	0	0	12	614,667,250	100%	97.45%				
8	1	02	01	08	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	12	9,739,684,996	12	5,672,647,579	0	0	0	0	12	5,672,647,579	100%	58.24%				
9	1	02	01	09	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	12	1,432,338,500	12	729,187,425	0	0	0	0	12	729,187,425	100%	50.91%				
10	1	02	01	10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12	53,332,384,942	12	48,918,718,309	0	0	0	0	12	48,918,718,309	100%	91.72%				
11	1	02	01	11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	12	2,979,413,000	12	2,946,608,748	0	0	0	0	12	2,946,608,748	100%	98.90%	Dinas Kesehatan	Program Tahun 2020		

7	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
	1	2	3			4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
12	1	02	01	12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketercodisian obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar	12	7,263,476,826	12	7,149,855,873	0	0	0	0	0%	0%	12	7,149,855,873	100%	98.44%	Dinas Kesehatan	Program Tahun 2020
13	1	02	01	13	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar	12	194,291,700	12	168,197,500	0	0	0	0	0%	0%	12	168,197,500	100%	86.57%		
14	1	02	01	14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Keluarga yang ber PHBS	12	558,248,000	12	531,182,000	0	0	0	0	0%	0%	12	531,182,000	100%	95.15%		
15	1	02	01	15	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan	Persentase Rumah Sakit yang sudah melakukan simulasi Akreditasi Nasional	12	50,790,143,192	12	48,370,683,848	0	0	0	0	0%	0%	12	48,370,683,848	100%	95.24%		
16	1	02	01	16	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan prasarana RSUD sesuai standar	12	30,423,379,114	12	29,894,975,802	0	0	0	0	0%	0%	12	29,894,975,802	100%	98.26%		
17	1	02	01	17	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan prasarana RSUD berfungsi dengan baik	12	2,064,536,250	12	2,009,750,468	0	0	0	0	0%	0%	12	2,009,750,468	100%	97.35%		
18	1	02	01	18	Program Peningkatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12	11,556,150,362	12	11,095,054,593	0	0	0	0	0%	0%	12	11,095,054,593	100%	96.01%		
19	1	02	01	19	Program Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit	Persentase Sistem Informasi RS sesuai standar	12	228,350,000	12	224,522,085	0	0	0	0	0%	0%	12	224,522,085	100%	98.32%		
20	1	02	01	20	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12	672,063,080	12	608,204,215	0	0	0	0	0%	0%	12	608,204,215	100%	90.50%		
21	1	02	01	21	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase FKTP yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	12	89,668,300	12	89,296,000	0	0	0	0	0%	0%	12	89,296,000	100%	99.58%		
22	1	02	01	22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar, Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar 100 %	96.04	866,517,839,547	0	0	92.67	201,880,702,624	46.34	55,740,537,792	50%	27.61%	46.34	55,740,537,792	48.24%	6.43%	Dinas Kesehatan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
23	1	02	01	23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar 90 %	360	3,039,090,482	0	0	90	370,737,772	45	19,615,994	50%	5.29%	45	19,615,994	12.50%	0.65%		
24	1	02	01	24	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan 90 %	360	1,463,309,987	0	0	90	467,877,051	45	135,882,000	50%	29.04%	45	135,882,000	12.50%	9.29%		
25	1	02	01	25	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase meningkatnya panjang turap baru	360	1,508,614,927	0	0	90	423,890,405	45	17,007,107	50%	4.01%	45	17,007,107	12.50%	1.13%		
III	1	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	1	03	01	01	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring saluran drainase	Tersedia data dan informasi jalan dan jembatan tiap tahun	100	39,600,000	100	35,114,000	0	0	0	0	0%	0%	100	35,114,000	100%	88.67%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Tahun 2020
2	1	03	01	02	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Presentase berkurangnya jalan yang kualitas konstruksinya rendah	24.74	14,369,717,500	27.88	13,795,222,803	0	0	0	0	0%	0%	27.88	13,795,222,803	113%	96.00%		
3	1	03	01	03	Program pengembangan jalan dan jembatan	Presentase peningkatan panjang jalan yang permukaannya aspal	57.09	22,151,572,500	30.25	20,449,192,982	0	0	0	0	0%	0%	30.25	20,449,192,982	53%	92.31%		
4	1	03	01	04	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Presentase berkurangnya jalan dengan status kondisi rusak SEDANG (karena meningkat statusnya menjadi kondisi BAIK)	20.11	60,046,315,891	116.76	59,687,197,519	0	0	0	0	0%	0%	116.76	59,687,197,519	581%	99.40%		
5	1	03	01	05	Program Pembangunan turap / talud / brojong	Presentase meningkatnya panjang turap baru	3.33	2,842,130,000	0.24	2,669,893,500	0	0	0	0	0%	0%	0.24	2,669,893,500	7%	93.94%		
6	1	03	01	06	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Presentase meningkatnya panjang saluran berkonstruksi	48.23	26,971,861,000	25.4	26,491,702,870	0	0	0	0	0%	0%	25.4	26,491,702,870	53%	98.22%		
7	1	03	01	07	Program peningkatan turap / talud / brojong kayu belan	Presentase berkurangnya turap kayu belan	5.93	6,708,015,000	0	4,916,740,000	0	0	0	0	0%	0%	0	4,916,740,000	0%	73.30%		

7	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
						5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
8	1	03	01	08	Program pemeliharaan/rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase/koker-gorong-gorong	Prosentase panjang fungsi saluran yang dipelihara	24.03	31,460,984,360	37.5	31,079,106,431	0	0	0	0	0%	0%	37.5	31,079,106,431	156%	98.79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Tahun 2020
9	1	03	01	09	Program Pengendalian banjir	Prosentase berkurangnya lokasi kejadian genangan hujan/pasang tiap tahun	83.33	363,378,900	123	358,510,132	0	0	0	0	0%	0%	123	358,510,132	148%	98.66%		
10	1	03	01	10	Program pengadaan dan pemeliharaan alat berat	Prosentase jumlah alat berat siap / siap dioperasikan	100	767,262,400	95	724,826,705	0	0	0	0	0%	0%	95	724,826,705	95%	94.47%		
11	1	03	01	11	Program Konsultasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi	Prosentase jumlah peserta didik dan dibina	100	77,000,000	100	76,791,385	0	0	0	0	0%	0%	100	76,791,385	100%	99.73%		
12	1	03	01	12	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase ruas jalan yang telah didata RMJ dan GSD	100	270,680,000	88.46	252,247,600	0	0	0	0	0%	0%	88.46	252,247,600	88%	93.19%		
13	1	03	01	13	Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase tersedianya dokumen penataan	100	656,800,000	70	574,642,294	0	0	0	0	0%	0%	70	574,642,294	70%	87.49%		
14	1	03	01	14	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	Prosentase tersedianya dokumen pelaksanaan pengawasan	100	1,370,600,000	80	1,335,683,735	0	0	0	0	0%	0%	80	1,335,683,735	80%	97.45%		
15	1	03	01	15	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Prosentase meningkatnya jumlah KK dilayani sanitasi	100	13,474,617,510	98.65	13,233,800,435	0	0	0	0	0%	0%	98.65	13,233,800,435	99%	98.21%		
16	1	03	01	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah sarana dan prasarana dibangun	34	32,099,394,468	107	29,773,912,195	0	0	0	0	0%	0%	107	29,773,912,195	315%	92.76%		
17	1	03	01	17	Program Pengembangan Sistem Persampahan	Prosentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	95	24,500,000	95	19,907,200	0	0	0	0	0%	0%	95	19,907,200	100%	81.25%		
18	1	03	01	18	Program Peningkatan Penataan dan Pengolahan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah taman ditingkatkan	3	14,054,617,480	3	13,552,317,638	0	0	0	0	0%	0%	3	13,552,317,638	100%	96.43%		
19	1	03	01	19	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase bertambahnya luas RTH dikelola	18.76	15,879,885,352	18.76	14,847,874,037	0	0	0	0	0%	0%	18.76	14,847,874,037	100%	93.50%		
20	1	03	01	20	Program pengembangan sistem informasi		1	241,856,800	1	236,454,324	0	0	0	0	0%	0%	1	236,454,324	100%	97.77%		
21	1	03	01	21	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase berkurangnya luas genangan hujan / pasang tiap tahun	150	105,295,257,688	0	0	50	12,847,790,135	25	8,515,305,599	50%	66.28%	25	8,515,305,599	17%	8.09%		
22	1	03	01	22	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase sarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga	400	29,016,237,756	0	0	100	8,376,416,213	50	925,237,327	50%	11.05%	50	925,237,327	13%	3.19%		
23	1	03	01	23	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	352.5	30,693,881,205	0	0	90	149,881,205	45	2,250,000	50%	1.50%	45	2,250,000	13%	0.01%		
24	1	03	01	24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	366.09	17,919,782,660	0	0	90	682,446,500	45	8,919,572	50%	1.31%	45	8,919,572	12%	0.05%		
25	1	03	01	25	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara	150	172,774,939,745	0	0	50	34,257,009,847	25	9,120,498,004	50%	26.62%	25	9,120,498,004	17%	5.28%		
26	1	03	01	26	Program Pengembangan Permukiman	Prosentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman	400	49,382,970,440	0	0	100	20,522,970,440	50	7,029,625,718	50%	34.25%	50	7,029,625,718	13%	14.23%		
27	1	03	01	27	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung	400	187,156,406,782	0	0	100	46,229,973,911	50	8,362,980,866	50%	18.09%	50	8,362,980,866	13%	4.47%		

7	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
						5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
28	1	03	01	28	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	75.75	148,391,184,784	0	0	18.9	30,362,445,113	9.45	10,509,639,706	50%	34.61%	9.45	10,509,639,706	12%	7.08%		
29	1	03	01	29	Program Penyelenggaraan Jalan	8	317,283,416,693	0	0	2	50,549,996,977	1	4,301,793,178	50%	8.51%	1	4,301,793,178	13%	1.36%		
30	1	03	01	30	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	400	2,630,828,241	0	0	100	460,728,241	50	45,800,000	50%	9.94%	50	45,800,000	13%	1.74%		
31	1	03	01	31	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	391.43	9,281,165,510	0	0	96.89	776,285,010	48.45	121,084,200	50%	15.60%	48.45	121,084,200	12%	1.30%		
IV	1	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	1	04	01	01	Program Pengembangan Permukiman	160	105,683,615,994	877	103,637,681,647	0	0	0	0	0%	0%	877	103,637,681,647	548%	98.06%		Program Tahun 2020
2	1	04	01	02	Program Pengembangan Perumahan	500	21,109,348,576	93.59	7,361,315,784	100	4,756,651,258	52	413,503,497	52.00%	8.69%	145.59	7,774,819,281	29%	36.83%		
3	1	04	01	03	Program Kawasan Permukiman	48.67	51,894,171,857	0	0	10	6,592,647,044	2.19	699,942,999	22%	11%	2.19	699,942,999	4%	1.35%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
4	1	04	01	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.91	17,440,797,760	0	0	1.5	873,531,000	0.24	402,105,000	16%	46%	0.24	402,105,000	3%	2.31%		
5	1	04	01	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	341.5	292,357,152,802	0	0	78.5	75,106,052,676	0.00	123,313,194	0%	0%	0	123,313,194	0%	0.04%		
V	1	05			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	1	05	01	01	Penerapan dan penegakan hukum daerah	100	644,935,800	92	590,532,300	0	0	0	0	0%	0%	92	590,532,300	92%	91.56%		
2	1	05	01	02	Pemeliharaan krantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	12	913,798,000	12	889,447,700	0	0	0	0	0%	0%	12	889,447,700	100%	97.34%		
3	1	05	01	03	Perlindungan masyarakat	100	49,740,000	92	45,940,000	0	0	0	0	0%	0%	92	45,940,000	92%	92.36%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Tahun 2020
4	1	05	01	04	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100	10,050,000	72	7,201,431	0	0	0	0	0%	0%	72	7,201,431	72%	71.66%		
5	1	05	01	05	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100	40,300,000	100	40,240,000	0	0	0	0	0%	0%	100	40,240,000	100%	99.85%		
6	1	05	01	06	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	100	10,310,000	86	8,895,000	0	0	0	0	0%	0%	86	8,895,000	86%	86.28%		
7	1	05	01	07	Program Peningkatan Ketentraman dan Keterbacaan Umum	500	9,885,076,110	97	889,447,700	100	2,145,353,493	50	952,749,750	50%	44.41%	147	1,842,197,450	29%	18.64%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
8	1	05	01	08	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	400	1,532,916,057	0	0	100	273,296,100	50	96,987,350	50%	35.49%	50	96,987,350	13%	6.33%		

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9	1	05	01	09	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	759,519,900	100	597,883,855	0	0	0	0	0%	0%	100	597,883,855	100%	78.72%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Tahun 2020
10	1	05	01	10	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	101,536,000	41.67	62,115,000	0	0	0	0	0%	0%	41.67	62,115,000	42%	61.18%		
11	1	05	01	11	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	122,940,000	64.29	109,857,000	0	0	0	0	0%	0%	64.29	109,857,000	64%	89.36%		
12	1	05	01	12	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	28.5	51,822,000	28.5	47,566,000	0	0	0	0	0%	0%	28.5	47,566,000	100%	91.79%		
14	1	05	01	14	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	400	3,545,846,395	0	0	100	463,895,297	50	247,585,272	50%	53.37%	50	247,585,272	13%	6.98%		Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
VI 1 06 SOSIAL																						
1	1	06	01	01	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Memurumnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100	910,827,000	100	910,499,120	0	0	0	0	0%	0%	100	910,499,120	100%	99.96%	Dinas Sosial	Program Tahun 2020
2	1	06	01	02	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	479,522,000	100	473,438,319	0	0	0	0	0%	0%	100	473,438,319	100%	98.73%		
3	1	06	01	03	Pemberdayaan Kembang Kesejahteraan Sosial	Persentase tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	855,139,000	100	824,189,050	0	0	0	0	0%	0%	100	824,189,050	100%	96.38%		
4	1	06	01	04	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase peningkatan Fasilitas kebutuhan sosial anak Panti Asuhan	100	2,296,838,385	100	2,035,791,605	0	0	0	0	0%	0%	100	2,035,791,605	100%	88.63%		
5	1	06	01	05	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas Terlarang di Luar Panti Yang Direhabilitasi	100	34,125,000	100	34,125,000	0	0	0	0	0%	0%	100	34,125,000	100%	100.00%		
6	1	06	01	06	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	381	11,796,666,800	0	0	80	1,739,012,731	51	914,453,796	64%	53%	51	914,453,796	13%	7.75%	Dinas Sosial	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	1	06	01	07	Program Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Persentase peningkatan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	400	307,450,000	0	0	100	42,443,000	10	2,236,000	10%	5%	10	2,236,000	3%	0.73%		
8	1	06	01	08	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	375	8,581,466,100	0	0	100	1,566,981,600	79	655,294,637	79%	42%	79	655,294,637	21%	7.64%		
9	1	06	01	09	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan	400	8379237600.0	0	0	100	1,315,115,400	33	726,295,070	33%	55%	33	726,295,070	8%	8.67%		
10	1	06	01	10	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	400	4,245,368,000	0	0	100	412,006,000	60	173,043,000	60%	42%	60	173,043,000	15%	4.08%		
11	1	06	01	11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Makam Pahlawan yang Dikelola	400	189,412,500	0	0	100	39,412,500	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		

7	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
B	2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																			
I	2	01	TENAGA KERJA																		
1	2	01	01	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	5,100,000	100	5,100,000	0	0	0	0%	0%	100	5,100,000	100%	100%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	Program Tahun 2020	
2	2	01	02	Peningkatan kesempatan kerja	Persentase terlaksananya kegiatan kesempatan kerja	100	140,705,000	100	90,729,110	0	0	0	0%	0%	100	90,729,110	100%	64%			
3	2	01	03	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan terhadap tenaga kerja	100	149,202,000	88.89	139,099,700	0	0	0	0%	0%	88.89	139,099,700	89%	93%			
4	2	01	04	Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh	Persentase kepesertaan BPJS tenaga kerja	100	13,204,000	33.33	11,856,000	0	0	0	0%	0%	33.33	11,856,000	33%	90%			
5	2	01	05	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus dan Mendapat Sertifikat Kompetensi	400	998,662,444	0	0	100	218,294,208	48	217,870,208	48%	100%	48	217,870,208	12%	21.82%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
6	2	01	06	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair	305	1,008,390,035	0	0	70	2,700,600	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
7	2	01	07	Program Hubungan Industrial	Persentase Tenaga Kerja yang dilindungi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	400	977,815,117	0	0	100	168,303,977	45.21	86,599,462	45%	51%	45.21	86,599,462	11%	8.86%		
II	2	02	PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
1	2	02	01	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	330,991,052	0	261,162,380	0	0	0	0%	0%	0	261,162,380	0%	78.90%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tahun 2020	
2	2	02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100	4,438,000	100	4,437,400	0	0	0	0%	0%	100	4,437,400	100%	99.99%			
3	2	02	03	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	181,724,750	100	158,418,650	0	0	0	0%	0%	100	158,418,650	100%	87.18%			
4	2	02	04	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya	816,219,159	0	0	Pratama	73,452,000	25	15,200,000	0%	21%	25	15,200,000	0%	2%		
5	2	02	05	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.0138	1,441,018,599	0	0	0.0016	253,814,717	0	87,379,009	0%	34%	0	87,379,009	0%	6.06%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
6	2	02	06	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	330	56,803,872	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
7	2	02	07	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	400	1,083,173,173	0	0	100	251,646,981	100	174,943,577	100%	70%	100	174,943,577	25%	16.15%		
8	2	02	08	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	400	419,400,380	0	0	100	326,737,775	61.46	10,394,000	61%	3%	61.46	10,394,000	15%	2.48%		
III	2	03	PANGAN																		
1	2	03	01	Peningkatan ketahanan pangan	Persentase Pemurunan Daerah Rawan Pangan	90	2,874,275,000	97	2,681,263,380	0	0	0	0%	0%	97	2,681,263,380	108%	93.28%		Program Tahun 2020	
2	2	03	02	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	363	5,174,093,412	0	0	100	249,208,964	28.47	95,292,554	28%	38%	28.47	95,292,554	8%	1.84%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
3	2	03	03	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	366	724,500,908	0	0	90	139,765,650	22.5	31,236,500	25%	22%	22.5	31,236,500	6%	4.31%		
4	2	03	04	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	77	366,586,405	0	0	20	63,622,705	10	9,070,000	50%	14%	10	9,070,000	13%	2.47%		

7	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diwawahi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang diwawahi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
	1	2	3			4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
IV																						
PERTANAHAN																						
1	2	04	01	01	Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah asset Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai ketentuan	2	36,371,517,000	1	33,112,315,840	0	0	0	0	0%	0%	1	33,112,315,840	50%	91.04%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Tahun 2020
2	2	04	01	02	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	10	15,820,000	4	8,259,400	0	0	0	0	0%	0%	4	8,259,400	40%	52.21%		
3	2	04	01	03	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	380	330,474,900	0	0	80	39,083,100	50	6,745,000	63%	17%	50	6,745,000	13%	2.04%		
4	2	04	01	04	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	400	92,294,243,057	0	0	100	37,126,506,141	14	13,995,774,000	14%	38%	14	13,995,774,000	4%	15.16%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
5	2	04	01	05	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase bidang tanah Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan	400	433,088,880	0	0	100	71,889,200	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
6	2	04	01	06	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penggunaan tanah	400	598,980,000	0	0	100	98,570,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
V																						
LINGKUNGAN HIDUP																						
1	2	05	01	01	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Cakupan wilayah pengendalian pencemaran lingkungan	2640	299,732,000	2349	288,720,055	0	0	0	0	0%	0%	2349	288,720,055	89%	96.33%		
2	2	05	01	02	Pengendalian Polisi	Persentase kegiatan usaha yang menaati peraturan Lingkungan Hidup	982	2,069,834,768	982	2,016,552,512	0	0	0	0	0%	0%	982	2,016,552,512	100%	97.43%		
3	2	05	01	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan cadangan sumber daya alam	Nilai Adipura	90	288,505,000	57	258,129,936	0	0	0	0	0%	0%	57	258,129,936	63%	89.47%		
4	2	05	01	04	Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	Persentase jumlah sampah yang terangani di TPS	92	36,298,275,934	92	34,626,205,060	0	0	0	0	0%	0%	92	34,626,205,060	100%	95.39%	Dinas Lingkungan Hidup	Program Tahun 2020
5	2	05	01	05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan dalam kondisi baik	40	11,135,676,460	38	9,987,920,800	0	0	0	0	0%	0%	38	9,987,920,800	95%	89.69%		
6	2	05	01	06	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	24	3,073,138,824	24	2,946,263,372	0	0	0	0	0%	0%	24	2,946,263,372	100%	95.87%		
7	2	05	01	07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan PAD dari sektor persampahan	130	232,781,000	121	194,454,748	0	0	0	0	0%	0%	121	194,454,748	93%	83.54%		
8	2	05	01	08	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	300	1,788,040,000	0	0	0	10,000,000	0	900,000	0%	0.09	0	900,000	0%	0.05%		
9	2	05	01	09	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase pengendalian pencemaran	310	10,041,621,484	0	0	100	1,419,327,730	24.29	234,060,200	24%	16%	24.29	234,060,200	8%	2.33%		
10	2	05	01	10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	400	12,185,096,000	0	0	100	132,370,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
11	2	05	01	11	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	400	1,939,697,500	0	0	100	96,937,500	55.47	15,501,440	55%	16%	55.47	15,501,440	14%	0.80%		
12	2	05	01	12	Program Pengakuan Keberadan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	400	1,075,677,600	0	0	100	82,349,600	75	41,174,800	75%	50%	75	41,174,800	19%	3.83%	Dinas Lingkungan Hidup	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
13	2	05	01	13	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan	400	13,025,451,244	0	0	100	2,668,873,100	39.08	898,791,268	39%	34%	39.08	898,791,268	10%	6.90%		
14	2	05	01	14	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	400	2,097,104,822	0	0	100	319,861,581	0	25,868,472	0%	8%	0	25,868,472	0%	1.23%		
15	2	05	01	15	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	400	930,893,300	0	0	100	49,573,300	0	2,387,000	0%	5%	0	2,387,000	0%	0.26%		
16	2	05	01	16	Program Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	400	202,100,246,353	0	0	100	43,731,635,419	0	15,188,055,327	0%	35%	0.00	15,188,055,327	0.00%	7.52%		

7	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
VI	2	06	01	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																		
1	2	06	01	01	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	87.5	15,380,000	91.36	15,134,300	0	0	0	0	0%	0%	91.36	15,134,300	104%	98.40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Tahun 2020
2	2	06	01	02	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Sangat Baik	2,151,466,000	Baik	2,045,960,080	0	0	0	0	0%	0%	Baik	2,045,960,080	Baik	95.10%		
3	2	06	01	03	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	36	24,947,480	48.43	24,906,700	0	0	0	0	0%	0%	48.43	24,906,700	135%	99.84%		
4	2	06	01	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketersediaan Database Kependudukan skala Kota	38	230,523,000	28.72	227,319,976	0	0	0	0	0%	0%	28.72	227,319,976	76%	98.61%		
5	2	06	01	05	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga, Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen, KTP, KIA, Pelayanan Kehling	363.6	7,281,958,494	0	0	90	127,706,000	52.93	62,447,000	59%	49%	52.93	62,447,000	15%	0.86%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
6	2	06	01	06	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran anak yang memiliki dokumen perubahan status Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian, Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan, Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	207.5	2,139,113,924	0	0	48.75	363,545,518	16.67	624,900	34%	0%	16.67	624,900	8%	0.03%		
7	2	06	01	07	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH, data penduduk anomali dalam database SLAK	164.5	1,820,494,212	0	0	39.25	246,634,020	25.00	97,890,138	64%	40%	25.00	97,890,138	15%	5.38%		
8	2	06	01	08	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	400	79,332,433	0	0	100	19,122,933	0	4,869,150	0%	25%	0	4,869,150	0%	6.14%		
VII	2	07	01	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
1	2	07	01	01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Partisipasi LPM dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100	10,500,000	100	6,342,300	0	0	0	0	0%	0%	100	6,342,300	100%	60.40%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tahun 2020
2	2	07	01	02	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah alat TTG yang dihasilkan	2	42,326,000	0	3,750,000	0	0	0	0	0%	0%	0	3,750,000	0%	8.86%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
3	2	07	01	03	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	280	1,849,723,014	0	0	55	139,362,975	55	112,884,100	100%	81%	55	112,884,100	20%	6.10%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tahun 2020
VIII	2	08	01	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
1	2	08	01	01	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB Aktif	70.67	1,838,900,381	70.39	1,451,246,103	0	0	0	0	0%	0%	70.39	1,451,246,103	100%	78.92%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tahun 2020
2	2	08	01	02	Program Keluarga Sejahtera	Prosentase cakupan anggota BKB ber-KB	87.17	63,099,800	94.93	62,098,750	0	0	0	0	0%	0%	94.93	62,098,750	109%	98.41%		
3	2	08	01	03	Program Penyuluhan dan Penggerakan	Persentase pencapaian peserta KB baru	28.05	977,452,000	29.11	875,375,100	0	0	0	0	0%	0%	29.11	875,375,100	104%	89.56%		
4	2	08	01	04	Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	Persentase data dan informasi keluarga yang dimutakhirkan	100	5,910,000	100	5,910,000	0	0	0	0	0%	0%	100	5,910,000	100%	100.00%		

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	2	08	01	05	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)-Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8.89	1,152,243,286	0	0	2.39	165,750,245	0.8	95,919,275	33%	58%	0.8	95,919,275	9%	8.32%		
6	2	08	01	06	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	282.33	12,145,929,081	0	0	70.48	3,188,516,280	36.41	405,343,834	52%	13%	36.41	405,343,834	13%	3.34%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	2	08	01	07	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	85.95	2,082,652,612	0	0	22	865,814,955	16.5	122,280,625	75%	14%	16.5	122,280,625	19%	5.87%		
IX 2 09 PERHUBUNGAN																						
1	2	09	01	01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik	264	819,175,000	259	807,262,512	0	0	0	0	0%	0%	259	807,262,512	98%	98.55%		
2	2	09	01	02	Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ	Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik	102	672,635,000	82	646,323,200	0	0	0	0	0%	0%	82	646,323,200	80%	96.09%		
3	2	09	01	03	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar	84	3,192,595,600	70	2,423,065,422	0	0	0	0	0%	0%	70	2,423,065,422	83%	75.90%		
4	2	09	01	04	Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	10	427,702,000	8	423,408,904	0	0	0	0	0%	0%	8	423,408,904	80%	99.00%	Dinas Perhubungan	Program Tahun 2020
5	2	09	01	05	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	32	182,850,000	2	182,090,000	0	0	0	0	0%	0%	2	182,090,000	6%	99.58%		
6	2	09	01	06	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	51200	607,279,960	42365	593,382,170	0	0	0	0	0%	0%	42365	593,382,170	83%	97.71%		
7	2	09	01	07	Peningkatan Kelakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	16145	236,928,000	11310	224,822,842	0	0	0	0	0%	0%	11310	224,822,842	70%	94.89%		
8	2	09	01	08	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Persentase Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang Dalam Kondisi Baik	2017	22,231,458,000	1736	22,220,579,934	0	0	0	0	0%	0%	1736	22,220,579,934	86%	99.95%		
9	2	09	01	09	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	324	133,779,312,816	0	0	80	28,092,316,416	40	13,430,636,174	50%	48%	40	13,430,636,174	12%	10.04%	Dinas Perhubungan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
10	2	09	01	10	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	324	9,956,011,700	0	0	80	868,736,180	40	321,815,792	50%	37%	40	321,815,792	12%	3.23%		
X 2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
1	2	10	01	01	Penggunaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Layanan pengaduan masyarakat secara online yang di tindaklanjuti tepat waktu	88	512,572,000	99.53	476,029,194	0	0	0	0	0%	0%	99.53	476,029,194	113%	92.87%		
2	2	10	01	02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase pelayanan online yang bisa di akses masyarakat	84	517,617,900	148.76	471,827,769	0	0	0	0	0%	0%	148.76	471,827,769	177%	91.15%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Tahun 2020
3	2	10	01	03	Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	Persentase organisasi perangkat daerah yang menerapkan e-government	88	2,489,154,830	86.3	2,007,356,452	0	0	0	0	0%	0%	86.3	2,007,356,452	98%	80.64%		

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	2	10	01	04	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	368.44	4,507,364,004	0	0	89.44	759,809,594	106.89	200,940,610	120%	26%	106.89	200,940,610	29%	4.46%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
5	2	10	01	05	Program Aplikasi Informatika	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	382	11,099,319,225	0	0	88	2,556,437,181	93.33	317,262,456	106%	12%	93.33	317,262,456	24%	2.86%		
XI KOPERASI, USAHA KECH DAN MENENGAH																						
1	2	11	01	01	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	2	448,033,020	2	423,522,723	0	0	0	0	0%	0%	2	423,522,723	100%	94.53%		
2	2	11	01	02	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM non BPR /KLM aktif	1	60,130,000	1	60,030,000	0	0	0	0	0%	0%	1	60,030,000	100%	99.83%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Tahun 2020
3	2	11	01	03	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Persentase kelompok pedagang / usaha informal yang mendapat pembinaan	12	52,526,425	12	52,490,000	0	0	0	0	0%	0%	12	52,490,000	100%	99.93%		
4	2	11	01	04	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	4.21	54,520,200	0	0	0.57	2,760,100	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
5	2	11	01	05	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	105	271,755,320	0	0	19	55,496,802	6	15,908,000	32%	29%	6	15,908,000	6%	5.85%		
6	2	11	01	06	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	70	66,233,814	0	0	8	3,668,091	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
7	2	11	01	07	Program Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian	102	1,579,661,079	0	0	31	394,448,639	25	79,884,286	81%	20%	25	79,884,286	25%	5.06%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
8	2	11	01	08	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	53	73,579,814	0	0	10	8,823,091	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
9	2	11	01	09	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	29	477,416,000	0	0	10	16,770,000	2	2,500,000	20%	15%	2	2,500,000	7%	0.52%		
10	2	11	01	10	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	17	1,062,112,000	0	0	10	231,000,000	5	88,106,194	50%	38%	5	88,106,194	29%	8.30%		
XII PENANAMAN MODAL																						
1	2	12	01	01	Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	100	10,012,950	25	10,012,950	0	0	0	0	0%	0%	25	10,012,950	25%	100.00%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	Program Tahun 2020
2	2	12	01	02	Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perizinan	Persentase Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi Pelayanan Perizinan Teknis Daerah dan Penanaman Modal	100	142,984,200	100	116,055,000	0	0	0	0	0%	0%	100	116,055,000	100%	81.17%		
3	2	12	01	03	Kebijakan Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Penanaman Modal	100	27,900,000	133.33	26,825,000	0	0	0	0	0%	0%	133.33	26,825,000	133%	96.15%		
4	2	12	01	04	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Dilaksanakan	400	693,499,000	0	0	100	82,454,000	53.33	26,950,000	53%	33%	53.33	26,950,000	13%	3.89%		
5	2	12	01	05	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Informasi Penanaman Modal yang didapatkan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	400	169,860,000	0	0	100	22,030,000	0	600,000	0%	3%	0	600,000	0%	0.35%		
6	2	12	01	06	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	500	1,166,927,700	88.2	59,319,000	100	163,748,200	168.26	30,816,000	168%	19%	256.46	90,135,000	51%	7.72%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	2	12	01	07	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang Melakukan Investasi Penanaman Modal Sesuai SOP	500	1,260,593,199	102.5	79,738,500	100	335,499,699	15.26	3,500,000	15%	1%	117.76	83,238,500	24%	6.60%		

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8	2	12	01	08	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sistem Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi	400	216,720,350	0	0	100	68,898,810	25	1,176,000	25%	2%	25	1,176,000	6%	0.54%		
XIII																						
KEPUMUDAAN DAN OLAHRAGA																						
1	2	13	01	01	Peningkatan peran serta kepedaiaan	Jumlah pemuda yang berpartisipasi pada kegiatan kepedaiaan	5	358,809,000	5	245,315,000	0	0	0	0	0%	0%	5	245,315,000	100%	68.37%		
2	2	13	01	02	Pembinaan dan pemyarakatan olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi pada cabang olahraga	4	591,689,000	4	535,761,000	0	0	0	0	0%	0%	4	535,761,000	100%	90.55%		
3	2	13	01	03	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	1	650,850,000	1	632,870,500	0	0	0	0	0%	0%	1	632,870,500	100%	97.24%		
4	2	13	01	04	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara	2	1,322,774,800	2	1,130,730,997	0	0	0	0	0%	0%	2	1,130,730,997	100%	85.48%		
5	2	13	01	05	Program Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah wirusaha muda yang dibina	1	145,150,000	1	144,583,800	0	0	0	0	0%	0%	1	144,583,800	100%	99.61%		
6	2	13	01	06	Program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Jumlah pemuda yang diberdayakan pada kegiatan pengembangan kepedaiaan	1	98,000,000	1	97,722,000	0	0	0	0	0%	0%	1	97,722,000	100%	99.72%		
7	2	13	01	07	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepedaaian	Persentase meningkatnya Peran serta Kepedaaian	104.83	9,037,436,211	0	0	25.56	1,763,102,105	1.39	99,479,000	5%	6%	1.39	99,479,000	1%	1.10%		
8	2	13	01	08	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuruteraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10.61	19,540,604,920	0	0	2.6	3,169,662,857	2.50	746,022,495	96%	24%	2.5	746,022,495	24%	3.82%		
9	2	13	01	09	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase meningkatnya organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	61.75	415,263,629	0	0	15.23	86,924,330	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
XIV																						
STATISTIK																						
1	2	14	01	01	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website Kota Pontianak	88	436,105,000	103.57	352,010,539	0	0	0	0	0%	0%	103.57	352,010,539	118%	80.72%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Tahun 2020
2	2	14	01	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	375	2,344,668,039	0	0	90	461,510,813	60.94	214,101,070	68%	46%	60.94	214,101,070	16%	9.13%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
XV																						
PERSANDIAN																						
1	2	15	01	01	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ke amana Informasi Pemerintah Daerah	88	6,140,000	100	5,620,000	0	0	0	0	0%	0%	100	5,620,000	114%	91.53%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Tahun 2020
2	2	15	01	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Sangat Baik	932,271,270	0	0	Cukup Baik	235,365,480	0	35,554,910	0%	15%	0	35,554,910	0%	3.81%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
XVI																						
KEBUDAYAAN																						
1	2	16	01	01	Pengelolaan Kekayaan Budaya		100	131,050,000	100	130,250,000	0	0	0	0	0%	0%	100	130,250,000	100%	99.39%		
2	2	16	01	02	Pengelolaan keragaman budaya		100	401,462,000	100	400,581,000	0	0	0	0	0%	0%	100	400,581,000	100%	99.78%		
3	2	16	01	03	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		100	210,400,000	100	209,880,000	0	0	0	0	0%	0%	100	209,880,000	100%	99.75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Tahun 2020

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	2	16	01	04	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang dikelola dan diletakkan	400	8.884.411,863	0	0	100	2.222.201,626	25,78	366,623,750	26%	16%	25,78	366,623,750	6%	4,13%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
5	2	16	01	05	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	400	275,653,912	0	0	100	68,398,775	100	68,359,597	100%	100%	100	68,359,597	25%	24,80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
6	2	16	01	06	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayangan keragaman)	400	547,917,703	0	0	100	135,956,350	0	0	0%	0%	0	0	0%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	2	16	01	07	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	400	482,092,718	0	0	100	101,935,316	100	68,991,316	100%	68%	100	68,991,316	25%	14,31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
8	2	16	01	08	Program Pengelolaan Permusuman	Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	400	806,020,025	0	0	100	200,000,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
XVII	2	17			PERPUSTAKAAN																	
1	2	17	01	01	Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	100	598,380,325	99,98	598,245,025	0	0	0	0	0%	0%	99,98	598,245,025	100%	99,98%	Dinas Perpustakaan	Program Tahun 2020
2	2	17	01	02	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	100	121,678,000	99	120,777,300	0	0	0	0	0%	0%	99	120,777,300	99%	99,26%	Dinas Perpustakaan	Program Tahun 2020
3	2	17	01	03	Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	200	3,474,911,413	0	0	50	522,212,738	35,5	422,292,905	71%	81%	35,5	422,292,905	18%	12,15%	Dinas Perpustakaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
XVIII	2	18			KEARSIPAN																	
1	2	18	01	01	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	100	3,250,000	100	3,250,000	0	0	0	0	0%	0%	100	3,250,000	100%	100,00%	Dinas Perpustakaan	Program Tahun 2020
2	2	18	01	02	Penelhaaran Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah arsip yang diselamatkan	5,481	105,571,000	5,481	105,571,000	0	0	0	0	0%	0%	5,481	105,571,000	100%	100,00%	Dinas Perpustakaan	Program Tahun 2020
3	2	18	01	03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	100	3,980,000	100	3,980,000	0	0	0	0	0%	0%	100	3,980,000	100%	100,00%	Dinas Perpustakaan	Program Tahun 2020
4	2	18	01	04	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Lamanya rata - rata waktu Penemuan kembali Arsip (Retrieval)	100	13,400,000	96	12,953,500	0	0	0	0	0%	0%	96	12,953,500	96%	96,67%	Dinas Perpustakaan	Program Tahun 2020
5	2	18	01	05	Program Pengelolaan Arsip	Indeks kearsipan	Baik	996,019,090	0	0	Baik	107,849,800	0	21,295,000	0%	20%	0	21,295,000	0%	2,14%	Dinas Perpustakaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
6	2	18	01	06	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Daftar Arsip Statis	260	32,743,200	0	0	65	4,480,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0,00%	Dinas Perpustakaan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)

7	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
C																						
1																						
1 3 01																						
1 3 01 01 01																						
1	3	01	01	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi perikanan tangkap (Ton)	820	689,673,950	541.24	633,682,000	0	0	0	0	0%	0%	541.24	633,682,000	66%	91.88%		
2	3	01	01	02	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5	156,819,000	10.09	152,476,500	0	0	0	0	0%	0%	10.09	152,476,500	202%	97.23%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program Tahun 2020
3	3	01	01	03	Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal	Peningkatan Jumlah Produksi Benih yang dihasilkan Balai Benih Ikan Lokal	5	558,269,000	62	418,970,482	0	0	0	0	0%	0%	62	418,970,482	1240%	75.05%		
4	3	01	01	04	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	400	1,179,084,575	0	0	100	72,377,784	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
5	3	01	01	05	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	184.85	4,229,635,759	0	0	25	127,713,493	7.5	13,667,185	30%	11%	7.5	13,667,185	4%	0.32%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
6	3	01	01	06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	349.04	399,291,172	0	0	80	47,001,380	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
II																						
II 3 02																						
II 3 02 01																						
II 3 02 01 01																						
1	3	02	01	01	Pengembangan destinasi pariwisata		3	1,039,698,300	3	719,975,550	0	0	0	0	0%	0%	3	719,975,550	100%	69.25%		
2	3	02	01	02	Pengembangan kemitraan pariwisata		2	1,326,768,000	2	780,951,407	0	0	0	0	0%	0%	2	780,951,407	100%	58.86%		
3	3	02	01	03	Pengembangan pemasaran pariwisata	Bahan pengajuan dan pembahasan perda tentang kepariwisataan	3	126,581,181	3	98,325,000	0	0	0	0	0%	0%	3	98,325,000	100%	77.68%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Tahun 2020
4	3	02	01	04	Revitalisasi Destinasi Wisata		1	27,560,000	1	27,560,000	0	0	0	0	0%	0%	1	27,560,000	100%	100.00%		
6	3	02	01	06	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya		13	112,760,000	13	112,080,000	0	0	0	0	0%	0%	13	112,080,000	100%	99.40%		
7	3	02	01	07	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		1	68,111,000	1	65,459,000	0	0	0	0	0%	0%	1	65,459,000	100%	96.11%		
8	3	02	01	08	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	13.71	5,743,289,116	0	3.42	241,471,260	2.50	150,004,300	73%	62%	2.50	150,004,300	18%	2.61%			
9	3	02	01	09	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata	13.71	3,154,059,157	0	3.42	464,320,000	2.50	167,630,200	73%	36%	2.5	167,630,200	18%	5.31%			
10	3	02	01	10	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	15.77	8,312,715,510	0	5.42	506,130,960	1.10	36,450,000	20%	7%	1.1	36,450,000	7%	0.44%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)	
11	3	02	01	11	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	5.60	455,640,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
III																						
III 3 03																						
III 3 03 01																						
1	3	03	01	01	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Pangan	Peningkatan Persentase Luas Lahan yang ditanami dengan benih yang bersertiikat (Ha)	0.3	1,058,537,000	0.5	1,044,658,500	0	0	0	0	0%	0%	0.5	1,044,658,500	167%	98.69%		
2	3	03	01	02	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Jenis Sarana dan Prasarana yang Tersedia	96	313,931,000	95	311,465,000	0	0	0	0	0%	0%	95	311,465,000	99%	99.21%		
3	3	03	01	03	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Peningkatan Persentase Luas Panen Komoditas	100	723,095,000	112.02	691,162,254	0	0	0	0	0%	0%	112.02	691,162,254	112%	95.58%		
4	3	03	01	04	Program pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan Indeks Kepuasan pengunjung di UPTD Agribisnis	93	976,117,000	94.45	968,174,586	0	0	0	0	0%	0%	94.45	968,174,586	102%	99.19%		
5	3	03	01	05	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Persentase Pengetahuan Peternak dan Pelaku usaha	5	14,725,000	5	14,710,000	0	0	0	0	0%	0%	5	14,710,000	100%	99.90%		

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6	3	03	01	06	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Peningkatan Pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK)	50	438,331,000	50	434,458,200	0	0	0	0	0%	0%	50	434,458,200	100%	99.12%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program Tahun 2020
7	3	03	01	07	Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Keamanan Produk Hewan	0	82,020,200	0	82,020,200	0	0	0	0	0%	0%	0	82,020,200	100%	100.00%		
8	3	03	01	08	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Penyakit Menular Ternak (orang)	5	433,151,000	5	432,138,298	0	0	0	0	0%	0%	5	432,138,298	100%	99.77%		
9	3	03	01	09	Penjaminan Mutu Pangan Asal hewan	Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi	5343	645,361,000	3667	637,761,554	0	0	0	0	0%	0%	3667	637,761,554	69%	98.82%		
10	3	03	01	10	Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan petani	Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas- Kelas Lanjut- Kelas Madya- Kelas Utama	4	113,828,000	4	112,203,000	0	0	0	0	0%	0%	4	112,203,000	100%	98.57%		
11	3	03	01	11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	1.35	8,205,427,729	0	0	0.32	1,868,005,257	0.15	488,652,163	47%	26%	0.15	488,652,163	11%	5.96%		
12	3	03	01	12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	160	3,636,675,035	0	0	20	263,429,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
13	3	03	01	13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	124.3	6,061,461,623	0	0	28.3	2,183,551,616	11.58	346,041,303	41%	16%	11.58	346,041,303	9%	5.71%		
14	3	03	01	14	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	250	1,321,813,594	0	0	25	299,416,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
IV	3	04			PERDAGANGAN																	
1	3	04	01	01	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100	38,808,900	100	38,803,500	0	0	0	0	0%	0%	100	38,803,500	100%	99.99%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Tahun 2020
2	3	04	01	02	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2292	2,268,275,750	2264	2,261,287,378	0	0	0	0	0%	0%	2264	2,261,287,378	99%	99.69%		
3	3	04	01	03	Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5.88	3,710,458,100	5.88	3,563,920,192	0	0	0	0	0%	0%	5.88	3,563,920,192	100%	96.05%		
4	3	04	01	04	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina	4	1,331,500	4	1,331,500	0	0	0	0	0%	0%	4	1,331,500	100%	100.00%		
5	3	04	01	05	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	400	485,663,890	0	0	100	75,019,752	50	1,200,000	50%	2%	50	1,200,000	13%	0.25%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
6	3	04	01	06	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tinggalan	141.17	10,147,789,750	0	0	11.76	2,328,693,140	9	819,468,450	77%	35%	9	819,468,450	6%	8.08%		
7	3	04	01	07	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	367	741,900,050	0	0	83	75,788,450	62.5	41,938,674	75%	55%	62.5	41,938,674	17%	5.65%		
8	3	04	01	08	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	128	642,334,311	0	0	39	32,674,769	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
9	3	04	01	09	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	391	1,601,584,330	0	0	97	360,323,690	25	169,091,404	26%	47%	25	169,091,404	6%	10.56%		

7	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
10	3	04	01	10	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	400	217,100,100	0	0	100	9,350,100	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		

7	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
	1	2	3			4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13							
V	3	05	01	PERINDUSTRIAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	05	01	01	Pengembangan IKM dan industri kreatif	Persentase cakupan bina kelompok pengrajin	1	44,184,000	1	44,184,000	0	0	0	0	0%	0%	1	44,184,000	100%	100.00%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Tahun 2020
2	3	05	01	02	Pengembangan industri logam mesin elektronika dan suku	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan	1	500,000	1	500,000	0	0	0	0	0%	0%	1	500,000	100%	100.00%		
3	3	05	01	03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPMP	400	2,260,849,240	0	0	100	405,636,882	50	64,175,200	50%	16%	50	64,175,200	13%	2.84%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
4	3	05	01	04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	10.17	57,908,600	0	0	2.47	3,201,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
5	3	05	01	05	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	4	287,561,000	0	0	1	6,439,600	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
D	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
I	4	01			SEKRETARIAT DAERAH																	
1	4	01	01	01	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja-Nilai LPPD	65	377,846,565	65	333,425,665	0	0	0	0	0%	0%	65	333,425,665	100%	88.24%		
2	4	01	01	02	Peningkatan Pelayanan Prima	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM A	5	116,599,950	5	114,769,950	0	0	0	0	0%	0%	5	114,769,950	100%	98.43%		
3	4	01	01	03	Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Raihman	Persentase produk hukum yang efektif di masyarakat	21	139,950,000	21	116,525,250	0	0	0	0	0%	0%	21	116,525,250	100%	83.26%		
4	4	01	01	04	Pembinaan dan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	1,007	283,733,400	1,007	248,384,200	0	0	0	0	0%	0%	1007	248,384,200	100%	87.54%		
5	4	01	01	05	Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang difasilitasi	196	467,319,950	196	445,591,950	0	0	0	0	0%	0%	196	445,591,950	100%	95.35%		
6	4	01	01	06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan	Persentase peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	25	1,022,051,000	25	1,016,758,900	0	0	0	0	0%	0%	25	1,016,758,900	100%	99.48%		
7	4	01	01	07	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa yang sesuai aturan perundangan	4	94,899,000	4	92,996,300	0	0	0	0	0%	0%	4	92,996,300	100%	98.00%		
8	4	01	01	08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan	Persentase kegiatan kepala daerah yang diinformasikan kepada masyarakat	95	1,218,795,360	95	999,635,285	0	0	0	0	0%	0%	95	999,635,285	100%	82.02%	Sekretariat Daerah	Program Tahun 2020
9	4	01	01	09	Kejasama Informasi dengan Mass Media	Persentase rata-rata penyebaran informasi kegiatan kepala daerah	1,941	1,468,352,540	1,941	1,436,649,500	0	0	0	0	0%	0%	1,941	1,436,649,500	100%	97.84%		
10	4	01	01	10	Pembinaan Perkonomian dan BUMD	Persentase BUMD yang berkategori sehat	14	339,222,820	14	316,176,400	0	0	0	0	0%	0%	14	316,176,400	100%	93.21%		
11	4	01	01	11	Kegiatan Kinerja Pemerintahan	Persentase kegiatan peringatan dan upacara yang dilaksanakan	13	697,641,810	13	550,592,810	0	0	0	0	0%	0%	13	550,592,810	100%	78.92%		
12	4	01	01	12	Intensifikasi Pelayanan Masyarakat	Persentase bantuan masyarakat yang tersalurkan	3575	6,409,206,770	3575	6,330,619,700	0	0	0	0	0%	0%	3575	6,330,619,700	100%	98.77%		
13	4	01	01	13	Pelayanan Ibadah Haji	Persentase pelayanan ibadah haji yang dipenuhi	1,310	174,390,000	1,310	27,438,500	0	0	0	0	0%	0%	1,310	27,438,500	100%	15.73%		
14	4	01	01	14	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan APEKSI dan Muskomwil yang diikuti	18	203,759,200	18	166,477,710	0	0	0	0	0%	0%	18	166,477,710	100%	81.70%		
15	4	01	01	15	Peningkatan Kinerja Kelembagaan	Persentase peningkatan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	35	361,381,080	35	288,362,100	0	0	0	0	0%	0%	35	288,362,100	100%	79.79%		

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16	4	01	01	16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	Persentase layanan keprotokolian yang difasilitasi	160	288,735,690	160	255,882,290	0	0	0	0	0%	0%	160	255,882,290	100%	88.62%	Sekretariat Daerah	Program Tahun 2020
17	4	01	01	17	Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama	Persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	610	1,048,610,000	610	1,039,164,050	0	0	0	0	0%	0%	610	1,039,164,050	100%	99.10%		
18	4	01	01	18	Pengembangan Promosi Daerah	Persentase peningkatan kemampuan bersaing UMKM yang dipromosikan	15	25,247,500	15	4,175,000	0	0	0	0	0%	0%	15	4,175,000	100%	16.54%		
19	4	01	01	19	Penatan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah	755	257,947,200	755	217,511,800	0	0	0	0	0%	0%	755	217,511,800	100%	84.32%		
20	4	01	01	20	Program peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase kesesuaian target dengan realisasi anggaran	42	686,366,755	42	641,861,205	0	0	0	0	0%	0%	42	641,861,205	100%	93.52%		
21	4	01	01	21	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal	3	304,349,200	3	268,825,300	0	0	0	0	0%	0%	3	268,825,300	100%	88.33%		
22	4	01	01	22	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah-Persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi-Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	362.32	51,985,587,296	0	0	90.58	11,833,695,452	89.26	8,702,900,425	99%	74%	89.26	8,702,900,425	25%	16.74%	Sekretariat Daerah	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
23	4	01	01	23	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi-Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	400	18,908,104,942	0	0	100	4,207,107,576	66.65	730,360,794	67%	17%	t	730,360,794	#VALUE!	3.86%		
II				4	02	SEKRETARIAT DPRD																
1	4	02	01	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan jadwal bannus-Persentase pengaduan /aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	100	8,176,280,800	100	7,977,703,775	0	0	0	0	0%	0%	100	7,977,703,775	100%	97.57%	Sekretariat DPRD	Program Tahun 2020
2	4	02	01	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD-Persentase fasilitasi kehumasan, protokolier, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	400	59,468,700,885	0	0	100	8,091,830,510	22.53	5,067,713,712	23%	63%	22.53	5,067,713,712	6%	8.52%	Sekretariat DPRD	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)

7	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
	1	2	3			4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
PERENCANAAN																						
1	5	01	01	01	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	990,296,880	100	977,866,280	0	0	0	0%	0%	100	977,866,280	100%	98.74%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Tahun 2020	
2	5	01	01	02	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Perangkat Daerah Sektor Pembangunan Ekonomi yang terbina perencanaannya	100	404,626,200	100	381,851,900	0	0	0	0%	0%	100	381,851,900	100%	94.37%			
3	5	01	01	03	Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Perangkat Daerah Sektor Sosial Budaya yang terbina perencanaannya	100	174,700,000	100	168,677,150	0	0	0	0%	0%	100	168,677,150	100%	96.55%			
4	5	01	01	04	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Perangkat Daerah sektor Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang terbina perencanaannya	100	1,300,299,600	100	1,192,751,400	0	0	0	0%	0%	100	1,192,751,400	100%	91.73%			
5	5	01	01	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100	381,469,400	100	373,492,000	0	0	0	0%	0%	100	373,492,000	100%	97.91%			
6	5	01	01	06	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan Daerah	400	8,677,104,839	0	0	100	1,799,255,201	66.67	664,236,800	67%	37%	66.67	664,236,800	17%	7.66%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	5	01	01	07	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi program RKPD Perangkat Daerah ke dalam APBD	400	6,669,912,554	0	0	100	1,366,726,455	41.67	174,515,000	41.7%	13%	41.67	174,515,000	10%	2.62%		
KEUANGAN																						
1	5	02	01	01	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan aset daerah	100	2,269,106,000	100	1,875,082,350	0	0	0	0%	0%	100	1,875,082,350	100%	82.64%	Badan Keuangan Daerah	Program Tahun 2020	
2	5	02	01	02	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	Tingkat pemenuhan ketepatan waktu penetapan APBD	100	3,721,755,977	83.33	2,147,955,250	0	0	0	0%	0%	83.33	2,147,955,250	83%	57.71%			
3	5	02	01	03	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi permukaan kekayaan daerah	Baik	249,195,000	Baik	244,833,883	0	0	0	0%	0%	Baik	244,833,883	Baik	98.25%			
4	5	02	01	04	Program Peningkatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan Pendapatan Asli Daerah	Persentase jumlah wajib pajak terdaftar yang membayar pajak	70	770,460,100	44	742,971,275	0	0	0	0%	0%	44	742,971,275	63%	96.43%			
5	5	02	01	05	Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan secara realtime	100	943,397,000	96.67	785,298,435	0	0	0	0%	0%	96.67	785,298,435	97%	83.24%			
6	5	02	01	06	Program Penataan dan Pengembangan Data Base Pendapatan Asli Daerah	Persentase data pajak daerah yang dimutakhirkan	60	1,447,860,000	79.29	1,269,740,607	0	0	0	0%	0%	79.29	1,269,740,607	132%	87.70%			
7	5	02	01	07	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase tersedianya dokumen perbendaharaan	100	296,526,820	98.62	294,129,820	0	0	0	0%	0%	98.62	294,129,820	99%	99.19%			
8	5	02	01	08	Program Pemanfaatan Ekonomis Aset Daerah	Persentase tercapainya target pemenuhan dari pemanfaatan ekonomis aset daerah	100	1,105,264,000	94	677,096,454	0	0	0	0%	0%	94	677,096,454	94%	61.26%			

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9	5	02	01	09	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	400	97,526,892,725	0	0	100	66,469,631,029	42.71	15,815,288,469	43%	24%	42.71	15,815,288,469	11%	16.22%	Badan Keuangan Daerah	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
10	5	02	01	10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	400	25,303,017,693	0	0	100	7,983,285,893	12.65	1,588,833,845	13%	20%	12.65	1,588,833,845	3%	6.28%		
11	5	02	01	11	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/retribusi yang diselesaikan tepat waktu	343.33	15,349,737,699	0	0	83.33	3,644,005,162	55.91	181,935,200	67%	5%	55.91	181,935,200	16%	1.19%		
III					KEPEGAWAIAN																	
1	5	03	01	01	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Informasi/ Data Kepegawaian Yang Akurat dan Up to Date	100	18,500,000	158.61	17,200,000	0	0	0	0	0%	0%	158.61	17,200,000	159%	92.97%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Tahun 2020
2	5	03	01	02	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang Berkualitas sesuai Formasi	100	832,370,730	99	538,768,230	0	0	0	0	0%	0%	99	538,768,230	99%	64.73%		
3	5	03	01	03	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas (Cepat, Tepat dan Akurat)	100	124,785,681	94.12	122,728,681	0	0	0	0	0%	0%	94.12	122,728,681	94%	98.35%		
4	5	03	01	04	Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil	Persentase Penempatan Pejabat Administrasi/ Pejabat Fungsional Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan	100	583,915,400	123.57	508,483,400	0	0	0	0	0%	0%	123.57	508,483,400	124%	87.08%		
5	5	03	01	05	Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	100	424,922,213	77.57	420,588,861	0	0	0	0	0%	0%	77.57	420,588,861	78%	98.98%		
6	5	03	01	06	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Yang Terealisasi Tepat Waktu	100	349,621,000	121.80	347,777,580	0	0	0	0	0%	0%	121.80	347,777,580	122%	99.47%		
7	5	03	01	07	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	335	26,990,325,703	0	0	80	4,323,894,083	32.75	768,095,090	41%	18%	32.75	768,095,090	10%	2.85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
IV					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
1	5	04	01	01	Pendidikan Kedinasan	Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Lulus Diklat	100	258,697,000	114.23	218,927,000	0	0	0	0	0%	0%	114.23	218,927,000	114%	84.63%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Tahun 2020
2	5	04	01	02	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	1,217,372,448	96.75	851,684,198	0	0	0	0	0%	0%	96.75	851,684,198	97%	69.96%		
3	5	04	01	03	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	340	10,251,224,315	0	0	80	4,235,392,807	25.85	749,498,500	32%	18%	25.85	749,498,500	8%	7.31%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)

7	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				5	6	6	7	8	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
V	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
1	5	05	01	01	Pengkajian dan Penelitian Terapan	Persentase kesesuaian capaian kinerja Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan	100	890,820,300	100	881,676,700	0	0	0	0	0%	0%	100	881,676,700	100%	98.97%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Tahun 2020
2	5	05	01	02	Program Penelitian dan pengembangan daerah	Prosentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah	279	6,026,550,408	0	0	60	1,224,467,060	63.57	371,788,900	106%	30%	63.57	371,788,900	23%	6.17%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
F	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
I	6	01	PENGAWASAN																			
1	6	01	01	01	Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	700,000	100	700,000	0	0	0	0	0%	0%	100	700,000	100%	100.00%		
2	6	01	01	02	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase OPD yang memperoleh predikat A atau kategori "Memuaskan" atas penilaian SAKIP	3	700,000	3	700,000	0	0	0	0	0%	0%	3	700,000	100%	100.00%		
						Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada tingkat maturitas Level 3 atau "Terdefinisi"	Score Maturitas SPIP 3,2	852,750	Score Maturitas SPIP 3,2	852,750	0	0	0	0	0%	0%	Score Maturitas SPIP 3,2	852,750	Score Maturitas SPIP 3,2	100.00%	Inspektorat	Program Tahun 2020
3	6	01	01	03	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD bebas dari penyimpangan keuangan dan aset yang material	80	189,357,500	79.19	189,208,500	0	0	0	0	0%	0%	79.19	189,208,500	99%	99.92%		
4	6	01	01	04	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP Kota Pontianak	Kapabilitas APIP Level 3	277,788,438	Kapabilitas APIP Level 3	243,346,151	0	0	0	0	0%	0%	Kapabilitas APIP Level 3	243,346,151	Kapabilitas APIP Level 3	87.60%		
5	6	01	01	05	Program Pengakuan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	Penilaian internal Zona Inte	10	308,190,000	10	273,619,000	0	0	0	0	0%	0%	10	273,619,000	100%	88.78%		
6	6	01	01	06	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase kategori hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah dengan score 3,5 pada obrik binan lrbn	323.33	1,539,186,200	0	0	67	123,536,200	16.75	20,095,000	25%	16%	16.75	20,095,000	5%	1.31%		
7	6	01	01	07	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	400	7,326,555,600	0	0	100	833,696,000	25	320,260,013	25%	38%	25	320,260,013	6%	4.37%	Inspektorat	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
G	7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
I	7	01	KECAMATAN																			
1	7	01	01	01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	93.17	9,833,900,000	93.79	9,167,657,506	0	0	0	0	0%	0%	93.79	9,167,657,506	101%	93.23%		
2	7	01	01	02	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	94	734,788,300	94	733,437,950	0	0	0	0	0%	0%	94	733,437,950	100%	99.82%		
3	7	01	01	03	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	93.17	1,545,485,219	94.84	1,499,001,295	0	0	0	0	0%	0%	94.84	1,499,001,295	102%	96.99%	Kecamatan	Program Tahun 2020
4	7	01	01	04	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	85.83	2,668,407,674	87.54	2,604,952,556	0	0	0	0	0%	0%	87.54	2,604,952,556	102%	97.62%		
5	7	01	01	05	Pembinaan lembaga masyarakat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	93.17	855,217,500	94.88	832,636,097	0	0	0	0	0%	0%	94.88	832,636,097	102%	97.36%		

7	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang divaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divaluasi (s/d Trwulan II TA. 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6	7	01	01	06	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	368.67	4,081,030,241	0	0	88.33	857,557,626	61.12	382,006,375	69%	45%	61.12	382,006,375	17%	9.36%	Kecamatan	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
7	7	01	01	07	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	366.17	43,751,290,930	0	0	87.5	6,937,910,416	49.72	1,328,413,507	57%	19%	49.72	1,328,413,507	14%	3.04%		
8	7	01	01	08	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Koordinasi Gangguan Tramitibus yang dapat diselesaikan	368.67	5,061,965,380	0	0	88.33	2,226,844,092	46.75	805,093,154	53%	36%	46.75	805,093,154	13%	15.90%		
9	7	01	01	09	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	368.67	14,192,100,213	0	0	88.33	2,985,666,815	31.92	558,525,162	36%	19%	31.92	558,525,162	9%	3.94%		
H 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																						
I 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																						
1	8	01	01	01	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik yang dapat ditangani	100	296,200,000	100	293,774,600	0	0	0	0	0%	0%	100	293,774,600	100%	99.18%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	Program Tahun 2020
2	8	01	01	02	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	100	478,650,000	100	477,929,100	0	0	0	0	0%	0%	100	477,929,100	100%	99.85%		
3	8	01	01	03	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara	400	1,034,707,830	0	0	100	2,986,852,100	50	179,907,350	50%	6%	50	179,907,350	13%	17.39%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	Program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 (Program Tahun 2021)
4	8	01	01	04	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendidikan politik	320	68,038,363,953	0	0	80	3,381,875,512	40	3,367,210,512	50%	100%	40	3,367,210,512	13%	4.95%		
5	8	01	01	05	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak	320	53,500,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
6	8	01	01	06	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta pebentukan kader P4GN	320	954,712,207	0	0	80	32,249,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%		
7	8	01	01	07	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani	400	3,163,530,000	0	0	100	805,065,000	50	519,540,000	50%	65%	50	519,540,000	13%	16.42%		

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI NASIONAL DAN PROVINSI

Asumsi Dasar Ekonomi Nasional Tahun 2021

Indonesia dalam Visi 2045 ditargetkan the keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,9% per tahun.

Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam pada tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5-5,55% pada tahun 2021. Kondisi makro yang menguat

dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2-9,7% dan 7,7-9,1%, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377-0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78-72,95 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.1.
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

INDIKATOR	RPJMN	Revisi Sasaran
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 5,7	4,5 - 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,0	7,7 - 9,1
Tingkat Kemiskinan (%)	8,0 – 8,5	9,2 - 9,7
Rasio Gini	0,375 – 0,379	0,377 - 0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,26	72,78 - 72,95

Sumber : Bappenas, 2021

Ekonomi Nasional Triwulan I Tahun 2021

Perekonomian global pada tahun 2021 diperkirakan akan mengalami pemulihan dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia di penghujung tahun 2019. Pemulihan tersebut terutama didorong oleh perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan negara lainnya. Di AS, perbaikan ekonomi diperkirakan semakin kuat, sejalan dengan proses vaksinasi yang berjalan lancar dan tambahan stimulus fiskal yang lebih besar. Di Tiongkok, pemulihan ekonomi yang lebih tinggi ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan global. Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi terkonfirmasi oleh perkembangan sejumlah indikator pada Maret 2021 diantaranya *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel di beberapa negara yang terus meningkat.

Seiring dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat, sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang yang lebih tinggi, termasuk Indonesia. Perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung didukung membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal. Kinerja ekspor diperkirakan akan terus membaik terutama didorong oleh komoditas CPO, bijih logam, *pulp and waste paper*, serta kendaraan bermotor dan besi baja. Peningkatan ekspor tersebut didorong adanya kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok. Stimulus fiskal Pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, belanja barang dan belanja modal juga terus

mengalami peningkatan. Perbaikan konsumsi swasta tercermin pada indikator ekspektasi konsumen dan penjualan eceran sampai dengan bulan Maret 2021 cenderung terbatas. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya mobilitas masyarakat di tengah upaya pemerintah yang terus melakukan akselerasi program vaksinasi nasional.

Laju inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,08% (mtm) atau 1,37% (yoy). Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga. Inflasi kelompok *volatile food* tetap terkendali meski meningkat seiring faktor cuaca. Inflasi kelompok *administered prices* juga tetap rendah sejalan dengan tidak ada penyesuaian baik tarif jalan tol maupun angkutan udara. Inflasi pada tahun 2021 diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran $3,0\% \pm 1\%$.

Jumlah Angkatan Kerja pada Februari 2021 berjumlah 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibanding dengan Agustus 2020. Seiring terjadinya kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,31% poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan 0,81% poin dibandingkan dengan Agustus 2020 menjadi 6,26%. Jumlah Penduduk yang Bekerja mengalami peningkatan sebanyak 2,61 juta orang menjadi 131,06 juta orang. Dimana lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,34% poin). Sedangkan sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan (0,30% poin).

Asumsi Dasar Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2021 dapat dilihat dari proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 berkisar antara 4,51-5,25%. Namun bila keadaan semakin daurat dan berlangsung lama pertumbuhan ekonomi dapat berkontraksi hingga dibawah 0 atau minus. Dari 17 sektor PDRB hanya Sektor Informasi dan Komunikasi dan Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya yang tumbuh secara signifikan, sedangkan 15 sektor lainnya diproyeksi mengalami penurunan produktifitasnya. Sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan serta Perdagangan diperkirakan akan tumbuh melambat disebabkan imbas dari turunnya ekspor hasil produksi, dan turunnya impor bahan baku. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga ikut berperan dalam keseimbangan neraca perdagangan. Adanya kebijakan

karantina atau lockdown dari banyak Negara dan kekhawatiran masyarakat di Indonesia akan menyebabkan wisman dan wisdom turun drastis sehingga sektor yang terkait jasa pariwisata menurun sangat tajam. Demikian halnya sektor Transportasi yang mengalami penurunan intensitas, baik darat laut maupun udara. Hanya ada 2 sektor yang akan sangat signifikan naik pertumbuhannya yakni sektor Informasi dan Komunikasi bisa tumbuh 50% dari tahun sebelumnya karena kebijakan *Work From Home* (WFH) yang banyak menggunakan berbagai media informasi dan internet untuk masyarakat beraktivitas, dan sektor Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial karena begitu intensifnya aktivitas di bidang kesehatan dan sosial dalam penanganan Covid-19.

Pada sisi Pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami penurunan seiring dengan turunnya konsumsi LNPRT terkait kenaikan harga barang dan inflasi. Demikian pula dengan ekspor dan impor barang dan jasa.

Ekonomi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2021

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan I tahun 2021 bila dibandingkan dengan kondisi pada triwulan I tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,10% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan I tahun 2020 hanya terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), yaitu sebesar 5,25% dan 0,89%. Sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi. Kontraksi paling dalam terjadi pada Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 40,37% diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PK-PMTB) yang terkontraksi sebesar 2,56%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) terkontraksi sebesar 1,50%, dan Komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) terkontraksi sebesar 0,34%. Sedangkan dari triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya (q to q) mengalami kontraksi sebesar 0,11%. Pertumbuhan terjadi fluktuatif di seluruh komponen PDRB Pengeluaran. Kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen PK-P dan diikuti oleh komponen PMTB yang terkonstraksi masing-masing sebesar 23,97% dan 8,30%.

Sementara dari sisi penawaran dari triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan I tahun 2020 (yoy) terkontraksi sebesar 0,10%. Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang masih tumbuh positif seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial; Pengadaan air; dan Informasi dan Komunikasi yang masing-masing tumbuh 61,44%, 5,55% dan 5,51%. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya (q to q) mengalami kontraksi sebesar

0,11%. Penurunan terjadi di hampir semua kategori, hanya beberapa kategori lapangan usaha yang masih menunjukkan pertumbuhan positif diantaranya Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan sebesar 16,74%. Hal ini disinyalir karena faktor musiman, dimana pada triwulan I merupakan masa panen raya komoditas tanaman bahan makanan dan hortikultura.

Pada bulan Maret 2021 Kalimantan Barat mengalami deflasi sebesar 0,16% (Maret 2021 terhadap Februari 2021), dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2021 terhadap Maret 2020) sebesar 1,02%. Deflasi ini terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pada empat kelompok pengeluaran meliputi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (0,31%), Kelompok Transportasi (0,30%), Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,28%), dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (0,01%). Empat kelompok pengeluaran mengalami peningkatan indeks yakni Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (0,25%), Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (0,12%), Kelompok Kesehatan (0,08%), dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,02%). Sedangkan tiga kelompok pengeluaran sisanya tidak mengalami perubahan indeks yaitu Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; dan Kelompok Pendidikan.

Kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Barat pada Februari 2021 mengalami perbaikan dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2020. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 mengalami kenaikan sebanyak 78,53 ribu orang menjadi 2,69 juta orang. Seiring dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 1,54% poin. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan 0,08% menjadi 5,73% dan Penduduk yang Bekerja meningkat sebanyak 76,10 ribu orang menjadi 2,53 juta orang. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa akomodasi (1,76% poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,33% poin). Pandemi Covid-19 yang melanda dunia memberikan dampak pada 183,60 ribu orang (4,81% penduduk usia kerja) di Kalimantan Barat. Angka tersebut terdiri dari Pengangguran karena Covid-19 (26,84 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 7,22 ribu orang), Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 (7,44 ribu orang), dan Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19 (142,09 ribu orang).

3.2. KERANGKA EKONOMI DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 diperlukan guna merespon dan mengadaptasi perubahan asumsi yang diakibatkan oleh berbagai perkembangan yang terjadi. Secara umum perkembangan perekonomian Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari perekonomian global, nasional maupun regional yang secara langsung maupun tidak langsung kondisi tersebut berimplikasi terhadap kemampuan keuangan daerah.

Tahun 2021, pemulihan ekonomi Kota Pontianak yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 diperkirakan akan terus berlanjut dengan didukung kebijakan dan program pemulihan ekonomi yang diperkuat. Pelaksanaan vaksinasi yang sudah mulai berjalan akan terus diakselerasi pelaksanaannya sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi. Hal ini diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal. Program-program dan stimulus terus diberikan sebagai upaya mendorong konsumsi rumah tangga. Melalui upaya tersebut perekonomian Kota Pontianak diharapkan mencapai pertumbuhan positif pada tahun 2021. Namun demikian, resiko ketidakpastian yang ditimbulkan dari dampak pandemi Covid-19 masih tetap membayangi dan perlu diantisipasi. Masih tingginya resiko penyebaran virus Covid-19 menyebabkan Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan beberapa penyesuaian terhadap asumsi dasar ekonomi makro tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya.

Pada APBD Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak diprediksi sebesar 4,9-5,1% (yoy), namun masih tingginya ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19, diperkirakan perekonomian Kota Pontianak masih akan mengalami tekanan dengan laju pertumbuhan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yakni berkisar 4,00-4,50% saja. Selaras dengan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi secara umum diperkirakan juga masih mengalami tekanan sepanjang tahun 2021. Laju inflasi akan sedikit mengalami peningkatan pada triwulan II seiring dengan berlangsungnya hari besar keagamaan, bulan puasa dan Idul Fitri, yang berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat. Namun secara umum laju inflasi diharapkan dapat bergerak pada kisaran sasaran inflasi, yaitu sebesar $3,0 \pm 1\%$. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2020 mengalami lonjakan drastis menjadi 12,36% sebagai dampak merebaknya Covid-19, pada tahun 2021 diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan seiring dengan mulai adanya relaksasi aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan relaksasi terhadap aktivitas perekonomian, sosial dan kemasyarakatan diberlakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga masyarakat tetap dapat melaksanakan kegiatannya namun juga tetap mampu memproteksi diri dari ancaman wabah ini. Dengan mulai menggeliatnya aktivitas perekonomian diharapkan pada tahun 2021 Pengangguran dapat dikurangi menjadi 11%.

Bila tingkat pengangguran diperkirakan mengalami penurunan pada tahun 2021, tidak demikian halnya dengan angka kemiskinan yang diperkirakan justru akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Diindikasikan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap tingkat kemiskinan baru akan terlihat pada tahun 2021, mengingat data kemiskinan pada tahun 2020 merupakan data yang dirilis pada bulan Maret 2020 dimana pada bulan tersebut Covid-19 baru mulai menyebar ke Kota Pontianak sehingga belum tampak imbasnya terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pontianak. Angka kemiskinan diperkirakan akan terkoreksi menjadi 5,00% dari perkiraan sebelumnya yang hanya 4,80%. Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui indeks gini akan tetap dijaga pada angka 0,34.

Kualitas pembangunan manusia Kota Pontianak yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 ditargetkan akan kembali mengalami peningkatan menjadi 79,50. Kendatipun pada tahun 2020 komponen Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagai dampak pandemi Covid-19, namun kenaikan komponen-komponen pembentuk IPM lainnya mampu mengimbangi sehingga total keseluruhan IPM Kota Pontianak dapat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 diharapkan semua komponen pembentuk IPM baik Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan dapat kembali ditingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan terus meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun menjaga daya beli masyarakat.

Berikut adalah gambaran Asumsi Makro/Kerangka Ekonomi Daerah Kota Pontianak Tahun 2021:

Tabel 3.2.
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro
Kota Pontianak Tahun 2020-2021

No	Uraian	Realisasi 2020*)	Target APBD Tahun 2021	Target Perubahan RKPD 2021**)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,97	4,90-5,10	4,00-4,50
2	Inflasi (%)	2,11	3 ± 1	3 ± 1
3	Angka Kemiskinan (%)	4,70	4,80	5,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,36	>9,00	11,00
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,44	79,50	79,50
6	Indeks Gini	0,34	0,34	0,34

Sumber : *) BPS Kota Pontianak, 2021

**) Bappeda Kota Pontianak, hasil FGD 2021

3.3. KERANGKA KEUANGAN DAERAH

Tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat memerlukan pembiayaan. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan pembangunan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan dan meningkatkan penerimaan. Adapun sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer, Pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN atau Pemerintah Daerah Lainnya sesuai peraturan perundangan. Pendapat Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah lainnya (transfer antar daerah).

Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah

Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
- b. Bantuan keuangan

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Penerimaan Pembiayaan, merupakan alternatif sumber penerimaan yang merupakan akibat dari pengeluaran yang pernah dilakukan dimasa lalu atau akan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayar di masa yang kan datang. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan masih terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di semua wilayah Indonesia serta adanya kebijakan belanja yang harus me-refocusing APBD yang ada untuk penanggulangan dampak Covid-19, maka Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan penyesuaian APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

Hal tersebut di atas yang selanjutnya juga dijadikan salah satu landasan kebijakan prioritas dalam menyusun asumsi perubahan RKPD Tahun 2021, dengan tujuan utamanya adalah penyesuaian, realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perubahan ini juga dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebijakan keuangan negara yang telah disesuaikan terlebih dahulu.

3.3.1. Kerangka Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kenaikan ataupun penurunan pendapatan daerah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang bergerak dinamis.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka kebijakan keuangan terhadap target pendapatan dalam perubahan RKPD tahun 2021 ini juga menyesuaikan kebijakan

nasional terkait dana transfer pusat yang juga berubah. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat menyusun RKPD (murni) tahun 2021 nilai alokasi Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DBH, DAK dan DID) belum diketahui jumlahnya karena belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Demikian pula dengan dana transfer dari Pemerintah Provinsi yang juga belum diketahui alokasi rencana untuk Kota Pontianak. Selain itu secara umum akibat terjadinya Pandemi Covid-19, juga mengakibatkan beberapa asumsi target pendapatan perlu dilakukan penyesuaian.

Adapun asumsi rancangan perubahan target dan alokasi Pendapatan Daerah di dalam perubahan RKPD tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Kerangka Pendapatan Daerah dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 diperkirakan menjadi Rp. 1.665.910.585.281 berkurang 7,35% persen atau senilai Rp. 132.140.012.718 dari target RKPD Murni Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.798.050.598.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan menjadi Rp. 495.342.463.009 berkurang 7,01% atau senilai Rp. 37.321.536.991 dari Pendapatan Asli Daerah dalam RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 532.664.000.000. Perubahan kebijakan yang terjadi dalam Pendapatan Asli Daerah dirincikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah diperkirakan sebesar Rp. 358.500.000.000 bertambah sebesar 13,62% persen atau senilai Rp. 42.967.000.000 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 315.533.000.000;

Jika diperhatikan data-data yang ada, maka kenaikan Pajak ini sebenarnya sudah terjadi sejak APBD Murni Tahun 2021 yang ditetapkan pada akhir tahun 2020 lalu. Sehingga jika dibandingkan dengan APBD Murni ataupun Perubahan atas Penjabaran APBD (Refokusing) tahun 2021, maka target pada Perubahan RKPD 2021 adalah tetap.

- b. Retribusi Daerah diperkirakan menjadi Rp. 36.774.180.300 berkurang sebesar 2,04% atau senilai Rp. 765.819.700 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 37.540.000.000 ;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan menjadi Rp. 14.178.896.445 berkurang sebesar 57,16%

- atau senilai Rp. 18.921.103.555 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 33.100.000.000 ;
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperkirakan menjadi Rp. 85.889.386.264, berkurang 41,37% atau senilai Rp.60.601.613.736 dari target RKPD Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.146.491.000.000.
2. Pendapatan Transfer dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 diperkirakan menjadi Rp. 1.101.088.722.273 berkurang sebesar 7,70% atau senilai Rp. 91.875.875.727 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.192.964.598.000. Perubahan kebijakan yang terjadi dalam Pendapatan Transfer dirincikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diperkirakan menjadi Rp. 899.200.412.000, berkurang sebesar 8,76% atau senilai Rp. 86.360.186.000 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 985.560.598.000 ;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan Rp.201.888.310.273, turun 2,66% atau sebesar Rp. 5.515.689.727 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 207.404.000.000.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan menjadi Rp. 69.479.400.000, berkurang sebesar 4,06% atau senilai Rp. 2.942.600.000 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 72.422.000.000.

Lebih rinci kerangka perubahan alokasi dan target Pendapatan Daerah mulai dari RKPD Murni, APBD Murni 2021, Perubahan (Refokusing) penjabaran APBD 2021 hingga rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)				BERTAMBAH/BERKURANG (RKPD Murni ke Perubahan)	
		RKPD Murni 2021	APBD Murni 2021	Refokusing APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7) = (6) - (3)	-8
4	PENDAPATAN DAERAH	1.798.050.598.000	1.770.384.770.339	1.719.777.101.636	1.665.910.585.282	-132.140.012.718	-7,35%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	532.664.000.000	538.009.872.339	508.987.389.636	495.342.463.009	-37.321.536.991	-7,01%
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	315.533.000.000	358.500.000.000	358.500.000.000	358.500.000.000	42.967.000.000	13,62%
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37.540.000.000	38.760.751.300	39.499.883.300	36.774.180.300	-765.819.700	-2,04%
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	33.100.000.000	35.240.482.703	15.500.000.000	14.178.896.445	-18.921.103.555	-57,16%
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	146.491.000.000	105.508.638.336	95.487.506.336	85.889.386.264	-60.601.613.736	-41,37%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.192.964.598.000	1.164.863.598.000	1.143.227.412.000	1.101.088.722.273	-91.875.875.727	-7,70%
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	985.560.598.000	920.836.598.000	899.200.412.000	899.200.412.000	-86.360.186.000	-8,76%
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	207.404.000.000	244.027.000.000	244.027.000.000	201.888.310.273	-5.515.689.727	-2,66%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.422.000.000	67.511.300.000	67.562.300.000	69.479.400.000	-2.942.600.000	-4,06%
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	72.422.000.000	67.511.300.000	67.562.300.000	69.479.400.000	-2.942.600.000	-4,06%

3.3.2. Kerangka Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Adapun kebijakan Belanja Daerah dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.671.471.969.966, berkurang 7,25% atau senilai Rp. 130.628.628.034 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.802.100.598.000 dengan komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp. 1.307.940.068.854 bertambah 4,18% atau senilai Rp. 52.527.470.854 dari Belanja Operasi dalam RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.255.412.598.000.
2. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp. 317.798.445.492 berkurang 41,71 % atau berkurang Rp. 227.389.554.508 dari target RKPD Murni Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 545.188.000.000.
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp. 45.733.455.620 bertambah 2948,90% atau bertambah Rp. 44.233.455.620 dari Target Belanja Tak Terduga pada RKPD Murni Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000.

Lebih rinci kerangka perubahan Belanja Daerah mulai dari RKPD Murni, APBD Murni 2021, Perubahan (Refokusing) penjabaran APBD 2021 hingga perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah
Dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)				BERTAMBAH/BERKURANG (RKPD Murni ke Perubahan)	
		RKPD Murni 2021	APBD Murni 2021	Refokusing APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7) = (6) - (3)	-8
5	BELANJA DAERAH	1.802.100.598.000	1.869.498.506.700	1.725.338.486.320	1.671.471.969.966	-130.628.628.034	-7,25%
5.1	BELANJA OPERASI	1.255.412.598.000	1.397.332.989.017	1.339.905.918.278	1.307.940.068.854	52.527.470.854	4,18%
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	627.620.400.000	767.185.474.671	732.456.607.481	729.060.060.732	101.439.660.732	16,16%
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	594.567.198.000	590.638.809.346	573.934.001.797	547.364.699.122	-47.202.498.878	-7,94%
5.1.5	BELANJA HIBAH	25.425.000.000	29.789.861.000	24.836.465.000	23.836.465.000	-1.588.535.000	-6,25%
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.800.000.000	9.718.844.000	8.678.844.000	7.678.844.000	-121.156.000	-1,55%
5.2	BELANJA MODAL	545.188.000.000	422.162.692.683	344.401.092.959	317.798.445.492	-227.389.554.508	-41,72%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000	50.002.825.000	41.031.475.082	45.733.455.620	44.233.455.620	2948,90%

3.3.3. Kerangka Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Komponen yang termasuk dalam SiLPA tersebut adalah pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja. Hal lain yang mempengaruhi terkait perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 adalah pengeluaran pembiayaan berupa pembatalan pembentukan dana cadangan dan adanya penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Adapun kerangka asumsi perubahan rencana Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Kerangka Penerimaan Pembiayaan Daerah diperkirakan menjadi Rp. 36.061.384.684, bertambah sebesar 20,00% atau senilai Rp. 6.011.384.684 dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 30.050.000.000. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dirincikan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan SiLPA menjadi Rp. 36.011.384.684, bertambah sebesar 20,04% atau bertambah senilai Rp. 6.011.384.684 dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dalam RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 30.000.000.000;
 - b. Penerimaan Kembali Piutang/Pemberian Pinjaman tetap yaitu sebesar Rp.50.000.000.
2. Kerangka Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksi menjadi Rp.30.500.000.000, naik 17,31% atau senilai Rp.4.500.000.000 dari target pada RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.26.000.000.000.

Lebih rinci kerangka perubahan Pembiayaan Daerah mulai dari RKPD Murni, APBD Murni 2021, Perubahan (Refokusing) penjabaran APBD 2021 hingga rancangan perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)				BERTAMBAH/BERKURANG (RKPD Murni ke Perubahan)	
		RKPD Murni 2021	APBD Murni 2021	Refokusing APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7) = (6) - (3)	-8
7	PEMBIAYAAN	4.050.000.000	99.113.736.361	5.561.384.684	5.561.384.684	1.511.384.684	37,32%
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.050.000.000	144.113.736.361	36.061.384.684	36.061.384.684	6.011.384.684	20,00%
7.1.1	Penggunaan SiLPA	30.000.000.000	144.063.736.361	36.011.384.684	36.011.384.684	6.011.384.684	20,04%
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000	45.000.000.000	30.500.000.000	30.500.000.000	4.500.000.000	17,31%
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	0	0	0	-10.000.000.000	-100,00%
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	16.000.000.000	45.000.000.000	30.500.000.000	30.500.000.000	14.500.000.000	90,63%

Khusus untuk Kebijakan Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat kami jelaskan bahwa pada RKPD Murni dianggarkan sebesar Rp.16 Miliar adalah berhadapan dengan Penyertaan Modal untuk PDAM (Program Hibah Air Bersih untuk MBR), Penyertaan Modal untuk PT. Bank Kalbar dan Penyertaan Modal untuk PUD Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Bank Pasar). Perkembangan selanjutnya pada saat penyusunan APBD Murni TA 2021 terjadi kenaikan anggaran penyertaan Modal khusus untuk Bank Kalbar dan Bank Pasar yang juga diperkuat adanya Peraturan Daerah Penyertaan Modal dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020. Sehingga secara keseluruhan terjadi kenaikan anggaran penyertaan modal tersebut menjadi Rp 45 Miliar. Selanjutnya di dalam Rancangan Perubahan RKPD tahun 2021 ini anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp. 30,5 Miliar.

Rekapitulasi Kerangka Anggaran RKPD

Secara keseluruhan berdasarkan penjelasan tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dihitung/diketahui besaran volume Anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah Rp. 1.701.971.969.966 berkurang 6,90% atau senilai Rp. 126.128.628.034 dari Volume RKPD Murni Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.1.828.100.598.000.

Secara lengkap proyeksi rancangan perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 mulai dari RKPD Murni, APBD Murni 2021, Perubahan (Refocusing) penjabaran APBD 2021 hingga Rancangan perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021 dapat kami disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)				BERTAMBAH/BERKURANG (RKPD Murni ke Perubahan)	
		RKPD Murni 2021	APBD Murni 2021	Refokusing APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7) = (6) - (3)	-8
4	PENDAPATAN DAERAH	1.798.050.598.000	1.770.384.770.339	1.719.777.101.636	1.665.910.585.282	-132.140.012.718	-7,35%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	532.664.000.000	538.009.872.339	508.987.389.636	495.342.463.009	-37.321.536.991	-7,01%
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	315.533.000.000	358.500.000.000	358.500.000.000	358.500.000.000	42.967.000.000	13,62%
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37.540.000.000	38.760.751.300	39.499.883.300	36.774.180.300	-765.819.700	-2,04%
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	33.100.000.000	35.240.482.703	15.500.000.000	14.178.896.445	-18.921.103.555	-57,16%
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	146.491.000.000	105.508.638.336	95.487.506.336	85.889.386.264	-60.601.613.736	-41,37%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.192.964.598.000	1.164.863.598.000	1.143.227.412.000	1.101.088.722.273	-91.875.875.727	-7,70%
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	985.560.598.000	920.836.598.000	899.200.412.000	899.200.412.000	-86.360.186.000	-8,76%
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	207.404.000.000	244.027.000.000	244.027.000.000	201.888.310.273	-5.515.689.727	-2,66%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.422.000.000	67.511.300.000	67.562.300.000	69.479.400.000	-2.942.600.000	-4,06%
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	72.422.000.000	67.511.300.000	67.562.300.000	69.479.400.000	-2.942.600.000	-4,06%

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)				BERTAMBAH/BERKURANG (RKPD Murni ke Perubahan)	
		RKPD Murni 2021	APBD Murni 2021	Refokusing APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	(Rp)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7) = (6) - (3)	-8
5	BELANJA DAERAH	1.802.100.598.000	1.869.498.506.700	1.725.338.486.320	1.671.471.969.966	-130.628.628.034	-7,25%
5.1	BELANJA OPERASI	1.255.412.598.000	1.397.332.989.017	1.339.905.918.278	1.307.940.068.854	52.527.470.854	4,18%
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	627.620.400.000	767.185.474.671	732.456.607.481	729.060.060.732	101.439.660.732	16,16%
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	594.567.198.000	590.638.809.346	573.934.001.797	547.364.699.122	-47.202.498.878	-7,94%
5.1.5	BELANJA HIBAH	25.425.000.000	29.789.861.000	24.836.465.000	23.836.465.000	-1.588.535.000	-6,25%
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.800.000.000	9.718.844.000	8.678.844.000	7.678.844.000	-121.156.000	-1,55%
5.2	BELANJA MODAL	545.188.000.000	422.162.692.683	344.401.092.959	317.798.445.492	-227.389.554.508	-41,72%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000	50.002.825.000	41.031.475.082	45.733.455.620	44.233.455.620	2948,90%
7	PEMBIAYAAN	4.050.000.000	99.113.736.361	5.561.384.684	5.561.384.684	1.511.384.684	37,32%
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.050.000.000	144.113.736.361	36.061.384.684	36.061.384.684	6.011.384.684	20,00%
7.1.1	Penggunaan SiLPA	30.000.000.000	144.063.736.361	36.011.384.684	36.011.384.684	6.011.384.684	20,04%
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000	45.000.000.000	30.500.000.000	30.500.000.000	4.500.000.000	17,31%
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	0	0	0	-10.000.000.000	-100,00%
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	16.000.000.000	45.000.000.000	30.500.000.000	30.500.000.000	14.500.000.000	90,63%
	VOLUME APBD	1.828.100.598.000	1.914.498.506.700	1.755.838.486.320	1.701.971.969.966	-126.128.628.034	-6,90%

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2021 disusun dari penjabaran visi misi dan program dalam RPJMD Kota Pontianak Perubahan 2020-2024 dengan tetap menyelaraskan dan berpedoman pada program prioritas nasional. Rencana kerja perubahan ini secara umum juga akan dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program APBD Perubahan serta sebagai arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan tahun 2020-2024 diturunkan dari visi dan misi yang ada. Pembangunan Kota Pontianak tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Perubahan Tahun 2020-2024 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, dimana segala kebijakan pembangunan harus mengacu pada dokumen tersebut.

Berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2021 tetap berorientasi pada visi Kota Pontianak yaitu **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”**.

- **Pontianak Kota Khatulistiwa**

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

- **Berwawasan Lingkungan**

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

- **Cerdas**

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas

berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

- **Bermartabat**

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Visi tersebut maka telah disusun langkah-langkah strategis melalui 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas; (RPJMD-P)
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing; (RPJMD-P)
5. Meningkatkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan; (RPJMD-P)

Arah kebijakan pembangunan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Periode 2020-2024

RKPD Tahun I 2020	RKPD Tahun II 2021	RKPD Tahun III 2022	RKPD Tahun IV 2023	RKPD Tahun V 2024
<p><u>Tahap Konsolidasi</u> Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman</p>	<p><u>Tahap Percepatan</u> Optimalisasi pengelolaan sumber daya kota secara cerdas serta percepatan pembangunan kawasan dan sector strategis yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat</p>	<p><u>Tahap Pengembangan</u> Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sector secara seimbang sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah disertai dengan peningkatan aksesibilitas antar kawasan</p>	<p><u>Tahap Pemantapan</u> Memperindah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan serta optimalisasi peran seluruh stakeholder untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan</p>	<p><u>Tahap Penguatan</u> Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ekonomi dan social budaya untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat</p>

Adapun beberapa pelaksanaan dari arah kebijakan dilaksanakan dalam rencana waktu pelaksanaan tahun jamak/*multiyears* sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rencana Waktu Pelaksanaan Tahun Jamak/Multiyears Tahun 2020-2024

No.	Tahap Pembangunan	Waktu Pelaksanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembangunan Rumah Sakit Kecamatan Pontianak Utara					
2.	Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan					
3.	Pembangunan Water Front City / Penataan Tepian Sungai					
4.	Pembangunan Gedung SPN					
5.	Pembangunan Gedung Kejaksaan					
6.	Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik					
7.	Pembangunan Gedung SMP Negeri 8 Pontianak					
8.	Pembangunan Inner Ring Road Jl. Cahaya Baru – Jl. Purnama Dalam					
9.	Pembangunan Jl. Pemda Kecamatan Pontianak Timur					

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan visi, misi serta pentahapan pembangunan sebagaimana tertuang di atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan tujuan dan sasaran pembangunan serta indikator kinerja yang hendak dicapai dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020*	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	79,35	78,53	79,95	80,4	80,85	81,3	81,30
				1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup		72,82	72,82	73,01	73,19	73,36	73,54	73,54
					2. Angka Stunting Balita	Tahun	17,04	21,00	18,00	17,00	16,00	14,00	14,00
				2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta pengembangan Budaya	1. Rata rata lama sekolah	Persen	10,14	9,92	10,25	10,35	10,44	10,53	10,53
					2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,99	15,05	15,18	15,31	15,43	15,65	15,56
					3. Persentase cagar budaya Kota yang dilestarikan	Tahun	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	85,00
				3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	Persen	1,65	1,71	1,65	1,51	1,23	1,11	1,11
					2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	Persen	93,62	93,88	93,92	93,98	94,05	94,17	94,17
					3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat an	Pratama	Madya	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Utama

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020*	2021	2022	2023	2024	
				4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	1. Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional	Persen	2,50	2,52	2,54	2,56	2,58	2,60	2,60
2	Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif	2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan	Indeks Infrastruktur			Persen	72,71	76,02	77,84	79,22	81,17	83,39	83,39
				1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan	1. Rasio Infrastruktur Jalan	Persen	86,60	87,00	87,50	88,00	90,00	92,00	92,00
					2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase	Persen	47,00	48,00	50,00	52,00	54,00	60,00	60,00
				2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum	Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	Persen	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
				4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	Persen	85,67	88,09	89,56	90,33	91,00	91,33	91,33
				5. Meningkatnya kualitas transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020*	2021	2022	2023	2024	
3	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	1. Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	65,74	71,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74
			2. Nilai SAKIP			Nilai	BB	A	A	A	A	A	A
				1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	65,74	71,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74
				2. Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
				3. Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja	1. Presentase Nilai Perencanaan Kinerja	Persen	23,50	24,00	24,50	25,00	25,50	26,00	26
					2. Persentase Nilai Pengukuran dan Capaian Kinerja	Persen	30,47	32,47	35,97	36,97	37,97	38,97	38,97
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	Nilai	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			2. Meningkatkan penerapan akuntabilitas keuangan	1. Opini BPK	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan	Nilai LPPD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pontianak	Nilai	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)	Bintang 4 (****)	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020*	2021	2022	2023	2024	
		pemerintahan daerah		pemerintahan daerah									
4	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing	Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kreativitas dan daya saing masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi			Persen	4,81	5,20	4,0-4,5	4,1-4,6	4,2-4,7	4,3-4,8	4,3-4,8
			2. Tingkat Inflasi			Persen	2,64	≤5	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
			3. Rasio Gini			Rasio	0,34	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	0,30
			4. Angka Kemiskinan			Persen	4,88	4,90	5,00	4,80	4,70	4,60	4,60
			5. Tingkat Pengangguran			Persen	9,13	9,97	10,02-10,07	9,79-10,46	9,57-10,22	9,35-9,99	9,35-9,99
				1. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	1,29	1,33	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34
				2. Meningkatnya sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
				3. Meningkatnya sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	16,17	16,17	16,17	16,25	16,25	16,30	16,30
				4. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	1. Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	4,00	4,00	4,00	4,50	4,80	4,90	4,90
					2. Presentase Usaha Mikro yang Jadi Wirausaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020*	2021	2022	2023	2024	
				5. Meningkatnya investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi daerah (PMA/PMDN)	Persen	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
				6. Meningkatnya sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	3,48	3,40	3,41	3,42	3,43	3,49	3,49
				7. Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	4,88	0,05	5,00	4,80	4,70	4,60	4,60
				8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	90,03	90,03	89,30-89,98	81,54-90,21	89,78-90,43	90,01-90,65	90,01-90,65
5	Meningkatkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan	1. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, nyaman, dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	61,42	61,42	61,90	62,40	62,90	63,40	63,40
				1. Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,50	52,50	53,00	53,50	54,00	54,50	54,50
					2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,50	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	83,50
					3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,60	39,60	40,00	40,50	41,00	41,50	41,50
				2. Meningkatnya kualitas tata ruang	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang	Persen	82,00	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00	95,00
		2. Mewujudkan kota yang aman dan tertib	1. Angka Kriminalitas yang diselesaikan			Jumlah	1.709	1.564	1.419	1.274	1.129	984	984

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	
								2020*	2021	2022	2023	2024		
				Meningkatnya ketertiban di kalangan masyarakat	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2. Angka konflik	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Angka konflik	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0
			3. Indeks Resiko Bencana			Indeks	85,66	83,00	81,00	79,00	77,00	75,00	75,00	75,00
				1.Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	Indeks kapasitas daerah	Indeks	0,45	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	0,60	0,60
					Persentase penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Kebijakan prioritas pembangunan ditetapkan sesuai dengan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam beberapa sasaran pembangunan, yakni:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta pengembangan budaya;
3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga;
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan;
6. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;
7. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik;
8. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
9. Meningkatnya kualitas transportasi;
10. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
11. Meningkatnya profesionalisme ASN;
12. Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja;
13. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat;
14. Meningkatnya akuntabilitas keuangan;
15. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
16. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan;
17. Meningkatnya sektor perdagangan;
18. Meningkatnya sektor industri;
19. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro;
20. Meningkatnya investasi daerah;
21. Meningkatnya sektor pariwisata;
22. Menurunnya angka kemiskinan;
23. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
24. Menurunnya pencemaran lingkungan;
25. Meningkatnya kualitas tata ruang;
26. Meningkatnya ketertiban di kalangan masyarakat;
27. Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat;
28. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD-P. Program-program pembangunan tersebut dijabarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.

Prioritas Pembangunan/Program Prioritas Daerah Kota Pontianak Tahun 2021

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
I.	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
II.	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman
III.	MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK, PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
IV. MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA		
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
V. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE PERKOTAAN		
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4	Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman
VI. MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP AIR MINUM		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
VII. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK		
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
VIII. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN		
1	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Program Pengelolaan Tanah Kosong
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
7	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah
8	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
IX. MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI		
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
X. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1)	(2)	(3)
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
5	Program Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
XI. MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN		
1	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
XII. MENINGKATNYA PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA		
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
XIII. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
7	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
10	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
12	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
13	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
14	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
15	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
18	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
19	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

XIV.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
XV	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
XVI	MENINGKATNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN	
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
XVII.	MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN	
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
XVIII.	MENINGKATNYA SEKTOR INDUSTRI	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
XIX.	MENINGKATNYA DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
XX.	MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH	
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
XXI. MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA		
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
XXII. MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN		
1	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
2	Program Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan
3	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
XXIII. MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA		
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
XXIV. MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN		
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
4	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
XXV. MENINGKATNYA KUALITAS TATA RUANG		
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
XXVI. MENINGKATNYA KETERTIBAN DI KALANGAN MASYARAKAT		
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
XXVII. MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT		
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningk. Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningk. Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
XXVIII. MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN		
1	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
2	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	87%	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	92%	
		Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	90%	
		Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	85%	
		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 per 1.000 Penduduk	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
		Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90%	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90%	
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	90%	
		Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	60%	
		Persentase Target Konsumsi Pangan	83%	
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	90%	
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	20%	
II	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi D-IV dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan dilestarikan	100%	
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	100%	
5	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)	100%	
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringaktan, penghapusan)	100%	
7	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	100%	
III	MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK, PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.39	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	549	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70.48%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12.47%	
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19%	
		Persentase Baduta Stunting	24.5%	
4	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pratama	
5	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.0038	
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	65%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100%	
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	55%	
IV	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	25.56%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase meningkatnya organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	15.23%	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.6%	
V	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE PERKOTAAN			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penambahan kinerja jalan kota	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase berkurangnya luas genangan hujan/pasang tiap tahun	50%	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara	50%	
4	Program Pengembangan Permukiman	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman	100%	
VI	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP AIR MINUM			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	90%	
VII	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK			
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi	100%	
VIII	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi baik	78.5%	
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	10%	
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	1.5%	
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase bidang tanah Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan	100%	
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	
7	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penggunaan tanah	100%	
8	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	80%	
IX	MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Presentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	80%	Dinas Perhubungan
		Presentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80%	
		Presentase Kendaraan bermotor Laik Jalan	80%	
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	
X	MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI			
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71,74	Sekretariat Daerah
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,74	
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase kategori hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah dengan score 3,5 pada obrik binaan Irban	20%	Inspektorat
		Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP BPK	81%	
		Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP APIP	100%	
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase aparaturnya pengawasan yang mengikuti diklat serta bimtek minimal 120 jam /tahun per APIP	100%	
		Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	13,33%	
5	Program Aplikasi Informatika	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	91%	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	
XI	MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN			
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	80%	
XII	MENINGKATNYA PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan Daerah	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Konsistensi program RKPD Perangkat Daerah ke dalam APBD	100%	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah	59.8%	
XIII	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA MASYARAKAT			
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100%	Sekretariat Daerah
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100%	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	100%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sistem Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi	100%	
6	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	88.5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	97.5	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	80.5	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	85.5	
		Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA pada pelayanan keliling	100%	
7	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	42.5	
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	32.5	
		Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	32.5	
		Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	52.5	
		Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	32.5	
		Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100%	
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	77.5	
		Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	1%	
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	
10	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	89.44%	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	90%	
12	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	50%	Dinas Perpustakaan
13	Program Pengelolaan Arsip	Indeks kearsipan	Baik	
14	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Daftar Arsip Statis	65%	
15	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	Sekretariat Dewan
		Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	80%	Kecamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	75%	
		Persentase LPM Aktif		
18	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80%	
19	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80%	
XIV	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase dokumen perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	
		Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	
		Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	
		Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	
XV	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100%	Sekretariat Daerah
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100%	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase dokumen database pajak dan/retribusi yang tersedia	100%	
		Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/ retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	50%	
XVI	MENINGKATNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN			
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	25%	
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	80%	
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	0.32%	
		Nilai indeks pertanaman (IP)	1.24	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk	3.15	
		Luas pertanaman keladi	2	
		Persentase luas panen tanaman hortikultura	2.5%	
		Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	1%	
		Persentase sarana yang memenuhi standar	5%	
		Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas	3.68%	
		Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3.68%	
		Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)	4%	
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	20%	
		Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	1.08%	
6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	25%	
		Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	7.68%	
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0%	
		Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	8.3%	
		Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	5%	
		Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5%	
		Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10%	
XVII	MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN			
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	11,76%	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	83%	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	39%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	97%	
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis	100%	
XVIII	MENINGKATNYA SEKTOR INDUSTRI			
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	2.47%	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	64.85%	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen	
XIX	MENINGKATNYA DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO			
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0.57%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19%	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	8%	
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	31%	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10%	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	3%	
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	2%	
XX	MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH			
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang Melaporkan Investasi Penanaman Modal Sesuai SOP	100%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100%	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Informasi Penanaman Modal Yang Didapatkan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXI	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.42%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata	3.42%	
3	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	3.42%	
		Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	2%	
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	1.8%	
XXII	MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN			
1	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	81%	Dinas Sosial
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penerima Bantuan	100%	
5	Program Penanganan Bencana	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Makam Pahlawan Yang Dikelola	100%	
XXIII	MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA			
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair	70%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus dan Mendapat Sertifikat Kompetensi	100%	
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilindungi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	100%	
XXIV	MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase pengendalian pencemaran	55%	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	
3	Program Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100%	
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	100%	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan	100%	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100%	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	
XXV	MENINGKATNYA KUALITAS TATA RUANG			
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	18.9%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	96.89%	
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	90%	
XXVI	MENINGKATKAN KETERTIBAN DI KALANGAN MASYARAKAT			
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
XXVII	MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendidikan politik	80%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak	80%	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta pebentukan kader P4GN	80%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD)	KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningk. Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Konflik Yang Dapat ditangani	100%	
XXVIII	MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	100%	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan review terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2021 baik itu pada pencapaian target, realisasi serapan anggaran, realisasi pendapatan dan faktor eksternal lain yang berpengaruh kepada perencanaan pembangunan maka diperlukan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kota Pontianak tahun 2021. Penyesuaian itu mencakup:

- 1) Belanja
 - a. Penambahan kegiatan;
 - b. Pergeseran pagu antar kegiatan ataupun belanja;
 - c. Penambahan dan pengurangan pagu kegiatan;
 - d. Penambahan dan pengurangan target kinerja;
 - e. Perubahan lokasi kegiatan; dan
 - f. Perubahan kelompok sasaran kegiatan.
- 2) Pendapatan yakni penyesuaian terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 3) Pembiayaan.

Rencana penyesuaian tersebut diaplikasikan ke anggaran belanja masing-masing perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2021 per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	APBD 2021	Rencana Pagu Perubahan RKPD 2021
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	462.800.566.387	416.831.984.344
2	Dinas Kesehatan	347.765.886.222	387.007.946.894
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	260.458.699.437	204.564.554.893
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	169.699.539.686	124.190.414.863
5	Satuan Polisi Pamong Praja	21.460.153.720	21.121.465.708
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.777.154.575	3.822.472.781
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Sosial Politik	7.100.056.849	6.621.043.680
8	Dinas Sosial	12.522.413.857	11.297.207.835

9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.012.052.923	10.626.008.021
10	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	20.157.368.620	14.127.271.385
11	Dinas Lingkungan Hidup	67.877.769.907	62.272.649.028
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.342.176.734	12.532.125.301
13	Dinas Perhubungan	45.924.306.763	42.360.866.306
14	Dinas Komunikasi Informatika	11.827.156.571	9.068.813.835
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	14.986.664.847	12.842.597.027
16	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.496.313.028	9.781.708.842
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	17.307.859.773	13.134.272.193
18	Dinas Perpustakaan	10.422.616.972	8.545.367.784
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.408.612.386	10.511.955.491
20	Badan Keuangan Daerah	127.724.108.319	104.003.135.401
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.370.449.197	15.986.944.724
22	Sekretariat DPRD	53.049.245.828	44.972.108.057
23	Sekretariat Daerah	60.185.952.440	55.091.604.206
24	Inspektorat	10.479.367.486	9.465.736.210
25	Kecamatan Pontianak Tenggara	10.212.221.911	8.473.272.697
26	Kecamatan Pontianak Selatan	12.064.470.806	10.435.951.475
27	Kecamatan Pontianak Timur	14.897.574.127	12.160.384.167
28	Kecamatan Pontianak Kota	12.449.799.011	10.133.554.538
29	Kecamatan Pontianak Barat	11.687.218.788	9.452.646.678
30	Kecamatan Pontianak Utara	11.030.729.530	10.035.905.602
Jumlah		1.869.498.506.700	1.671.471.969.966

Sementara rencana perubahan anggaran secara lebih detail dirincikan pada Tabel 5.2 dibawah yang memperlihatkan perubahan perubahan kinerja dan pendanaan mulai dari program, kegiatan hingga sub kegiatan per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Perubahan Belanja Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD 2021 (Rp.)	Pagu Indikatif RPKD Perubahan (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	460.072.074.320	414.903.091.796
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	460.072.074.320	414.903.091.796
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.792.011.833	265.635.932.730
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.490.364	270.204.241
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.998.000	14.628.845
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	6.224.929
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	6.465.102
1	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	6.474.929
1	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	7.233.569
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	218.772.174	218.772.174
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.720.190	10.404.693
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	276.384.415.933	260.656.121.732
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	276.384.415.933	260.656.121.732
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.454.090	157.362.996
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.923.620	62.823.620
1	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.800.000	18.800.000
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.730.470	75.739.376
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.114.643.888	944.597.888
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.767.888	167.767.888
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	100.000.000
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	590.590.000	590.590.000
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.240.000	16.240.000
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.046.000	-
1	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000	70.000.000
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.195.048	170.552.308
1	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	118.102.720	-
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.092.328	170.552.308
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.350.036.832	3.287.317.887
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.225.000	5.225.000

1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333.099.049	333.099.049
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.011.712.783	2.948.993.838
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.775.678	149.775.678
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	25.000.000
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.775.678	124.775.678
1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.107.240.834	126.094.337.711
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	65.475.866.035	55.210.439.174
1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	786.252.728	-
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	248.606.000	295.233.105
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18.374.613.729	8.826.033.729
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.867.069.999	3.705.067.616
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	197.933.400	197.933.445
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	982.542.569	528.156.561
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.220.194	86.315.626
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	98.308.052	95.408.052
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	258.659.364	258.659.364
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.461.660.000	40.461.660.000
1	1	2	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	755.971.676
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69.078.043.827	57.421.780.262
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	30.066.700.436	19.900.272.041
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	-	-
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-
1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	-	-
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.128.441.727	9.269.491.384
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	-	166.524.133
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	386.626.000	335.059.104
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	1.626.606.479
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.559.471.929	3.615.485.208
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	667.928.544	667.478.111
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	177.696.146	177.696.146

1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.239.342.686	924.407.705
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	381.238.384	268.035.976
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.507.276	46.507.276
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	874.450.699	874.576.699
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.549.640.000	19.549.640.000
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.967.932.265	10.037.655.515
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.057.630.715	-
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	278.721.035	-
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	-	-
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	18.205.651	18.205.651
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3.771.304.864	3.177.379.864
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.842.070.000	6.842.070.000
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.585.398.707	3.424.462.760
1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000
1	1	2	2.04	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	730.366.314	730.366.314
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	648.052.774	648.052.774
1	1	2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	73.044.163	73.044.163
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	230.422.875	230.422.875
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	393.710.081	232.774.134
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.459.802.500	1.459.802.500
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28.172.821.653	23.172.821.355
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.172.821.653	23.172.821.355
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	490.031.194	490.031.194
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27.682.790.459	22.682.790.161
1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-
1	1	6	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-
1	1	6	2.01	6	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.728.492.067	1.928.892.548
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.728.492.067	1.928.892.548

2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.222.201.626	1.500.458.457
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	814.864.413	395.496.018
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	758.964.718	395.496.018
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	55.899.695	-
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.407.337.213	1.104.962.439
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	699.169.236	728.053.862
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	708.167.977	376.908.577
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	68.398.775	68.398.775
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.398.775	68.398.775
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	68.398.775	68.398.775
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	135.956.350	50.000.000
2	22	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.956.350	50.000.000
2	22	4	2.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	85.956.350	-
2	22	4	2.01	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	50.000.000	50.000.000
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	101.935.316	110.035.316
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	101.935.316	110.035.316
2	22	5	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	-	-
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	101.935.316	110.035.316
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	200.000.000	200.000.000
2	22	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000
2	22	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	200.000.000	200.000.000
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	204.550.528.777	241.675.699.849
					DINAS KESEHATAN		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.916.982.402	167.419.317.027
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.036.555	107.275.030
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.631.526	45.776.701
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.405.029	61.498.329
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145.495.651.308	165.974.813.731
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140.377.774.211	131.459.086.634
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-
1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.900.873.196	34.298.723.196
1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	217.003.901	217.003.901
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.750.000	23.750.000

1	2	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	23.750.000	23.750.000
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.136.939	324.040.666
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.422.078	20.422.078
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.592.470	85.372.416
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.024.049	66.843.830
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.908.000	76.830.000
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.993.675	39.993.675
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.166.667	4.166.667
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.030.000	30.412.000
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	34.030.000
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	34.030.000
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.999.978	334.999.978
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.999.978	334.999.978
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.407.622	620.407.622
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	490.076.562	490.076.562
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.200.000	50.200.000
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.131.060	80.131.060
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.200.114.745	72.995.784.938
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.031.707.869	56.947.331.365
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	20.804.836.695	20.804.836.695
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	10.082.600.666	10.082.600.666
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	-	-
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	-
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.923.586.705	2.923.586.705
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.518.720.609	16.309.091.188
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.570.544.160	6.693.804.977
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	131.419.034	133.411.134
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.630.771.566	15.802.774.078
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	213.603.593	150.650.280

1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.230.180.000	1.230.180.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	131.847.528	136.353.535
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	240.454.026	190.831.847
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	137.470.853	47.685.700
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	355.986.718	71.812.110
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.944.059	75.097.620
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.695.958	8.695.958
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.625.818	23.625.818
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	168.368.700	97.893.127
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	419.159.448	319.159.299
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.048.457.711	546.592.461
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	674.258.603	1.088.950.839
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	321.560.000	321.560.000
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	35.820.395	35.820.395
1	2	2	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	147.782.276	147.782.276
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	976.049.348	2.678.612.010
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6.854.519.382	6.854.501.382
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.536.634.030	1.536.634.030
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	362.829.062	82.576.197
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	237.208.047	22.129.047
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	125.621.015	60.447.150
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.806.248	163.103.298
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	41.720.225	41.720.225
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	133.086.023	121.383.073
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	531.912.772	322.253.872
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	228.298.292	24.999.392
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	228.298.292	24.999.392
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303.614.480	297.254.480
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303.614.480	297.254.480
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	476.715.731	514.453.607

1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	46.576.556	93.146.512
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	46.569.956
1	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	46.576.556	46.576.556
1	2	4	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-
1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	179.556.815	179.556.815
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	179.556.815	179.556.815
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	174.782.360	165.950.280
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	174.782.360	165.950.280
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	75.800.000	75.800.000
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	75.800.000	75.800.000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	424.803.127	423.890.405
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424.803.127	423.890.405
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	424.803.127	423.890.405
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.166.504.220	4.237.391.967
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.166.504.220	4.237.391.967
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.166.504.220	4.237.391.967
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.884.702.621	1.884.702.621
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.884.702.621	1.884.702.621
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.884.702.621	1.884.702.621
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.564.734.997	1.564.734.997
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.564.734.997	1.564.734.997
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.564.734.997	1.564.734.997

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.385.021.277	1.385.021.277
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.385.021.277	1.385.021.277
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.385.021.277	1.385.021.277
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.704.789.010	2.704.789.010
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.704.789.010	2.704.789.010
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.704.789.010	2.704.789.010
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.411.336.711	1.411.336.711
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.411.336.711	1.411.336.711
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.411.336.711	1.411.336.711
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.479.532.591	1.479.532.591
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.479.532.591	1.479.532.591
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.479.532.591	1.479.532.591
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.345.823.485	1.345.823.485
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.345.823.485	1.345.823.485
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.345.823.485	1.345.823.485
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.379.013.067	1.379.013.067
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.379.013.067	1.379.013.067
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.379.013.067	1.379.013.067
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.573.422.741	1.573.422.741
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.573.422.741	1.573.422.741
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.573.422.741	1.573.422.741
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.595.080.688	2.595.080.688
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.595.080.688	2.595.080.688
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.595.080.688	2.595.080.688
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	882.444.676	882.444.676
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	882.444.676	882.444.676
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	882.444.676	882.444.676
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.106.248.887	1.106.248.887
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.106.248.887	1.106.248.887
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.106.248.887	1.106.248.887
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.046.370.064	1.046.370.064
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.046.370.064	1.046.370.064

1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.046.370.064	1.046.370.064
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	827.439.174	827.439.174
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	827.439.174	827.439.174
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	827.439.174	827.439.174
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.017.563.555	2.017.563.555
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.017.563.555	2.017.563.555
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.017.563.555	2.017.563.555
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.269.698.718	2.269.698.718
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.269.698.718	2.269.698.718
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.269.698.718	2.269.698.718
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.735.655.555	1.735.655.555
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.735.655.555	1.735.655.555
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.735.655.555	1.735.655.555
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.317.872.993	1.317.872.993
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.317.872.993	1.317.872.993
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.317.872.993	1.317.872.993
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.689.453.238	1.689.453.238
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.689.453.238	1.689.453.238
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.689.453.238	1.689.453.238
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.643.780.544	2.643.780.544
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.643.780.544	2.643.780.544
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.643.780.544	2.643.780.544
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.645.999.781	1.645.999.781
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.645.999.781	1.645.999.781
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.645.999.781	1.645.999.781
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.558.042.226	1.558.042.226
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.558.042.226	1.558.042.226
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.558.042.226	1.558.042.226
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.558.042.226	1.558.042.226
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.476.180.681	2.476.180.681

1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.476.180.681	2.476.180.681
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.476.180.681	2.476.180.681
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	752.818.408	752.818.408
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	752.818.408	752.818.408
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	752.818.408	752.818.408
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.922.128.489	16.904.128.489
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.098.500	29.098.500
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.005.200	5.005.200
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.093.300	24.093.300
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.657.219.496	5.663.219.496
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	851.203.464	851.203.464
1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.758.820.000	4.758.820.000
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47.196.032	53.196.032
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.542.142.125	3.598.142.125
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.186.469	74.186.469
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.960.540	280.960.540
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	880.955.116	2.986.955.116
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	306.040.000	256.040.000
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.420.000	271.420.000
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271.420.000	271.420.000
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.526.920.368	6.396.920.368
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.403.000.000	1.403.000.000
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.123.920.368	4.993.920.368
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895.328.000	945.328.000
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	895.328.000	945.328.000
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85.833.699.048	84.897.700.901
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.152.817.690	27.215.951.210
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.132.579.200	1.059.219.320
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.841.068.700	20.651.068.700
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.179.169.790	5.505.663.190
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	-	-

1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	-	-
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.638.431.050	57.639.299.383
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	863.023.539	863.883.537
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	125.073.720	125.073.720
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	56.622.195.995	56.622.195.995
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	28.137.796	28.146.131
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	42.450.308	42.450.308
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5.711.333	5.711.333
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	36.738.975	36.738.975
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	260.458.699.437	204.564.554.893
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.441.522.274	19.439.526.697
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.543.890	41.043.890
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.032.315	11.032.315
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.360.450	5.860.450
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.160.450	5.660.450
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.430.225	10.430.225
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.560.450	8.060.450
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.326.329.080	14.464.058.150
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.073.274.330	13.720.683.400
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.217.820.000	712.140.000
1	3	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.234.750	31.234.750
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287.850.000	199.125.000
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	179.850.000	179.525.000
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.000.000	19.600.000
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	969.345.302	693.472.298
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.199.985	14.199.985
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	474.064.777	459.019.377
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.150.540	45.147.936
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.800.000	20.800.000
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.870.000	80.045.000
1	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	204.260.000	74.260.000
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.098.941.828	405.192.017

1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	548.852.810	-
1	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.089.018	405.192.017
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.640.912.343	1.588.035.511
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.300.000	42.300.000
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.098.434	318.098.402
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.236.513.909	1.227.637.109
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.073.599.831	2.048.599.831
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	760.187.516	760.187.516
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	900.764.814	890.764.814
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.792.575	219.792.575
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.854.926	177.854.926
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.885.257.688	12.306.259.549
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.885.257.688	12.306.259.549
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.433.570.166	3.639.417.084
1	3	2	2.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	-	-
1	3	2	2.01	19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	412.390.000	410.690.000
1	3	2	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	1.584.303.157	-
1	3	2	2.01	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	-	-
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	7.956.727.490	7.946.099.990
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	286.982.875	285.282.875
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	211.284.000	24.769.600
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.723.061.697	8.340.183.659
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.723.061.697	8.340.183.659
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.723.061.697	8.340.183.659
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	149.881.205	149.881.205
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	149.881.205	149.881.205
1	3	4	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.994.494	99.994.494
1	3	4	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	49.886.711	49.886.711
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	934.182.660	682.610.075
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	934.182.660	682.610.075
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-

1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	934.182.660	682.610.075
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	43.031.023.745	31.754.094.389
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.031.023.745	31.754.094.389
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	820.572.075	817.752.075
1	3	6	2.01	2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	-	-
1	3	6	2.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.121.082.075	817.812.075
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	28.221.634.405	18.752.810.205
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.587.759.448	-
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	11.279.975.742	11.365.720.034
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	20.522.970.440	17.363.023.356
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.522.970.440	17.363.023.356
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.522.970.440	17.363.023.356
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	47.745.742.639	42.979.826.380
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	47.745.742.639	42.979.826.380
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	472.020.950	349.682.463
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	37.846.258.659	34.580.496.204
1	3	8	2.01	6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	6.543.101.750	5.519.252.735
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.884.361.280	2.530.394.978
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	34.566.542.645	28.305.502.924
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	34.566.542.645	28.305.502.924
1	3	9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	409.683.495	175.117.000
1	3	9	2.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	674.855.350	570.924.550
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	17.808.851.255	14.167.145.875
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	15.454.261.567	13.173.424.521
1	3	9	2.01	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	218.890.978	218.890.978
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.208.250.693	42.471.225.158
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	69.208.250.693	42.471.225.158
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.598.375.240	2.564.510.240
1	3	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	501.341.905	496.961.905
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	767.967.615	762.247.615

1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	18.326.445.455	12.466.565.455
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	17.925.158.860	6.440.648.860
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	9.461.333.990	8.802.453.990
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.309.465.518	6.716.958.043
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	2.997.989.715	2.777.909.715
1	3	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	-	-
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	568.236.240	-
1	3	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	120.071.820	-
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.631.864.335	1.442.969.335
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	460.828.241	319.228.241
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	460.828.241	319.228.241
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	460.828.241	319.228.241
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	789.435.510	453.193.260
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	217.230.510	91.938.760
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	56.105.350	52.405.000
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	161.125.160	39.533.760
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-
1	3	12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	-	-
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	420.605.000	272.505.000
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	167.505.000	19.405.000
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	253.100.000	253.100.000
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	151.600.000	88.749.500
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	69.400.000	56.249.500
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	82.200.000	32.500.000
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	121.450.578.462	92.524.825.650
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.304.221.811	7.226.410.443
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.514.000	20.514.000
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.849.750	11.849.750
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-
1	4	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-
1	4	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-

1	4	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.065.000	5.065.000
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.599.250	3.599.250
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.722.990.115	5.679.781.598
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.963.777.265	4.977.929.948
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	751.701.600	694.340.400
1	4	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.511.250	7.511.250
1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-
1	4	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.590.000	76.240.000
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.590.000	52.240.000
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000	24.000.000
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.561.627	170.553.776
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.970.280	4.970.280
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.949.322	97.952.471
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.420.000	18.420.000
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.799.025	18.799.025
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.423.000	25.412.000
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.387.085	191.142.085
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.387.085	191.142.085
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.756.824	795.756.824
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.487.500	3.487.500
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	656.146.281	656.146.281
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.123.043	136.123.043
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.422.160	292.422.160
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.736.160	120.736.160
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.868.000	12.868.000
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.818.000	158.818.000
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.756.679.358	3.666.376.408
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.291.938.120	270.540.070
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.068.439.840	270.540.070
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	223.498.280	-
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.464.741.238	3.395.836.338

1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	73.446.320	4.541.500
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.391.294.918	3.391.294.838
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.619.836.879	5.673.461.464
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	389.583.500	377.803.500
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	190.640.000	189.800.000
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	126.398.500	125.558.500
1	4	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	72.545.000	62.445.000
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.230.253.379	5.295.657.964
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	282.300.000	116.036.400
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.516.512.500	3.527.627.100
1	4	3	2.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	178.200.000	197.400.000
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	4.253.240.879	1.454.594.464
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	847.991.000	853.798.000
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	847.991.000	853.798.000
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	847.991.000	853.798.000
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	99.921.849.414	75.104.779.335
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	99.921.849.414	75.104.779.335
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	212.679.280	211.827.500
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	99.654.870.854	74.838.664.335
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	54.299.280	54.287.500
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	48.248.961.224	31.665.589.213
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	39.094.900	39.083.100
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.094.900	39.083.100
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.094.900	39.083.100
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	48.039.398.444	31.626.506.113
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.039.398.444	31.626.506.113

2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.039.398.444	31.626.506.113
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	71.897.880	-
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	71.897.880	-
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	71.897.880	-
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	98.570.000	-
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	98.570.000	-
2	10	10	2.01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	98.570.000	-
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.460.153.720	21.121.465.708
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.977.794.327	18.691.606.315
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.656.105.551	15.656.105.551
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.656.105.551	15.656.105.551
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.660.000	186.195.000
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	225.660.000	186.195.000
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.439.500	301.439.500
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.001.880	6.001.880
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254.135.000	254.135.000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.902.620	35.902.620
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.082.643.276	1.835.920.264
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.680.000	49.680.000
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.032.963.276	1.786.240.264
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.946.000	711.946.000
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	656.816.000	656.816.000
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.130.000	55.130.000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.209.063.293	2.156.563.293

1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.647.259.100	1.625.509.100
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	357.625.000	357.625.000
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	715.170.100	693.420.100
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	-
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5.950.000	5.950.000
1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	568.514.000	568.514.000
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	550.594.393	519.844.393
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	84.600.000	60.600.000
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	112.499.900	112.499.900
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	353.494.493	346.744.493
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11.209.800	11.209.800
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	11.209.800	11.209.800
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	273.296.100	273.296.100
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	273.296.100	273.296.100
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.499.900	39.499.900
1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	233.796.200	233.796.200
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	-
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.777.154.575	3.822.472.781
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.103.322.823	3.317.052.555
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.515.135	11.675.023
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.749.980	4.649.823
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.634.855	3.534.900
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.130.300	3.490.300
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.304.825.570	2.729.988.525
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.301.220.750	2.726.383.705
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.604.820	3.604.820
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.443.000	28.507.300
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.430.000	28.507.300
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.013.000	-
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.760.090	87.743.957
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.179.947	3.179.947
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.992.490	39.085.342
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.700.000	17.700.000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.412.653	18.768.668
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.475.000	5.010.000
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.623.628	295.100.537
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.873.954	69.830.863
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.749.674	225.269.674
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.155.400	164.037.213
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.351.400	114.053.213
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.804.000	49.984.000
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	673.831.752	505.420.226
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.945.455	24.244.825
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	16.401.630	-
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	84.543.825	24.244.825
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	184.060.226	98.885.451
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9.601.999	-
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	66.441.475	24.357.550
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-

1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	55.488.700	40.884.723
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	16.618.392	16.618.392
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	35.909.660	17.024.786
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	386.010.350	382.289.950
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	94.528.200	90.498.200
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	136.900.000	217.870.000
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	149.332.150	73.921.750
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5.250.000	-
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.815.721	-
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.815.721	-
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.522.413.857	11.297.207.835
					DINAS SOSIAL		
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.407.442.626	6.864.815.199
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.178.000	21.078.000
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.049.000	6.949.000
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.150.000	1.150.000
1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.150.000	1.150.000
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.079.000	6.079.000
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.750.000	5.750.000
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.418.324.856	5.082.607.617
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.014.224.856	4.766.882.617
1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	389.160.000	302.780.000
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.940.000	12.945.000
1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.150.000	-
1	6	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.150.000	-
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.600.000	41.110.000
1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.600.000	41.110.000
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	-
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.368.058	473.374.248
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.987.360	48.540.550
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.238.873	125.238.873

1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119.999.825	119.999.825
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.000.000
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.000.000	84.000.000
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.842.000	58.595.000
1	6	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.300.000	33.000.000
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.337.715	106.882.690
1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.337.715	106.882.690
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.191.997	772.470.644
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000	20.000.000
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.411.597	290.840.244
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.150.000	-
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.630.400	461.630.400
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.292.000	367.292.000
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.412.000	255.412.000
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.880.000	111.880.000
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.739.012.731	1.521.554.266
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.739.012.731	1.521.554.266
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	569.586.285	461.030.285
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	414.902.591	395.702.591
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	679.419.890	601.481.390
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	63.633.965	63.340.000
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	11.470.000	-
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	42.443.000	12.243.000
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	42.443.000	12.243.000
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	42.443.000	12.243.000
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.566.981.600	1.409.005.600

1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	870.404.800	764.328.800
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	657.454.800	559.328.800
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	175.460.000	167.510.000
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-	-
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	37.490.000	37.490.000
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	696.576.800	644.676.800
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	391.750.000	339.850.000
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	304.826.800	304.826.800
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.315.115.400	1.118.565.270
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.315.115.400	1.118.565.270
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	48.565.400	12.750.000
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.266.550.000	1.105.815.270
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	412.006.000	333.991.000
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	412.006.000	333.991.000
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	153.100.000	84.495.000
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	110.600.000	95.600.000
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	80.100.000	68.100.000
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	-	-
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	68.206.000	85.796.000
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	-
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	39.412.500	37.033.500
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.412.500	37.033.500
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.412.500	37.033.500
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

2	8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.371.480.161	6.135.636.536
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.226.610.827	5.425.136.267
2	8	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.296.270	51.296.270
2	8	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.173.765	32.173.765
2	8	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.402.755	10.402.755
2	8	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.719.750	8.719.750
2	8	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.470.224.492	4.851.265.758
2	8	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.112.034.842	4.493.076.108
2	8	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340.429.800	340.429.800
2	8	1	2.02	4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.759.850	17.759.850
2	8	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.640.000	53.640.000
2	8	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.640.000	40.640.000
2	8	1	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000	13.000.000
2	8	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.334.089	212.179.089
2	8	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.944.895	4.944.895
2	8	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.285.433	60.285.433
2	8	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.981.412	11.981.412
2	8	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.322.349	53.322.349
2	8	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000
2	8	1	2.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.500.000	24.500.000
2	8	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.700.000	53.545.000
2	8	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.656.100	31.656.100
2	8	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.656.100	31.656.100
2	8	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.860.000	34.860.000
2	8	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000	10.800.000
2	8	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.060.000	24.060.000
2	8	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.599.876	190.239.050
2	8	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.399.876	148.039.050
2	8	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.200.000	42.200.000

2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	143.427.250	105.888.000
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52.027.250	52.027.250
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-	-
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	52.027.250	52.027.250
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.400.000	53.860.750
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	91.400.000	53.860.750
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	585.641.484	233.918.484
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	380.223.000	28.500.000
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000	28.500.000
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	351.723.000	-
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.418.484	205.418.484
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	205.418.484	205.418.484
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3.500.000	-
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	-
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	3.500.000	-
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	332.279.010	332.279.010
2	8	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	332.279.010	332.279.010
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	332.279.010	332.279.010
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-

2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	80.021.590	38.414.775
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.414.775	38.414.775
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.414.775	38.414.775
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.606.815	-
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.606.815	-
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	247.713.924	136.182.975
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	247.713.924	136.182.975
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.713.924	136.182.975
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	162.088.600	136.182.975
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	85.625.324	-
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.392.858.838	4.354.188.510
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	165.750.245	165.750.245
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24.710.520	24.710.520
2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	-	-

2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	-
2	14	2	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	24.710.520	24.710.520
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.039.725	141.039.725
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	-	-
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	110.219.275	110.219.275
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	30.820.450	30.820.450
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.298.808.488	3.260.138.160
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.911.491.400	1.911.491.400
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	176.030.000	176.030.000
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	445.686.000	445.686.000
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.289.775.400	1.289.775.400
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.387.317.088	1.348.646.760
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.239.363.000	1.239.363.000
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	109.283.760	109.283.760
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	38.670.328	-
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	928.300.105	928.300.105
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	928.300.105	928.300.105
2	14	4	2.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	-	-
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16.500.000	16.500.000

2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68.947.000	68.947.000
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	99.853.105	99.853.105
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	743.000.000	743.000.000
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	-
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.142.863.152	10.830.300.834
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.748.855.833	10.420.510.199
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.527.950	37.137.850
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.406.150	15.516.050
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.121.800	21.621.800
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.648.692.482	8.734.819.095
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.640.632.632	8.734.819.095
2	9	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.059.850	-
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.425.000	64.000.000
2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.930.000	45.310.000
2	9	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.495.000	3.690.000
2	9	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	15.000.000
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.801.974	265.428.159
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.768.000	13.268.000
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.856.474	88.650.639
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.469.200	56.269.200

2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.810.000	7.810.000
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.252.300	46.677.320
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.900.000	5.900.000
2	9	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	-	-
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.346.000	31.553.000
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-
2	9	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.400.000	15.300.000
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	356.125.483	127.968.735
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	45.946.125	45.237.000
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.151.735	82.731.735
2	9	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.027.623	-
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.170.033.600	1.094.613.600
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	7.200.000
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.300.000	393.300.000
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	763.533.600	694.113.600
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.249.344	96.542.760
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.711.344	44.270.760
2	9	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	800	-
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.872.000	18.236.000
2	9	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	35.046.000	34.036.000
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.820.000	-
2	9	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-	-
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.189.778.964	241.421.985
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	120.325.480	116.807.480
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9.920.250	8.952.250
2	9	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6.959.350	4.959.350
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	103.445.880	102.895.880
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	963.433.564	21.786.585
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	963.433.564	21.786.585

2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	106.019.920	102.827.920
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	34.311.270	32.969.270
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	71.708.650	69.858.650
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	140.605.650	133.957.650
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.605.650	133.957.650
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30.758.650	24.950.650
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.847.000	109.007.000
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	63.622.705	34.411.000
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	63.622.705	34.411.000
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.943.325	1.000.000
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	51.679.380	33.411.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.246.621.160	712.689.572
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	72.797.784	46.065.250
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	46.485.250	46.065.250
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-	-
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	46.485.250	46.065.250
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.312.534	-
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	26.312.534	-
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	-	-
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.045.133.540	622.614.942
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	58.613.493	56.666.493
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	58.613.493	56.666.493
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	986.520.047	565.948.449
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	986.520.047	565.948.449

3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	128.689.836	44.009.380
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	128.689.836	44.009.380
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	128.689.836	44.009.380
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5.767.884.308	2.584.280.979
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.045.593.732	1.319.906.617
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	572.420.395	206.526.805
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14.107.062	-
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	558.313.333	206.526.805
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.254.572.227	904.223.152
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	633.279.502	609.610.227
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	621.292.725	294.612.925
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	194.990.200	192.346.000
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	194.990.200	192.346.000
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.610.910	16.810.660
3	27	2	2.05	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	-	-
3	27	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.100.000	1.300.000
3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20.510.910	15.510.660
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.489.268.045	318.080.000
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.489.268.045	318.080.000
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	70.510.000	-
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	194.179.000	-
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	423.837.450	198.240.000
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	800.741.595	119.840.000
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.988.947.275	854.867.755
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.837.700	20.837.700
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	20.837.700	20.837.700

3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	242.879.665	16.533.765
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	242.879.665	16.533.765
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.655.699.910	765.466.290
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	995.092.058	491.744.390
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	14.246.125	11.436.125
3	27	4	2.04	3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	646.361.727	262.285.775
3	27	4	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	69.530.000	52.030.000
3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	69.530.000	52.030.000
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	244.075.256	91.426.607
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	244.075.256	91.426.607
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	166.982.950	79.848.678
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	77.092.306	11.577.929
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	67.877.769.907	62.272.649.028
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.552.342.008	16.016.454.472
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.226.500	140.194.114
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.750.000	28.951.900
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.000.000	18.271.450
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	16.122.000
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.788.900	21.990.800
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.000.000	19.986.564
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.337.600	15.809.500
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.350.000	19.061.900
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.652.140.569	12.520.537.819
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.935.860.619	11.935.860.619
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	691.080.000	562.790.000
2	11	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.288.400	2.728.400
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.194.050	2.194.050
2	11	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.522.000	7.022.000

2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.573.800	9.131.900
2	11	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.621.700	81.085
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.495.000	74.720.800
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.460.000	63.220.000
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.035.000	11.500.800
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	666.307.821	595.636.525
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.483.975	39.421.375
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.097.894	147.257.894
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.498.757	44.462.389
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.250.000	70.450.000
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	292.854.675	275.484.675
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.913.520	7.920.000
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.209.000	10.640.192
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.226.133	301.799.280
2	11	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.819.000	-
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.407.133	301.799.280
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.099.667.751	1.718.734.200
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.650.000	26.650.000
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.259.096	325.428.920
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.907.800	8.560.800
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.612.850.855	1.358.094.480
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.278.234	664.831.734
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.856.000	165.189.500
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.140.234	107.140.234
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	267.650.000	276.710.000
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.632.000	115.792.000
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	5.000.000
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000	5.000.000
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	10.000.000	5.000.000

2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.857.389.475	751.974.799
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	873.779.837	426.400.034
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	604.083.682	183.224.879
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	269.696.155	243.175.155
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	983.609.638	325.574.765
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	76.806.270	82.956.270
2	11	3	2.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	860.303.368	217.718.495
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	46.500.000	24.900.000
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	132.370.000	107.370.000
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	132.370.000	107.370.000
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.000.000	-
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	107.370.000	107.370.000
2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	96.937.500	95.278.700
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96.937.500	95.278.700
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31.562.700	31.562.700
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.974.800	1.500.000
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	35.400.000	62.216.000
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	82.189.600	82.349.600
2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	41.094.800	41.174.800
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	41.094.800	41.174.800
2	11	7	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	41.094.800	41.174.800

2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	41.094.800	41.174.800
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.983.287.371	2.498.730.651
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.983.287.371	2.498.730.651
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	157.376.755	111.664.715
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2.825.910.616	2.387.065.936
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	427.085.397	218.302.681
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	427.085.397	218.302.681
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	427.085.397	218.302.681
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	49.573.300	43.542.000
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	49.573.300	43.542.000
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	49.573.300	43.542.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	45.686.595.256	42.453.646.125
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	45.686.595.256	42.453.646.125
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	72.900.000	37.175.000
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3.288.527.352	3.007.279.990
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.828.464.790	9.487.321.456
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	11.162.801.223	10.852.039.086
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	19.973.401.891	18.910.180.598
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	360.500.000	159.649.995
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.342.176.734	12.532.125.301
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.066.146.855	11.885.990.126
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.978.884	174.184.783
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.259.045	8.659.045

2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.120.439	4.976.338
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.799.500	17.999.500
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.799.900	142.549.900
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.832.261.266	7.430.024.833
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.389.231.366	7.149.829.933
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	440.580.000	277.745.000
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.449.900	2.449.900
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.360.000	125.079.333
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91.460.000	86.430.000
2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.900.000	5.000.000
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	33.649.333
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.038.713	1.542.524.795
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.888	9.999.888
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.615.755	1.304.483.087
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.075.000	37.075.000
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.774	29.999.774
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000	9.500.000
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.848.296	151.467.046
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.435.101.570	1.245.990.370
2	12	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	801.039.921	801.039.921
2	12	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	634.061.649	444.950.449
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.221.350.022	1.280.880.412
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.499.800	39.901.980
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.999.000	31.999.000
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.070.000	-
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.132.781.222	1.208.979.432
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.056.400	87.305.600
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.625.600	62.625.600
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.430.800	24.680.000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.472.427.734	101.676.404
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	82.599.000	56.569.404

2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	48.899.500	42.449.500
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	33.699.500	12.119.904
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	2.000.000
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	1.107.098.292	6.607.000
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	1.107.098.292	6.607.000
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	282.730.442	38.500.000
2	12	2	2.03	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	204.451.210	38.500.000
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	78.279.232	-
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	507.586.738	312.595.518
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	241.795.518	213.445.518
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.650.618	23.650.618
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	216.144.900	189.794.900
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	130.250.000	40.400.000
2	12	3	2.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	10.000.000	-
2	12	3	2.02	3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	44.850.000	37.900.000
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	75.400.000	2.500.000
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	135.541.220	58.750.000
2	12	3	2.03	3	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	71.900.000	58.750.000
2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	63.641.220	-
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	276.892.474	218.440.320
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	113.985.280	100.385.280
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	113.985.280	100.385.280
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162.907.194	118.055.040
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.404.940	81.404.940

2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30.258.454	-
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	51.243.800	36.650.100
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	19.122.933	13.422.933
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	19.122.933	13.422.933
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.853.783	2.853.783
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	16.269.150	10.569.150
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	45.924.306.763	42.360.866.306
					DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.127.901.067	13.033.847.022
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.469.080	21.489.080
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.672.151	9.892.151
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.599.600	5.599.600
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.197.329	5.997.329
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.207.816.475	10.387.235.118
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.626.010.267	10.016.008.910
2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	564.780.000	357.000.000
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.026.208	14.226.208
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.480.000	123.480.000
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	168.480.000	123.480.000
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	-
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.203.497.118	1.194.472.330
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.378.633	17.378.633
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335.163.433	335.163.433
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	286.171.042	327.107.254
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449.931.010	460.931.010
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.240.000
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.900.000	4.452.000
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.953.000	2.200.000
2	15	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	38.000.000	38.000.000
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.014.956	65.195.956

2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.819.000	-
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	65.195.956	65.195.956
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.245.122	437.695.122
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000	6.275.000
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.510.322	264.535.322
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.500.000	-
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.734.800	166.884.800
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.378.316	804.279.416
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.750.000	38.750.000
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	568.281.916	542.281.916
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.909.400	125.909.400
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.938.000	82.938.000
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.499.000	14.400.100
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30.927.669.516	28.460.782.854
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	26.549.703.045	24.642.386.145
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.184.103.745	21.984.103.745
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.535.192.030	827.875.130
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-	-
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.830.407.270	1.830.407.270
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.655.839.063	1.430.318.101
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.655.839.063	1.430.318.101
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	503.670.508	503.670.508
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	425.636.927	425.636.927
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78.033.581	78.033.581
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.064.746.000	1.051.096.000
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100.950.000	-

2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	865.696.000	952.996.000
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	98.100.000	98.100.000
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.153.710.900	833.312.100
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.084.750.700	764.351.900
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	68.960.200	68.960.200
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	868.736.180	866.236.430
2	15	3	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	868.736.180	866.236.430
2	15	3	2.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-
2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	561.494.100	558.994.350
2	15	3	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	307.242.080	307.242.080
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.020.662.127	8.400.737.542
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.617.781.273	5.406.534.764
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.257.091	23.984.840
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.099.010	7.099.010
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.800.000	1.800.000
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.300.000	3.300.000
2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.300.000	1.300.000
2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.300.000	1.300.000
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.928.230	4.703.230
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.529.851	4.482.600
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.428.783.576	4.886.332.899
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.923.085.946	4.435.622.236
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.910.762	209.250.762
2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	316.620.000	235.650.000
2	16	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.180.000	1.180.000
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.098.967	900
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.887.901	3.729.901
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.680.000	61.600.000

2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.680.000	51.600.000
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	10.000.000
2	16	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.978.654	209.343.087
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.137.061	8.172.594
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.940.346	154.321.696
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.777.247	29.957.797
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.200.000	8.880.000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.924.000	8.011.000
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.864.452	15.391.938
2	16	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	76.705.781	-
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.243.921	15.391.938
2	16	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	21.914.750	-
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.596.000	135.596.000
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000	7.500.000
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.207.600	36.207.600
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.888.400	91.888.400
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.621.500	74.286.000
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.532.000	32.866.000
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.250.000	41.420.000
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.839.500	-
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.000.189.814	608.645.094
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.000.189.814	608.645.094
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	428.365.500	310.930.700
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	102.537.920	36.756.145
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	114.189.850	114.189.850
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	109.980.500	62.980.500

2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	125.528.145	-
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	40.295.999	24.895.999
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	79.291.900	58.891.900
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.402.691.040	2.385.557.684
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.041.870.627	390.947.854
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	129.531.990	111.020.640
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	912.338.637	279.927.214
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.360.820.413	1.994.609.830
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.600.000	5.600.000
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.510.144.925	1.462.282.840
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	291.080.000	130.440.000
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	68.839.800	3.999.800
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	385.153.350	334.537.190
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10.000.000	5.000.000
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	86.002.338	52.750.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	559.708.964	461.510.813
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	559.708.964	461.510.813
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	559.708.964	461.510.813
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	130.772.845	104.074.345
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30.808.936	-
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	41.850.000	41.850.000
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	71.690.000	71.690.000
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	-	-
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	284.587.183	243.896.468
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	246.785.480	206.565.480
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	246.785.480	206.565.480
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	246.785.480	206.565.480
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.991.800	19.991.800

2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.990.000	43.190.000
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	92.903.680	90.903.680
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.900.000	52.480.000
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.689.537.464	10.015.622.955
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.976.570.741	9.388.841.478
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.134.800	2.430.000
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.860.000	1.980.000
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.336.000	-
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.336.000	-
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.872.000	450
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.308	-
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.010.352.093	8.578.397.197
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.531.311.093	8.277.617.197
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	478.480.000	300.780.000
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	561	-
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.860.000	38.302.000
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.860.000	38.302.000
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.181.381	145.966.271
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	3.254.371
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.822.654	61.861.500
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.500.000	6.500.000
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.920.000	29.110.000
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.118.775	33.480.400
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.760.000	11.760.000
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.059.952	-
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.504.019	17.522.797

2	17	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
2	17	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.504.019	17.522.797
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.938.400	420.105.013
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.600.000	338.766.613
2	17	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.338.400	81.338.400
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.600.048	186.118.200
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.312.000	27.312.000
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.313.600	3.235.200
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.520.000	69.280.000
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.454.448	86.291.000
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.760.100	-
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.760.100	-
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.760.100	-
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	55.496.802	16.846.838
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	55.496.802	16.846.838
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.616.000	-
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.880.802	16.846.838
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	3.668.091	-
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.668.091	-
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.668.091	-
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	394.448.639	394.448.639
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	394.448.639	394.448.639
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	394.448.639	394.448.639
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.823.091	-

2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.823.091	-
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8.823.091	-
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	16.770.000	14.700.000
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	16.770.000	14.700.000
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	16.770.000	14.700.000
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	231.000.000	200.786.000
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	231.000.000	200.786.000
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	231.000.000	200.786.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.881.849.901	2.653.017.822
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	75.019.752	38.940.000
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-
3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-
3	30	2	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75.019.752	38.940.000
3	30	2	2.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	75.019.752	38.940.000
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.328.693.140	2.171.269.341
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.994.897.040	2.006.889.400
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	647.725.040	659.717.400
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.347.172.000	1.347.172.000
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	333.796.100	164.379.941
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	119.346.100	36.198.200

3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	214.450.000	128.181.741
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.788.450	86.963.300
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6.900.000	6.900.000
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.900.000	6.900.000
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	68.888.450	80.063.300
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	62.744.450	73.979.300
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6.144.000	6.084.000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	32.674.769	-
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.674.769	-
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	32.674.769	-
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	-	-
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	360.323.690	355.845.181
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	360.323.690	355.845.181
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	360.323.690	355.845.181
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	9.350.100	-
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	9.350.100	-
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9.350.100	-
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	415.277.482	173.956.250
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	405.636.882	170.755.250
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	405.636.882	170.755.250
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	40.905.030	38.473.350
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	232.437.500	-
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	77.690.000	77.690.000
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	54.604.352	54.591.900
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	3.201.000	3.201.000
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.201.000	3.201.000

3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.201.000	3.201.000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	6.439.600	-
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	6.439.600	-
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6.439.600	-
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	606.247.096	388.878.785
					DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	241.735.544	217.874.208
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	224.594.208	217.874.208
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	224.594.208	217.874.208
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.141.336	-
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.141.336	-
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	172.269.110	2.700.600
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	27.914.110	2.700.600
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	27.914.110	2.700.600
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	144.355.000	-
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	-
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	144.355.000	-
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	192.242.442	168.303.977
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.329.822	62.874.467
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	22.880.360	11.425.005
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	51.449.462	51.449.462
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	117.912.620	105.429.510
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.962.620	12.479.510
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	92.950.000	92.950.000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.890.065.932	9.392.830.057
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.057.594.783	8.786.908.435
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.300.000	25.300.000

2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.600.000	15.600.000
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	4.500.000
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000	5.200.000
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.204.378.983	8.087.260.018
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.712.249.783	7.734.060.918
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	474.129.200	337.199.200
2	18	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.000.000	15.999.900
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.680.000	69.260.000
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.680.000	69.260.000
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.844.539	311.373.394
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.199.435	5.199.435
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.449.770	4.636.625
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	169.335.434	168.915.434
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.700.000	62.700.000
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.648.900	60.858.900
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.338.000	9.063.000
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.173.000	-
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	37.060.920
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	-	16.729.900
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	20.331.020
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.479.168	213.884.908
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.740.000	4.740.000
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.007.544	106.007.544
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.731.624	103.137.364
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.912.093	42.769.195
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.366.500	5.934.200
2	18	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.790.000	21.470.000
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.755.593	15.364.995
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	102.654.000	73.004.000

2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	102.654.000	73.004.000
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	89.850.000	61.200.000
2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	12.804.000	11.804.000
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	38.430.000	21.610.000
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.430.000	21.610.000
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38.430.000	21.610.000
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	237.748.200	104.391.200
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	237.748.200	104.391.200
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.668.000	15.501.000
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	193.300.200	70.110.200
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9.480.000	9.480.000
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9.300.000	9.300.000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	349.697.599	335.499.699
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	349.697.599	335.499.699
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.800.000	49.800.000
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.772.999	185.772.999
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	114.124.600	99.926.700
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	103.941.350	71.416.723
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.941.350	71.416.723
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	103.941.350	71.416.723
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.290.941.561	12.074.500.245
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		

2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.984.544.808	8.425.428.046
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.900.000	22.400.000
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.200.000	11.700.000
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.100.000	8.100.000
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	2.600.000
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.726.793.683	7.289.920.426
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.301.411.933	6.929.088.676
2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	419.081.650	354.531.650
2	19	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.300.100	6.300.100
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.130.000	69.710.000
2	19	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.130.000	57.710.000
2	19	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000	12.000.000
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.939.725	579.716.220
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.326.295	9.326.295
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.754.575	152.643.250
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.792.704	182.602.824
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.786.151	151.863.851
2	19	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.920.000	13.920.000
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.360.000	69.360.000
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.217.400	283.117.400
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.575.000	8.475.000
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.580.000	117.580.000
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.062.400	157.062.400
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.564.000	180.564.000
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.924.000	44.924.000
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.680.000	59.680.000
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.960.000	75.960.000
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.877.456.865	1.398.376.868
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	579.724.760	150.390.563
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	88.170.000	30.215.500

2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	352.434.760	61.501.063
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	66.075.000	-
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	73.045.000	58.674.000
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.297.732.105	1.247.986.305
2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	-
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.297.732.105	1.247.986.305
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.342.015.558	2.163.771.001
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	848.390.000	86.900.000
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	451.600.000	44.025.000
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	396.790.000	42.875.000
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	332.920.000	-
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	332.920.000	-
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	-	-
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.160.705.558	2.076.871.001
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	497.990.147	-
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2.662.715.411	2.076.871.001
2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	-	-
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	86.924.330	86.924.330
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	86.924.330	86.924.330
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	86.924.330	86.924.330
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.016.918.212	1.059.771.948
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	685.488.702	193.602.265
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	373.258.770	193.602.265
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	329.128.370	150.476.865
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	44.130.400	43.125.400

3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	312.229.932	-
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	46.863.995	-
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	265.365.937	-
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	464.320.000	245.838.200
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	464.320.000	245.838.200
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	121.310.000	98.330.000
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	343.010.000	147.508.200
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	867.109.510	620.331.483
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	867.109.510	620.331.483
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	-	-
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	126.904.897	62.516.794
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	678.647.425	496.257.501
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	61.557.188	61.557.188
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.213.522.332	8.444.097.984
					DINAS PERPUSTAKAAN		
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.458.732.684	7.947.015.246
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.320.000	13.611.500
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.800.000	8.091.500
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.270.000	2.270.000
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.250.000	3.250.000
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.650.242.566	6.544.805.948
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.353.972.566	6.359.253.748
2	23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	285.780.000	177.580.000
2	23	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.490.000	7.972.200
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.889.000	32.910.000

2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.330.000	32.910.000
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.559.000	-
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.960.874	171.809.819
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.641.520	12.639.376
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.821.823	48.277.768
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.029.256	20.029.256
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.440.000	21.440.000
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.153.275	49.153.275
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	10.255.000
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.400.000	-
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.475.000	10.015.144
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.990.299	166.692.700
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.990.299	166.692.700
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.169.945	739.188.695
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.080.000	4.080.000
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.886.345	153.430.095
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.504.000	1.704.000
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	707.699.600	579.974.600
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.160.000	277.996.584
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.440.000	58.440.000
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.760.000	63.360.000
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.960.000	156.196.584
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	754.789.648	497.082.738
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	498.075.728	335.881.918
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.801.524	34.697.020
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.955.000	59.955.000
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	25.130.000	-
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	346.189.204	241.229.898
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.713.920	161.200.820
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	186.548.620	96.414.820

2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	70.165.300	64.786.000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	209.094.640	101.269.800
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	204.614.640	101.269.800
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	92.945.740	7.789.800
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	76.225.740	5.649.800
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	16.720.000	2.140.000
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	58.630.000	58.630.000
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	58.630.000	58.630.000
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	53.038.900	34.850.000
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	53.038.900	34.850.000
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	4.480.000	-
2	24	3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	4.480.000	-
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	4.480.000	-
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH	60.185.952.440	55.091.604.206
					SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.426.130.712	41.048.434.924
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.643.696	119.641.074
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.742.996	45.740.374
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.999.900	49.999.900
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.900.800	23.900.800
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.834.591.052	21.854.441.843
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.449.450.266	20.647.957.335
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.363.001.010	1.184.344.732
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.139.776	22.139.776
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.500.000	20.500.000
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.500.000	20.500.000
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	486.739.700	499.239.700
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	243.840.000	196.340.000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26.000.000	21.200.000
4	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.399.850	23.199.850
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.000.000	14.000.000
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000	24.000.000

4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.499.850	52.499.850
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	108.000.000	168.000.000
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.163.498.301	3.183.946.615
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.773.660	191.689.264
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180.104.037	180.104.037
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	355.350.000	355.350.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	299.999.865	285.528.575
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.846.248.739	1.743.266.739
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.022.000	378.008.000
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.113.744.025	1.527.810.575
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.198.270.000	755.660.000
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	99.311.375	39.858.125
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	816.162.650	732.292.450
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.920.320.050	3.519.039.250
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.220.000	20.220.000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.859.215.650	1.859.215.650
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.481.704.000	1.008.454.000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.180.400	631.149.600
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.505.915.100	2.672.443.350
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	507.860.000	507.860.000
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.218.000	433.938.000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315.901.550	340.701.800
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.291.550	424.299.550
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	905.644.000	965.644.000
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	953.407.098	946.193.625
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	182.951.443	175.737.970
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55.200.000	55.200.000
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	715.255.655	715.255.655

4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	2.531.699.760	3.187.785.260
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.531.699.760	3.187.785.260
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	1.168.773.593	1.049.856.089
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	416.031.558	383.893.054
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	392.494.538	375.515.538
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	67.066.145	44.316.145
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	85.704.303	62.954.303
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	207.477.049	183.177.049
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.607.298.337	2.467.537.543
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	647.871.539	542.501.503
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	954.514.892	922.563.680
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.004.911.906	1.002.472.360
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.681.983.152	10.629.334.452
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	6.801.075.615	6.456.223.615
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	5.497.349.903	5.246.665.903
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	96.440.270	108.918.270
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.207.285.442	1.100.639.442
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.327.937.354	2.776.172.354
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.583.063.464	1.033.298.464
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	490.661.974	489.661.974
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.254.211.916	1.253.211.916
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.357.248.940	1.238.215.240
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	592.624.056	577.129.056
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	460.966.954	400.752.954
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	303.657.930	260.333.230
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	195.721.243	158.723.243
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	195.721.243	158.723.243
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.077.838.576	3.413.834.830
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.675.712.311	1.307.142.311
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	458.496.100	423.246.100
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	627.802.398	455.508.398

4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	238.762.613	194.376.613
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	49.829.100	49.829.100
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	300.822.100	184.182.100
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.245.110.210	899.976.464
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	768.012.726	644.111.476
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	165.440.496	-
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	311.656.988	255.864.988
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.025.622.774	1.085.233.774
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250.999.746	181.148.746
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	486.155.704	451.516.704
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.288.467.324	452.568.324
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	131.393.281	121.482.281
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	111.263.801	101.352.801
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	20.129.480	20.129.480
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	2				SEKRETARIAT DPRD	53.049.245.828	44.972.108.057
					SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.553.766.318	37.837.370.547
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.757.406	7.757.406
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.693	1.999.693
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.757.720	2.757.720
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.993	2.999.993
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.838.152.197	5.698.770.705
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.210.144.922	5.192.004.690
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.600.000	65.600.000
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	561.028.360	439.787.100
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.378.915	1.378.915
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.051.545	-
4	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	51.051.545	-
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.172.000	46.000.000
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.000.000	46.000.000

4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102.172.000	-
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.971.233.388	1.443.504.345
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.762.274	65.035.031
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.754.629	144.634.199
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.848.718	76.848.718
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	987.171.667	757.171.667
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174.073.500	138.543.130
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.798.600	75.798.600
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149.937.000	62.744.000
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.887.000	122.729.000
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	864.617.939	362.101.248
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	48.465.800	27.899.500
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	816.152.139	334.201.748
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.490.138.572	2.300.197.772
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.498.984	496.498.984
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.949.963	75.477.988
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.772.689.625	1.728.220.800
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.182.516.200	1.204.449.000
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193.750.000	193.750.000
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.672.000	73.672.000
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	49.000.000	49.000.000
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321.368.000	299.093.000
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	544.726.200	588.934.000
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.466.816.530	26.335.566.530
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.146.566.530	26.146.566.530
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	189.000.000	189.000.000
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	131.250.000	-
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	533.310.541	439.023.541
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	533.310.541	439.023.541
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.495.479.510	7.134.737.510
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	437.727.141	217.327.141

4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.234.815	2.234.815
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11.008.993	11.008.993
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	80.859.000	80.859.000
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	339.904.710	119.504.710
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	3.719.623	3.719.623
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	17.464.000	17.464.000
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	3.338.500	3.338.500
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3.338.500	3.338.500
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	4.110.000	4.110.000
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	3.338.500	3.338.500
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3.338.500	3.338.500
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	55.280.250	55.280.250
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	10.710.000	10.710.000
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10.710.000	10.710.000
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10.710.000	10.710.000
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10.710.000	10.710.000
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.955.000	2.955.000
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9.485.250	9.485.250
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.086.508.321	1.955.883.321
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	2.321.098.000	1.456.473.000
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	464.935.000	264.935.000
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	228.000.000
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	6.475.321	6.475.321
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.767.108.180	2.767.108.180
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.340.000	3.340.000
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	2.763.768.180	2.763.768.180
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	29.969.618	29.969.618
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	3.719.623	3.719.623
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	26.249.995	26.249.995
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	6.101.422.000	2.091.705.000
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.819.842.000	1.760.908.000
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	125.905.000	103.220.000
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	44.760.000	44.760.000

4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.110.915.000	182.817.000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	1				PERENCANAAN	12.184.145.326	9.845.656.616
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.018.163.670	8.264.372.956
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.337.392	70.785.920
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.183.177	23.204.195
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.790.770	3.790.770
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.766.170	6.479.925
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.766.170	3.766.170
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.766.170	3.479.925
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.933.515	11.433.515
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.131.420	18.631.420
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.976.661.393	6.821.571.752
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.366.954.113	6.255.858.112
5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.839.900	-
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	567.623.500	526.899.660
5	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.376.000	11.661.000
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.867.880	4.917.880
5	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	12.635.000
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	6.200.100
5	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	3.400.000
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.757.170	29.757.170
5	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.965.800	1.965.800
5	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.990.700	5.990.700
5	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.965.800	1.965.800
5	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.943.900	3.943.900
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.963.790	5.963.790
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.963.590	4.963.590
5	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.963.590	4.963.590
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.769.725	122.250.300

5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	22.800.000	13.800.000
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.970.000	60.038.000
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-
5	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.999.995	5.999.995
5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.999.995	5.999.995
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.000.000	22.400.000
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29.999.735	14.012.310
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	-
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.036.395.076	700.688.582
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.989.577	24.409.146
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.358.192	207.217.000
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.115.307	188.181.279
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.000.000	49.000.000
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	14.205.000
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.730.000	66.188.000
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.557.000	28.246.507
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000	3.000.000
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.645.000	120.241.650
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.990.995	19.990.995
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.995	19.990.995
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.689.119	329.385.437
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.178.950	15.000.000
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.214.332	155.661.600
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.801.625	50.309.625
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.494.212	108.414.212
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.562.800	169.942.800
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.252.800	40.252.800
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.400.000	44.560.000
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.910.000	85.130.000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.799.255.201	1.066.952.275

5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	638.938.900	527.026.700
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	237.795.300	162.833.700
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	107.180.800	91.978.400
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	293.962.800	272.214.600
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	635.050.301	216.623.875
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.332.700	-
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	370.320.092	100.200.000
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164.397.509	116.423.875
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	525.266.000	323.301.700
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	294.940.000	196.930.000
5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	132.900.000	44.212.700
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	97.426.000	82.159.000
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.366.726.455	514.331.385
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	484.999.700	119.852.800
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145.100.000	3.820.000
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.999.900	10.899.900
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.700.000	1.100.000
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	45.780.000	26.818.000
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	79.859.900	6.740.000
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.199.900	12.474.900
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.100.000	1.900.000
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	149.260.000	56.100.000

5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	401.224.255	136.318.585
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	179.089.790	36.030.000
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.238.585	19.988.585
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.913.665	5.300.000
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	105.195.240	61.800.000
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.475.240	-
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.744.855	2.000.000
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.133.440	2.700.000
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	13.433.440	8.500.000
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	480.502.500	258.160.000
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171.289.755	140.300.000
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.049.955	4.750.000
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.849.720	5.700.000
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	14.304.720	11.350.000
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	167.647.740	8.260.000
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.411.150	4.200.000
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.849.720	3.350.000
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	99.099.740	80.250.000
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.224.467.060	666.298.875

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.224.467.060	666.298.875
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	304.276.580	190.644.800
5	5	2	2.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	244.286.780	134.525.000
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	59.989.800	56.119.800
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	224.550.980	145.294.875
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	224.550.980	145.294.875
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	389.119.500	175.837.000
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.192.150	84.002.000
5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	99.114.450	9.412.000
5	5	2	2.03	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	74.714.450	68.680.000
5	5	2	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	65.098.450	13.743.000
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	306.520.000	154.522.200
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	225.370.000	131.071.100
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	54.940.000	20.451.000
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	26.210.000	3.000.100
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	2				KEUANGAN	127.724.108.319	104.003.135.401
					BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.565.375.953	25.747.215.334
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.400.000	5.280.000
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.820.000	1.320.000
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.120.000	-
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.820.000	1.320.000
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.820.000	1.320.000
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.820.000	1.320.000
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.371.456.025	21.545.542.235
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.127.526.025	20.396.277.235
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.240.680.000	1.149.265.000

5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.250.000	-
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.190.000	71.150.000
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142.190.000	71.150.000
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	-
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.084.129.108	782.519.189
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.922	19.995.922
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.940.736	311.100.736
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.500.000	201.500.000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	414.548.450	221.922.531
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.000.000	28.000.000
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.144.000	-
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.187.484.200	490.360.600
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	928.470.400	290.206.800
5	2	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	58.860.000	-
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.153.800	200.153.800
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.252.780	1.888.582.780
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.300.000	23.730.000
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	931.595.900	956.595.900
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.543.600	20.543.600
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	927.813.280	887.713.280
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.463.840	963.780.530
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.689.200	346.689.200
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.858.140	253.858.140
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.916.500	363.233.190
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	82.289.713.949	68.257.417.318
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.426.463.855	3.983.232.855
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	366.330.975	492.030.975
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	366.330.975	492.030.975
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	617.210.000	321.470.000

5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	615.960.000	32.220.000
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	142.585.000	148.045.000
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	210.360.000	216.170.000
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	746.238.110	753.117.110
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	935.314.170	842.994.170
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	482.985.825	230.985.825
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	113.849.800	5.799.800
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	262.348.000	45.998.000
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	173.698.000	10.798.000
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	393.253.000	391.573.000
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	887.057.400	211.385.960
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16.010.000	16.010.000
5	2	2	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.587.500	4.675.000
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9.307.500	8.275.000
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	8.587.500	2.175.000
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	93.189.520	11.750.000
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	13.259.900	10.234.900
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27.362.500	23.900.000
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	490.495.000	11.025.000
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	48.254.760	23.875.000
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	87.347.160	16.850.000
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	84.656.060	82.616.060
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.075.911.694	644.627.883
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9.376.929	988.464

5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	187.219.527	41.194.181
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	9.240.654	7.740.654
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	47.562.252	26.362.252
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	153.012.252	149.592.252
5	2	2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	35.926.929	6.726.929
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	134.011.684	109.711.684
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.826.929	2.376.929
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	87.176.929	101.976.929
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	8.276.929	5.976.929
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	146.727.429	71.227.429
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	244.626.322	117.626.322
5	2	2	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	5.926.929	3.126.929
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	74.045.765.000	62.825.824.620
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	74.045.765.000	62.825.824.620
5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	854.516.000	592.346.000
5	2	2	2.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	163.295.000	89.295.000
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	593.305.000	405.435.000
5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	97.916.000	97.616.000
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.647.927.693	6.354.542.137
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.647.927.693	6.354.542.137
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	65.300.000	65.300.000
5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	38.799.800	38.799.800
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	164.299.800	-
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	6.239.699.000	4.270.375.820
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	412.835.000	411.995.000
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.000.000	9.000.000

5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.316.846.517	1.316.846.517
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	243.905.000	242.225.000
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	157.242.576	-
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.221.090.724	3.643.960.612
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.221.090.724	3.643.960.612
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	9.000.000	9.000.000
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	710.680.000	589.550.000
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22.950.000	41.550.000
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	464.252.713	512.568.163
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	40.000.000	94.500.000
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	450.700.000	794.975.000
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	486.774.562	-
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	178.774.310	178.774.310
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	387.763.731	206.923.731
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	-	-
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	584.129.433	565.529.433
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	110.335.975	99.999.975
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	159.990.000	159.990.000
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	615.740.000	390.600.000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	3				KEPEGAWAIAN	15.808.455.240	11.954.989.625
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.668.251.734	9.611.128.042
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.285.000	39.130.000
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.100.000	12.100.000
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.110.000	2.710.000
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.810.000	2.410.000
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.750.000	2.350.000
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.390.000	1.990.000
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.800.000	9.800.000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.325.000	7.770.000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.728.342.112	8.897.491.264

5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.999.865.072	8.240.364.224
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	699.179.040	633.529.040
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.960.000	2.960.000
5	3	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.038.000	5.038.000
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.300.000	15.600.000
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.000.000	37.200.000
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000	37.200.000
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.752.808	331.284.808
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.807.480	10.807.480
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.050.221	180.050.221
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.261.107	107.261.107
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.634.000	21.166.000
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.038.957	121.755.725
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	57.601.005	-
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.937.952	100.855.725
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.500.000	20.900.000
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.059.500	107.657.500
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.970.000	19.157.500
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.960.000	48.900.000
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.510.000	24.600.000
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.619.500	15.000.000
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.773.357	76.608.745
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.508.745	39.508.745
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.629.987	17.000.000
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.634.625	20.100.000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.140.203.506	2.343.861.583
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.022.799.000	54.450.000
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	102.700.000	20.000.000
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	752.138.000	2.750.000
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	38.865.000	3.600.000
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	104.950.000	22.450.000
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	24.146.000	5.650.000

5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	653.921.500	478.862.500
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	162.363.000	119.100.000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	173.997.500	95.244.500
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	317.561.000	264.518.000
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	2.012.082.806	1.128.082.083
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	591.528.480	260.062.000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	157.225.413	800
5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	51.727.433	51.727.433
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	764.164.000	550.115.150
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	193.608.000	64.230.000
5	3	2	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	141.879.980	96.517.000
5	3	2	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	3.990.000	-
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	102.229.000	98.900.000
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2.000.000	2.000.000
5	3	2	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	3.730.500	3.730.500
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.451.400.200	682.467.000
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125.740.000	45.370.000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	477.213.000	212.890.000
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	16.500.000	3.980.000
5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	391.456.200	50.000.000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	352.141.000	281.877.000
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	88.350.000	88.350.000
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.561.993.957	4.031.955.099
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.561.993.957	4.031.955.099
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.561.993.957	4.031.955.099
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.472.856.249	4.031.955.099
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	89.137.708	-
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	1				INSPEKTORAT DAERAH	10.479.367.486	9.465.736.210
					INSPEKTORAT DAERAH		

6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.347.135.286	8.775.276.230
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.089.575	15.089.575
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.999.950	6.999.950
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	99.995	99.995
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99.995	99.995
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.089.775	3.089.775
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.950	2.999.950
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.389.895.243	8.046.726.629
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.387.835.318	8.044.666.704
6	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.059.925	2.059.925
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	60.000.000
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	60.000.000
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.109.843	240.981.593
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.995.070	5.995.070
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.978.953	84.978.953
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.003.070	12.003.070
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.650.000	61.650.000
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.395.750	60.354.500
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	16.000.000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.087.000	-
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.841.625	51.841.625
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	51.841.625	51.841.625
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.862.000	251.339.808
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600	-
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.412.000	35.412.000
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.991.600	3.150.000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263.858.400	212.777.808

6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.337.000	109.297.000
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.142.000	36.144.000
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.190.000	56.148.000
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.005.000	17.005.000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	315.536.200	26.340.000
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	307.096.200	17.900.000
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	194.450.000	2.450.000
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.450.000	-
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	7.725.000	7.725.000
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	7.725.000	7.725.000
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	73.146.200	-
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	21.600.000	-
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8.440.000	8.440.000
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2.000.000	2.000.000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.440.000	6.440.000
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	816.696.000	664.119.980
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	323.420.000	280.443.980
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.300.000	2.300.000
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	321.120.000	278.143.980
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	493.276.000	383.676.000
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2.600.000	-
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	148.876.000	148.876.000
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	223.900.000	232.900.000
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	117.900.000	1.900.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	10.036.670.404	8.279.341.625

					KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.305.985.726	7.822.156.735
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.524.155	11.193.435
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.124.800	-
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.309.765	5.309.765
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.199.880	3.199.880
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.109.945	2.683.790
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.779.765	-
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.398.687.828	7.143.086.015
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.684.563.238	6.614.646.015
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	692.920.000	509.840.000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.379.990	-
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.548	-
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.600.000	18.600.000
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.698	-
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.509.900	-
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.509.900	-
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.830.000	79.980.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.830.000	79.980.000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.031.410	134.522.885
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.913	7.998.913
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.388.243	61.803.718
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.199.937	7.199.937
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.540.000	36.540.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.317	19.000.317
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.924.000	-
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.930.000	53.930.000
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.930.000	53.930.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	-
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.824.433	294.166.400
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.807.593	69.864.160
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.016.840	224.302.240

7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.648.000	105.278.000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.848.000	64.848.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	35.630.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.800.000	4.800.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	186.213.150	97.923.400
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	139.913.250	81.253.300
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	139.913.250	81.253.300
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	46.299.900	16.670.100
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.299.900	16.670.100
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.144.188	50.149.400
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.050.000	26.050.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.050.000	26.050.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	69.094.188	24.099.400
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	69.094.188	24.099.400
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	127.466.447	111.996.447
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	127.466.447	111.996.447
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	127.466.447	111.996.447
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	311.860.893	197.115.643
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	311.860.893	197.115.643
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	311.860.893	197.115.643
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	410.137.345	291.466.198
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.546.880	186.110.198
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.990.225	-
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.990.225	-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.318.715	31.311.480

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.369.490	4.852.125
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.259.351	20.562.156
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.510.163	1.590.824
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.199.711	3.811.375
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	495
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.802.150	141.826.293
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.596.790	23.620.933
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.205.360	118.205.360
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.435.790	12.972.425
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.440.800	12.274.400
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.994.990	698.025
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.300.450	7.200.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19.300.450	7.200.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.300.450	7.200.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.934.015	36.131.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	78.934.015	36.131.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.006.000	30.196.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47.928.015	5.935.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.666.000	54.340.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	64.666.000	54.340.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	64.666.000	54.340.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.690.000	7.685.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.690.000	7.685.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	28.690.000	7.685.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	423.030.254	301.059.812
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.487.158	185.138.140
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.490.225	-
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.490.225	-

7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.746.651	33.257.543
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.740	2.472.030
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.258.092	19.794.086
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.509.707	5.189.707
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.999.112	5.306.720
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	495
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.556.724	140.498.569
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.952.484	20.894.329
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.604.240	119.604.240
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.693.558	11.382.028
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.697.728	9.382.218
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.995.830	1.999.810
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.120.450	15.120.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19.120.450	15.120.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.120.450	15.120.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.449.291	38.274.117
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	85.449.291	38.274.117
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.530.829	30.530.829
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.918.462	7.743.288
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.145.800	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	61.145.800	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	61.145.800	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.827.555	12.527.555
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.827.555	12.527.555
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32.827.555	12.527.555
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	423.619.536	301.498.227
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	235.938.964	206.759.624
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.055.225	1.426.545

7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.055.225	1.426.545
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.022.133	46.838.458
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.998.328	3.474.653
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.499.086	27.499.086
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.001.122	6.001.122
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.543.597	8.543.597
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.320.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.373.016	145.038.430
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.768.776	25.434.190
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.604.240	119.604.240
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.488.590	13.456.191
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.493.600	7.461.201
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.994.990	5.994.990
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.470.225	7.652.990
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18.470.225	7.652.990
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.470.225	7.652.990
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	89.515.347	33.855.613
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	89.515.347	33.855.613
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.332.791	23.332.791
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66.182.556	10.522.822
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63.215.000	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	63.215.000	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	63.215.000	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.480.000	3.230.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.480.000	3.230.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16.480.000	3.230.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	393.761.249	279.280.816
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT		

7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	213.465.869	187.798.048
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.150.225	-
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.150.225	-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.313.527	38.828.527
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.740	3.999.740
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.766.414	22.766.414
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.509.877	5.509.877
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.057.496	6.057.496
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	495
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.005.318	137.580.681
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.401.078	17.976.441
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.604.240	119.604.240
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.996.799	11.388.840
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.999.959	5.392.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.996.840	5.996.840
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.120.450	9.600.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19.120.450	9.600.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.120.450	9.600.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.215.130	24.332.768
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	65.215.130	24.332.768
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.564.605	16.754.605
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47.650.525	7.578.163
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62.359.800	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	62.359.800	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	62.359.800	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.600.000	7.550.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.600.000	7.550.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	33.600.000	7.550.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		

7	1					KECAMATAN	10.965.786.784	9.276.539.829
						KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.353.494.128	8.824.083.695
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.199.900	29.010.000
7	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000	2.905.000
7	1	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.995.000	6.950.000
7	1	1	2.01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.750.000	5.750.000
7	1	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.874.900	5.425.000
7	1	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.980.000	7.980.000
7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.455.298.394	7.344.214.677
7	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.633.898.394	6.522.814.677
7	1	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	801.400.000	801.400.000
7	1	1	2.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.000.000	11.000.000
7	1	1	2.02	6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.500.000	2.500.000
7	1	1	2.02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000
7	1	1	2.02	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.500.000
7	1	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000
7	1	1	2.03	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	1.000.000
7	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.880.000	58.630.000
7	1	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.880.000	49.630.000
7	1	1	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	9.000.000
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.873.339	181.993.939
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.484.420	6.484.420
7	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.050.869	125.050.869
7	1	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.981.600	12.549.600
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.350.000	15.350.000
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.668.450	13.919.050
7	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000	8.640.000
7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.698.000	-
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.281.831	-
7	1	1	2.07	5		Pengadaan Mebel	76.767.058	-
7	1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.514.773	-
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.831.200	1.140.786.579
7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.958.800	237.914.179

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	902.872.400	902.872.400
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.129.464	68.448.500
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.246.400	44.246.400
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.883.064	24.202.100
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	118.291.320	77.505.820
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	106.270.920	71.510.920
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	106.270.920	71.510.920
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12.020.400	5.994.900
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.020.400	5.994.900
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.428.581	55.457.861
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.933.681	22.162.961
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.933.681	22.162.961
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80.494.900	33.294.900
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	80.494.900	33.294.900
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.012.800	86.699.800
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	116.012.800	86.699.800
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	116.012.800	86.699.800
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	241.559.955	232.792.653
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	241.559.955	232.792.653
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11.460.000	11.460.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	230.099.955	221.332.653
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	288.825.507	167.490.332
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.197.844	15.197.844
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.199.024	8.199.024
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.124	2.999.124
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.199.900	5.199.900

7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.998.820	6.998.820
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.998.820	6.998.820
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.000.100	1.000.100
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.000.100	1.000.100
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.100	1.000.100
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	166.218.563	68.204.388
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	166.218.563	68.204.388
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.403.193	18.403.193
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	143.817.170	45.802.995
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	3.998.200	3.998.200
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.021.000	73.700.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	97.021.000	73.700.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	97.021.000	73.700.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.388.000	9.388.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.388.000	9.388.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.388.000	9.388.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	309.949.262	184.589.529
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.692.200	7.692.200
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.698.300	4.698.300
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.200	1.498.200
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.200.100	3.200.100
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.993.900	2.993.900
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.993.900	2.993.900
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.749	9.749
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.749	9.749

7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.749	9.749
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	197.829.010	92.557.429
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	197.829.010	92.557.429
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.260.115	30.260.115
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166.568.895	61.297.314
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	1.000.000	1.000.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94.453.152	74.365.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	94.453.152	74.365.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	94.453.152	74.365.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.000.000	9.000.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.000.000	9.000.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.000.000	9.000.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	294.250.512	170.779.050
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.239.175	13.239.175
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.270.575	8.270.575
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.115.575	3.115.575
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.155.000	5.155.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.968.600	4.968.600
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.968.600	4.968.600
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.402.000	1.402.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.402.000	1.402.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.402.000	1.402.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.859.886	77.375.190
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	130.859.886	77.375.190
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.006.891	27.006.891
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	101.552.995	48.068.299
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	2.300.000	2.300.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	117.201.451	76.462.685
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	117.201.451	76.462.685

7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	117.201.451	76.462.685
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.548.000	2.300.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.548.000	2.300.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	31.548.000	2.300.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	298.571.190	170.174.807
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.114.975	13.823.975
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.793.975	7.793.975
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.763.725	2.763.725
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.030.250	5.030.250
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.321.000	6.030.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.321.000	6.030.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.200.000	1.200.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.200.000	1.200.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.200.000	1.200.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	146.510.274	81.346.274
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	146.510.274	81.346.274
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.663.450	26.663.450
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.546.824	52.382.824
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	2.300.000	2.300.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.452.143	63.158.760
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80.452.143	63.158.760
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	80.452.143	63.158.760
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.293.798	10.645.798
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.293.798	10.645.798
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	38.293.798	10.645.798
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	292.415.756	163.980.991

7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.738.560	13.738.560
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.983.000	4.983.000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.200	1.498.200
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.484.800	3.484.800
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.755.560	8.755.560
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.755.560	8.755.560
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.127.300	1.127.300
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.127.300	1.127.300
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.127.300	1.127.300
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	187.291.696	88.059.931
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	187.291.696	88.059.931
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.700.955	19.700.955
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	146.605.741	61.853.976
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	20.985.000	6.505.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81.238.200	58.800.200
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	81.238.200	58.800.200
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	81.238.200	58.800.200
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.020.000	2.255.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	9.020.000	2.255.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.020.000	2.255.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	10.788.206.884	9.789.337.047
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.160.541.766	9.333.599.086
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.563.500	18.013.500
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.479.500	11.329.500
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.671.000	1.671.000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.671.000	1.671.000
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.671.000	1.671.000
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.671.000	1.671.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000	-

7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.124.651.340	8.476.256.015
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.917.189.897	7.402.604.572
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.179.011.693	1.042.201.693
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.645.750	11.645.750
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.543.500	1.543.500
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.720.250	15.720.250
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.540.250	2.540.250
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.275.250	-
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.275.250	-
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.410.000	84.190.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89.410.000	84.190.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.106.767	387.435.767
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.847.451	6.847.451
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.228.426	72.228.426
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	255.379.602	255.379.602
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.440.000	26.915.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.386.288	17.065.288
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.825.000	-
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.243.905	64.412.800
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.243.905	64.412.800
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.297.400	205.297.400
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.297.400	205.297.400
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.993.604	97.993.604
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.149.604	51.149.604
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.160.000	44.160.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.684.000	2.684.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122.457.620	42.276.230
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.685.330	34.003.940
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	110.685.330	34.003.940
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11.772.290	8.272.290
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.772.290	8.272.290
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	137.908.063	70.178.663

7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.158.663	58.378.663
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.158.663	58.378.663
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	49.749.400	11.800.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	49.749.400	11.800.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.762.185	102.324.868
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	82.762.185	102.324.868
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	82.762.185	102.324.868
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	284.537.250	240.958.200
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	284.537.250	240.958.200
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.285.750	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	258.251.500	240.958.200
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	236.676.183	107.473.183
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.612.350	16.612.350
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.612.350	16.612.350
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.380.100	2.380.100
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.825.000	6.825.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.407.250	7.407.250
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152.859.833	38.156.833
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	152.859.833	38.156.833
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.220.000	11.220.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139.639.833	26.936.833
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.734.000	40.534.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	47.734.000	40.534.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	47.734.000	40.534.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.470.000	12.170.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.470.000	12.170.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	19.470.000	12.170.000

7						UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1					KECAMATAN	271.016.519	154.649.974
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.993.219	20.993.219
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.993.219	20.993.219
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.986.164	2.986.164
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.400.000	8.400.000
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.607.055	9.607.055
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	186.674.745	70.308.200
7	1	3	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	186.674.745	70.308.200
7	1	3	2.02	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.099.900	11.099.900
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.574.845	59.208.300
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.348.986	41.348.986
7	1	4	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	41.348.986	41.348.986
7	1	4	2.02	1		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	41.348.986	41.348.986
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.999.569	21.999.569
7	1	5	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.999.569	21.999.569
7	1	5	2.01	4		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21.999.569	21.999.569
7						UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1					KECAMATAN	266.245.250	132.674.125
						KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.906.625	18.906.625
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.906.625	18.906.625
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.952.145	2.952.145
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.980.000	7.980.000
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.974.480	7.974.480
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	180.031.125	56.060.000
7	1	3	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	180.031.125	56.060.000
7	1	3	2.02	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.270.000	11.270.000
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166.761.125	44.790.000
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.262.500	42.162.500
7	1	4	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	44.262.500	42.162.500
7	1	4	2.02	1		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	44.262.500	42.162.500

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.045.000	15.545.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.045.000	15.545.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	23.045.000	15.545.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	261.902.806	134.566.803
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.583.180	20.583.180
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.583.180	20.583.180
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.619.590	2.619.590
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.400.000	8.400.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.563.590	9.563.590
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178.325.453	60.249.900
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	178.325.453	60.249.900
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.459.900	11.459.900
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166.865.553	48.790.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.473.273	45.473.273
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	45.473.273	45.473.273
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	45.473.273	45.473.273
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.520.900	8.260.450
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.520.900	8.260.450
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17.520.900	8.260.450
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	240.423.164	117.250.343
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.889.450	18.889.450
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.889.450	18.889.450
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.750.110	2.750.110
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.980.000	7.980.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.159.340	8.159.340
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	153.617.821	49.470.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153.617.821	49.470.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.220.000	11.220.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142.397.821	38.250.000

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.573.993	40.798.993
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46.573.993	40.798.993
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	46.573.993	40.798.993
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.341.900	8.091.900
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.341.900	8.091.900
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21.341.900	8.091.900
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	8.524.683.954	7.437.335.286
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.696.810.548	6.827.847.460
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.770.350	28.800.250
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.720.400	5.720.400
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.450.000	2.450.000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.450.000	2.450.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.150.000	5.150.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.950	13.029.850
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.851.805.398	6.105.259.681
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.223.822.376	5.606.200.536
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	616.342.312	487.418.745
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.040.000	5.040.000
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.390.000	1.390.000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.948.610	3.948.300
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.262.100	1.262.100
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.970.000	72.970.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.160.000	72.160.000
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	810	810
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000	-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.111.537	164.375.537
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.804.455	4.804.455
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.821.832	75.821.832
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.999.750	11.999.750
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.557.500	32.557.500

7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.192.000	9.192.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.736.000	-
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.847.867	81.899.744
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157.847.867	81.899.744
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.961.996	298.898.848
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.023.596	221.960.448
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.938.400	76.938.400
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.343.400	75.643.400
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.012.000	42.772.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.107.400	31.647.400
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.224.000	1.224.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	207.011.430	185.082.930
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	193.651.430	171.722.930
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	193.651.430	171.722.930
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.360.000	13.360.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.360.000	13.360.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.212.019	100.965.269
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.220.404	44.403.654
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.220.404	44.403.654
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	64.991.615	56.561.615
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	64.991.615	56.561.615
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.820.750	11.820.750
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.820.750	11.820.750
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.820.750	11.820.750
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	478.829.207	311.618.877
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	478.829.207	311.618.877
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	41.724.330	9.000.000

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	437.104.877	302.618.877
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	443.596.029	285.936.709
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.950.362	133.553.962
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.992.312	80.992.312
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.992.312	80.992.312
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.908.850	9.912.450
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.200	4.086
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.410.650	3.503.850
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.469.200	38.469.200
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.469.200	38.469.200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.580.000	4.180.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.580.000	4.180.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	185.533.376	88.787.747
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	185.533.376	88.787.747
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.080.000	26.080.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.453.376	62.707.747
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	77.612.291	55.100.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	77.612.291	55.100.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	77.612.291	55.100.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.500.000	8.495.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.500.000	8.495.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32.500.000	8.495.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	425.843.359	226.531.608
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.081.442	137.081.442
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.640.542	79.640.542
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.640.542	79.640.542
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.091.700	13.091.700
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.200	1.498.200

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.210.000	6.210.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.383.500	5.383.500
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.469.200	38.469.200
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.469.200	38.469.200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.880.000	5.880.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.880.000	5.880.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	192.125.426	20.135.250
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	192.125.426	20.135.250
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.625.250	13.625.250
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	178.500.176	6.510.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75.136.491	62.727.916
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.136.491	62.727.916
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	75.136.491	62.727.916
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.500.000	6.587.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.500.000	6.587.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21.500.000	6.587.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	397.474.832	255.788.872
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.344.582	128.371.182
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.992.312	80.992.312
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.992.312	80.992.312
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.043.070	7.489.670
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.001.070	45.627
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	5.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.042.000	2.033.400
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.469.200	38.469.200
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.469.200	38.469.200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.840.000	1.420.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.840.000	1.420.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	166.779.319	64.212.510
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	166.779.319	64.212.510
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.545.000	18.545.000

7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	148.234.319	45.667.510
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62.350.431	56.427.680
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	62.350.431	56.427.680
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	62.350.431	56.427.680
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.000.500	6.777.500
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.000.500	6.777.500
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	34.000.500	6.777.500
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	420.623.737	267.680.222
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.582.712	149.582.712
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.992.312	80.992.312
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.992.312	80.992.312
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.541.200	12.541.200
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.200	1.498.200
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.043.000	5.043.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.469.200	38.469.200
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.469.200	38.469.200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.580.000	17.580.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.580.000	17.580.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	190.835.825	63.097.510
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	190.835.825	63.097.510
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21.825.000	21.825.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.010.825	41.272.510
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58.205.200	48.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	58.205.200	48.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	58.205.200	48.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.000.000	7.000.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.000.000	7.000.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	22.000.000	7.000.000

7						UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1					KECAMATAN	12.428.760.676	10.302.556.048
						KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.574.198.666	9.725.715.038
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.180.000	15.630.000
7	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.940.000	7.940.000
7	1	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.900.000	1.900.000
7	1	1	2.01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.900.000	1.900.000
7	1	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.440.000	3.440.000
7	1	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	450
7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.169.222.717	8.843.051.609
7	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.364.282.717	8.186.784.609
7	1	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	796.900.000	652.480.000
7	1	1	2.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	510	-
7	1	1	2.02	6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.620.000	1.970.000
7	1	1	2.02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.320.000	1.817.000
7	1	1	2.02	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	590	-
7	1	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.235.000	1.380.000
7	1	1	2.03	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	845	-
7	1	1	2.03	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	690	-
7	1	1	2.03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	1.380.000
7	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.710.000	59.980.000
7	1	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.230.000	58.730.000
7	1	1	2.05	3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.080.000	900
7	1	1	2.05	5		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.400.000	350
7	1	1	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	-
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.961.990	173.869.382
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.765.961	3.784.116
7	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.692.103	100.067.644
7	1	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.683.051	21.688.322
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.500.000	20.025.000
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.638.875	11.714.300
7	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.840.000	15.840.000
7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.762.000	-
7	1	1	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.080.000	750

7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286.384.645	159.452.185
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	23.429.230	19.348.905
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.955.415	140.103.280
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.832.314	358.886.522
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.557.812	161.612.020
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.274.502	197.274.502
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.672.000	113.465.340
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.492.000	77.107.840
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.560.000	10.397.500
7	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	49.930.000	-
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.690.000	25.960.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.323.160	50.783.160
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74.003.160	48.233.160
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74.003.160	48.233.160
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.320.000	2.550.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.320.000	2.550.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	215.613.500	123.403.500
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99.038.500	76.333.500
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.038.500	76.333.500
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	116.575.000	47.070.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	116.575.000	47.070.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	174.814.350	125.814.350
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	174.814.350	125.814.350
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	174.814.350	125.814.350
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	382.811.000	276.840.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	382.811.000	276.840.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.675.000	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	356.136.000	276.840.000

7						UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1					KECAMATAN	365.400.072	274.050.272
						KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.977.072	137.960.272
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.000.970	13.984.170
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.001.070	1.001.070
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.900	6.983.100
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.840.000	3.840.000
7	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.840.000	3.840.000
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.000.000	1.000.000
7	1	2	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.000.000	1.000.000
7	1	2	2.02	3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	107.058.000	57.250.000
7	1	3	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	107.058.000	57.250.000
7	1	3	2.02	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.500.000	16.500.000
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90.558.000	40.750.000
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02	1		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000	50.000.000
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.365.000	27.840.000
7	1	5	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	69.365.000	27.840.000
7	1	5	2.01	3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6.900.000	-
7	1	5	2.01	4		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	62.465.000	27.840.000
7						UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1					KECAMATAN	324.309.084	250.081.552
						KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.044.316	129.524.052
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.836.214	7.851.950
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	994.264	48.635

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.745.000	2.520.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.096.950	4.845.600
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.072.000	1.536.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.072.000	1.536.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.000.000	1.000.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.000.000	1.000.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.021.723	49.225.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	87.021.723	49.225.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.180.000	14.180.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.841.723	35.045.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.243.045	20.332.500
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	51.243.045	20.332.500
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6.974.710	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	44.268.335	20.332.500
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	353.997.852	265.908.352
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.016.352	134.216.352
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.040.250	10.240.250
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.135.000	1.135.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.905.250	3.105.250
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.840.000	3.840.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.840.000	3.840.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.100.000	1.100.000

7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.100.000	1.100.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.100.000	1.100.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	109.431.500	40.892.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	109.431.500	40.892.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.542.000	19.542.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	89.889.500	21.350.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.450.000	39.700.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.450.000	39.700.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8.000.000	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52.450.000	39.700.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	358.596.752	268.896.752
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.735.252	138.735.252
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.759.150	14.759.150
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.135.000	1.135.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.624.150	7.624.150
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.840.000	3.840.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.840.000	3.840.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.100.000	1.100.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.100.000	1.100.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.100.000	1.100.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	112.061.500	56.061.500
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	112.061.500	56.061.500
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.542.000	19.542.000

7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.519.500	36.519.500
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.700.000	23.000.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.700.000	23.000.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8.000.000	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	48.700.000	23.000.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	344.606.302	257.786.302
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.324.802	137.324.802
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.348.700	14.348.700
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988	9.988
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.350.000	6.350.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.900	6.999.900
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.840.000	2.840.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.840.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.000.000	1.000.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.000.000	1.000.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.361.500	48.961.500
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.361.500	48.961.500
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.380.000	18.380.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81.981.500	30.581.500
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.920.000	20.500.000

7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.920.000	20.500.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6.020.000	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	49.900.000	20.500.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	358.594.537	268.632.037
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.555.037	137.555.037
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.998.935	13.998.935
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.935	999.935
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.000	6.999.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.420.000	3.420.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.420.000	3.420.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.000.000	1.000.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.000.000	1.000.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	116.324.000	58.482.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	116.324.000	58.482.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.182.000	17.182.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	99.142.000	41.300.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.715.500	21.595.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.715.500	21.595.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	53.715.500	21.595.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	363.308.852	272.472.852

7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.416.352	138.416.352
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.440.250	14.440.250
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.135.000	1.135.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.305.250	7.305.250
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.136.102	120.136.102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.840.000	3.840.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.840.000	3.840.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.100.000	1.100.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.100.000	1.100.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.100.000	1.100.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	117.592.500	68.081.500
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	117.592.500	68.081.500
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.542.000	19.542.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	98.050.500	48.539.500
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.000	50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.200.000	14.875.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.200.000	14.875.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.500.000	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	48.700.000	14.875.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	9.269.088.323	8.741.551.854
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.763.186.216	8.426.789.307
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.591.500	56.442.000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.199.500	5.199.500
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.720.000	5.720.000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.785.000	3.785.000

7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.400.000	4.400.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.487.000	37.337.500
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.783.593.565	7.625.668.565
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.197.498.565	7.197.498.565
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	581.160.000	423.235.000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.575.000	1.575.000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.360.000	3.360.000
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	700	-
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	700	-
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.060.000	46.330.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.060.000	46.330.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.029.478	182.105.189
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.917	5.989.917
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.852.359	105.928.070
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.058.936	19.058.936
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	24.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.468.266	20.468.266
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.660.000	6.660.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.310.450	72.310.450
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.310.450	72.310.450
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.397.193	375.293.903
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.993.491	137.820.201
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.403.702	237.473.702
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.504.030	68.639.200
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.490.730	58.018.200
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.888.300	10.621.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.125.000	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.202.691	49.812.691
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73.612.691	42.222.691
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	73.612.691	42.222.691
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.590.000	7.590.000

7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.590.000	7.590.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	126.940.976	89.704.376
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.646.656	46.646.656
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.646.656	46.646.656
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	71.294.320	43.057.720
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	71.294.320	43.057.720
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	118.802.000	107.300.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	118.802.000	107.300.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	118.802.000	107.300.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	178.956.440	67.945.480
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	178.956.440	67.945.480
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	178.956.440	67.945.480
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	437.589.035	314.364.780
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.481.252	183.152.112
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.131.710	13.481.710
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.981.710	1.981.710
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.650.000	7.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000	4.500.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.675.302	156.675.302
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.675.302	156.675.302
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.674.240	12.995.100
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.374.240	4.909.600
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.300.000	8.085.500
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	135.652.229	50.083.229
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	135.652.229	50.083.229
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.017.979	18.017.979
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.634.250	32.065.250

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	72.970.786	69.220.786
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	72.970.786	69.220.786
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	72.970.786	69.220.786
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.484.768	11.908.653
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.484.768	11.908.653
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	37.484.768	11.908.653
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	437.944.004	326.163.595
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.688.572	186.520.472
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.729.270	14.239.270
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.499.270	2.499.270
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.780.000	5.040.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.450.000	6.700.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.675.302	156.675.302
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.675.302	156.675.302
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.284.000	15.605.900
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.984.000	7.984.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.300.000	7.621.900
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	151.163.909	78.187.527
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	151.163.909	78.187.527
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21.564.012	21.564.012
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129.599.897	56.623.515
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.100.000	53.100.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	53.100.000	53.100.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	53.100.000	53.100.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.991.523	8.355.596
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.991.523	8.355.596
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	41.991.523	8.355.596
7					UNSUR KEWILAYAHAN		

7	1				KECAMATAN		436.213.714	329.356.709
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		184.027.902	168.331.002
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		19.930.700	11.655.700
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.307	9.307	9.307
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	5.025.000	5.025.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	5.700.000	5.700.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		156.675.302	156.675.302
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.675.302	156.675.302	156.675.302
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.421.900	-
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.426.400	-	-
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.995.500	-	-
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		160.691.486	97.287.111
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		160.691.486	97.287.111
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.078.982	18.078.982	18.078.982
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142.612.504	79.208.129	79.208.129
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		53.400.000	53.400.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		53.400.000	53.400.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	53.400.000	53.400.000	53.400.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		38.094.326	10.338.596
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		38.094.326	10.338.596
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	38.094.326	10.338.596	10.338.596
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	1				KECAMATAN		449.894.454	324.468.664
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		178.121.502	176.126.502
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		17.480.700	15.485.700
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.307	9.307	9.307
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.750.000	9.755.000	9.755.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		156.675.302	156.675.302
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.675.302	156.675.302	156.675.302
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.965.500	3.965.500

7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.965.500	3.965.500
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	182.135.647	82.762.162
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	182.135.647	82.762.162
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.999.303	17.999.303
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.136.344	64.762.859
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.400.000	53.400.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	53.400.000	53.400.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	53.400.000	53.400.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.237.305	12.180.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.237.305	12.180.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36.237.305	12.180.000
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.100.056.849	6.621.043.680
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK		
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.392.809.459	2.170.517.742
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.200.000	6.300.000
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.200.000	4.800.000
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.500.000
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.642.518.309	1.508.766.492
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.642.518.309	1.508.766.492
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.400.000	17.400.000
8	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17.400.000	17.400.000
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	-
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.878.782	149.130.882
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.770.600	-
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.051.700	61.051.700
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000	17.000.000
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.903.482	41.093.182
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.553.000	26.386.000
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.920.000	6.920.000
8	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.920.000	6.920.000
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.500.368	482.000.368
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.399.023	37.899.023
8	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.975.345	28.975.345
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.126.000	415.126.000

8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.392.000	-
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.392.000	-
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	269.010.230	237.546.985
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	269.010.230	237.546.985
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	269.010.230	237.546.985
8	1	3			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.394.778.953	3.394.778.953
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.394.778.953	3.394.778.953
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.394.778.953	3.394.778.953
8	1	4			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.250.000	-
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.250.000	-
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.250.000	-
8	1	5			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	159.358.207	-
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	159.358.207	-
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	159.358.207	-
8	1	6			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	875.850.000	818.200.000
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	875.850.000	818.200.000
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	659.250.000	615.600.000
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216.600.000	202.600.000
TOTAL						1.869.498.506.700	1.671.471.969.966

Tabel 5.3
Rekapitulasi Perubahan Belanja Rencana Program dan Kegiatan
Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Pagu Anggaran Belanja	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2				3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	1				460.072.074.320	414.903.091.796
1	1	1			281.792.011.833	265.635.932.730
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.490.364	270.204.241
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	276.384.415.933	260.656.121.732
1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.454.090	157.362.996
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.114.643.888	944.597.888
1	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.195.048	170.552.308
1	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.350.036.832	3.287.317.887
1	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.775.678	149.775.678
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.107.240.834	126.094.337.711
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6	55.210.439.174
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69.078.043.827	57.421.780.262
1	1	2	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.967.932.265	10.037.655.515
1	1	2	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.585.398.707	3.424.462.760
1	1	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-
1	1	3	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-
1	1	3	2.01	1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0
1	1	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28.172.821.653	23.172.821.355
1	1	4	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.172.821.653	23.172.821.355
1	1	6		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-
1	1	6	2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.728.492.067	1.928.892.548
2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2,222,201,626	1,500,458,457
2	22	2	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	814,864,413	395,496,018
2	22	2	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,407,337,213	1,104,962,439
2	22	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	68,398,775	68,398,775

2	22	3	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	68,398,775	68,398,775
2	22	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	135,956,350	50,000,000
2	22	4	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135,956,350	50,000,000
2	22	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	101,935,316	110,035,316
2	22	5	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	101,935,316	110,035,316
2	22	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	200,000,000	200,000,000
2	22	6	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	200,000,000	200,000,000
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	204,550,528,777	241,675,699,849
				DINAS KESEHATAN		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146,916,982,402	167,419,317,027
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93,036,555	107,275,030
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145,495,651,308	165,974,813,731
1	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23,750,000	23,750,000
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323,136,939	324,040,666
1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	34,030,000
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334,999,978	334,999,978
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646,407,622	620,407,622
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56,200,114,745	72,995,784,938
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41,031,707,869	56,947,331,365
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,630,771,566	15,802,774,078
1	2	2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	362,829,062	82,576,197
1	2	2	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174,806,248	163,103,298
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	531,912,772	322,253,872
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	228,298,292	24,999,392
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303,614,480	297,254,480
1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	476,715,731	514,453,607
1	2	4	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	46,576,556	93,146,512
1	2	4	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0	0

1	2	4	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	179,556,815	179,556,815
1	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	174,782,360	165,950,280
1	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	75,800,000	75,800,000
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	424,803,127	423,890,405
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424,803,127	423,890,405
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,166,504,220	4,237,391,967
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,166,504,220	4,237,391,967
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,884,702,621	1,884,702,621
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,884,702,621	1,884,702,621
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,884,702,621	1,884,702,621
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,564,734,997	1,564,734,997
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,564,734,997	1,564,734,997
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,385,021,277	1,385,021,277
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,385,021,277	1,385,021,277
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,704,789,010	2,704,789,010
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,704,789,010	2,704,789,010
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,411,336,711	1,411,336,711
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,411,336,711	1,411,336,711
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,479,532,591	1,479,532,591
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,479,532,591	1,479,532,591
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,345,823,485	1,345,823,485
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,345,823,485	1,345,823,485
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,379,013,067	1,379,013,067
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,379,013,067	1,379,013,067

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,573,422,741	1,573,422,741
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,573,422,741	1,573,422,741
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,595,080,688	2,595,080,688
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,595,080,688	2,595,080,688
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	882,444,676	882,444,676
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	882,444,676	882,444,676
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,106,248,887	1,106,248,887
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,106,248,887	1,106,248,887
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,046,370,064	1,046,370,064
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,046,370,064	1,046,370,064
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	827,439,174	827,439,174
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	827,439,174	827,439,174
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,017,563,555	2,017,563,555
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,017,563,555	2,017,563,555
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,017,563,555	2,017,563,555
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,269,698,718	2,269,698,718
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,269,698,718	2,269,698,718
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,269,698,718	2,269,698,718
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,735,655,555	1,735,655,555
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,735,655,555	1,735,655,555
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,735,655,555	1,735,655,555
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1,735,655,555	1,735,655,555
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,317,872,993	1,317,872,993
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,317,872,993	1,317,872,993
1	2	2			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,317,872,993	1,317,872,993
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1,317,872,993	1,317,872,993

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,689,453,238	1,689,453,238
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,689,453,238	1,689,453,238
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,689,453,238	1,689,453,238
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1,689,453,238	1,689,453,238
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,643,780,544	2,643,780,544
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,643,780,544	2,643,780,544
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,643,780,544	2,643,780,544
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2,643,780,544	2,643,780,544
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,645,999,781	1,645,999,781
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,645,999,781	1,645,999,781
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,645,999,781	1,645,999,781
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1,645,999,781	1,645,999,781
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,558,042,226	1,558,042,226
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,558,042,226	1,558,042,226
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,558,042,226	1,558,042,226
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1,558,042,226	1,558,042,226
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,476,180,681	2,476,180,681
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,476,180,681	2,476,180,681
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,476,180,681	2,476,180,681
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2,476,180,681	2,476,180,681
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	752,818,408	752,818,408
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	752,818,408	752,818,408
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	752,818,408	752,818,408
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	752,818,408	752,818,408
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	100,755,827,537	101,801,829,390
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,922,128,489	16,904,128,489
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,098,500	29,098,500
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,005,200	5,005,200
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,093,300	24,093,300
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,657,219,496	5,663,219,496

1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	851,203,464	851,203,464
1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4,758,820,000	4,758,820,000
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47,196,032	53,196,032
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,542,142,125	3,598,142,125
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74,186,469	74,186,469
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280,960,540	280,960,540
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	880,955,116	2,986,955,116
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	306,040,000	256,040,000
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271,420,000	271,420,000
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271,420,000	271,420,000
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,526,920,368	6,396,920,368
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,403,000,000	1,403,000,000
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,123,920,368	4,993,920,368
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895,328,000	945,328,000
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	895,328,000	945,328,000
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85,833,699,048	84,897,700,901
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28,152,817,690	27,215,951,210
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1,132,579,200	1,059,219,320
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20,841,068,700	20,651,068,700
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6,179,169,790	5,505,663,190
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	0	0
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	0	0
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57,638,431,050	57,639,299,383
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	863,023,539	863,883,537
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	125,073,720	125,073,720
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	56,622,195,995	56,622,195,995
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	28,137,796	28,146,131
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	42,450,308	42,450,308
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5,711,333	5,711,333
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	36,738,975	36,738,975
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	260,458,699,437	204,564,554,893
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,441,522,274	19,439,526,697
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,543,890	41,043,890
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,032,315	11,032,315
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,360,450	5,860,450
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,160,450	5,660,450
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,430,225	10,430,225
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,560,450	8,060,450
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,326,329,080	14,464,058,150
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287,850,000	199,125,000
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	179,850,000	179,525,000
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108,000,000	19,600,000
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	969,345,302	693,472,298
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,199,985	14,199,985
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	474,064,777	459,019,377
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,150,540	45,147,936
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28,800,000	20,800,000
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199,870,000	80,045,000
1	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	204,260,000	74,260,000
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,098,941,828	405,192,017
1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	548,852,810	0
1	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550,089,018	405,192,017
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,640,912,343	1,588,035,511
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87,300,000	42,300,000
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317,098,434	318,098,402
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,236,513,909	1,227,637,109
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,073,599,831	2,048,599,831
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	760,187,516	760,187,516
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	900,764,814	890,764,814
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234,792,575	219,792,575
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177,854,926	177,854,926
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13,885,257,688	12,306,259,549
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,885,257,688	12,306,259,549
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3,433,570,166	3,639,417,084
1	3	2	2.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	0	0
1	3	2	2.01	19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	412,390,000	410,690,000

1	3	2	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	1,584,303,157	0
1	3	2	2.01	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	0	0
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	7,956,727,490	7,946,099,990
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	286,982,875	285,282,875
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	211,284,000	24,769,600
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6,723,061,697	8,340,183,659
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6,723,061,697	8,340,183,659
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6,723,061,697	8,340,183,659
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	149,881,205	149,881,205
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	149,881,205	149,881,205
1	3	4	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	99,994,494	99,994,494
1	3	4	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	49,886,711	49,886,711
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	934,182,660	682,610,075
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	934,182,660	682,610,075
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	934,182,660	682,610,075
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	43,031,023,745	31,754,094,389
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	43,031,023,745	31,754,094,389
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	820,572,075	817,752,075
1	3	6	2.01	2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	0	0
1	3	6	2.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1,121,082,075	817,812,075
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	28,221,634,405	18,752,810,205
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1,587,759,448	0
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	11,279,975,742	11,365,720,034
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	20,522,970,440	17,363,023,356
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20,522,970,440	17,363,023,356
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20,522,970,440	17,363,023,356
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	47,745,742,639	42,979,826,380
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	47,745,742,639	42,979,826,380

1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	472,020,950	349,682,463
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	37,846,258,659	34,580,496,204
1	3	8	2.01	6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	6,543,101,750	5,519,252,735
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2,884,361,280	2,530,394,978
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	34,566,542,645	28,305,502,924
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	34,566,542,645	28,305,502,924
1	3	9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	409,683,495	175,117,000
1	3	9	2.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	674,855,350	570,924,550
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	17,808,851,255	14,167,145,875
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	15,454,261,567	13,173,424,521
1	3	9	2.01	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	218,890,978	218,890,978
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69,208,250,693	42,471,225,158
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	69,208,250,693	42,471,225,158
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7,598,375,240	2,564,510,240
1	3	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	501,341,905	496,961,905
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	767,967,615	762,247,615
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	18,326,445,455	12,466,565,455
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	17,925,158,860	6,440,648,860
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	9,461,333,990	8,802,453,990
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	9,309,465,518	6,716,958,043
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	2,997,989,715	2,777,909,715
1	3	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	0	0
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	568,236,240	0
1	3	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	120,071,820	0
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1,631,864,335	1,442,969,335
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	460,828,241	319,228,241
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	460,828,241	319,228,241
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0	0
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	460,828,241	319,228,241
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	789,435,510	453,193,260
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	217,230,510	91,938,760
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	56,105,350	52,405,000
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	161,125,160	39,533,760

1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	0
1	3	12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	0	0
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	420,605,000	272,505,000
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	167,505,000	19,405,000
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	253,100,000	253,100,000
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	151,600,000	88,749,500
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	69,400,000	56,249,500
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	82,200,000	32,500,000
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	121,450,578,462	92,524,825,650
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,304,221,811	7,226,410,443
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,514,000	20,514,000
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,849,750	11,849,750
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0
1	4	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0
1	4	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0
1	4	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,065,000	5,065,000
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,599,250	3,599,250
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,722,990,115	5,679,781,598
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,963,777,265	4,977,929,948
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	751,701,600	694,340,400
1	4	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7,511,250	7,511,250

1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0
1	4	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74,590,000	76,240,000
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50,590,000	52,240,000
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24,000,000	24,000,000
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221,561,627	170,553,776
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,970,280	4,970,280
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148,949,322	97,952,471
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,420,000	18,420,000
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,799,025	18,799,025
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	5,000,000
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,423,000	25,412,000
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176,387,085	191,142,085
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176,387,085	191,142,085
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795,756,824	795,756,824
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,487,500	3,487,500
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	656,146,281	656,146,281
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136,123,043	136,123,043
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292,422,160	292,422,160
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120,736,160	120,736,160
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,868,000	12,868,000
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158,818,000	158,818,000
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4,756,679,358	3,666,376,408
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,291,938,120	270,540,070
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1,068,439,840	270,540,070
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	223,498,280	0
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3,464,741,238	3,395,836,338
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	73,446,320	4,541,500
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8,619,836,879	5,673,461,464
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	389,583,500	377,803,500
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	190,640,000	189,800,000
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	126,398,500	125,558,500
1	4	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	72,545,000	62,445,000

1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8,230,253,379	5,295,657,964
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	282,300,000	116,036,400
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3,516,512,500	3,527,627,100
1	4	3	2.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	178,200,000	197,400,000
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	4,253,240,879	1,454,594,464
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	847,991,000	853,798,000
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	847,991,000	853,798,000
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	847,991,000	853,798,000
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	99,921,849,414	75,104,779,335
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	99,921,849,414	75,104,779,335
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	212,679,280	211,827,500
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	99,654,870,854	74,838,664,335
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	54,299,280	54,287,500
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	48,248,961,224	31,665,589,213
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	39,094,900	39,083,100
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	39,094,900	39,083,100
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39,094,900	39,083,100
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	48,039,398,444	31,626,506,113
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48,039,398,444	31,626,506,113
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48,039,398,444	31,626,506,113
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	71,897,880	0
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	71,897,880	0
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	71,897,880	0
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	98,570,000	0
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	98,570,000	0
2	10	10	2.01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	98,570,000	0

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21,460,153,720	21,121,465,708
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,977,794,327	18,691,606,315
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,656,105,551	15,656,105,551
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,656,105,551	15,656,105,551
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225,660,000	186,195,000
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	225,660,000	186,195,000
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,439,500	301,439,500
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,001,880	6,001,880
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254,135,000	254,135,000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,902,620	35,902,620
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	5,400,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,082,643,276	1,835,920,264
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,680,000	49,680,000
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,032,963,276	1,786,240,264
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711,946,000	711,946,000
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	656,816,000	656,816,000
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,130,000	55,130,000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,209,063,293	2,156,563,293
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,647,259,100	1,625,509,100
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	357,625,000	357,625,000
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	715,170,100	693,420,100
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	0
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5,950,000	5,950,000

1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	568,514,000	568,514,000
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	550,594,393	519,844,393
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	84,600,000	60,600,000
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	112,499,900	112,499,900
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	353,494,493	346,744,493
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11,209,800	11,209,800
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	11,209,800	11,209,800
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	273,296,100	273,296,100
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	273,296,100	273,296,100
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	39,499,900	39,499,900
1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	233,796,200	233,796,200
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	0
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0	0
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0	0
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4,777,154,575	3,822,472,781
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,103,322,823	3,317,052,555
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,515,135	11,675,023
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,749,980	4,649,823
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,634,855	3,534,900
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,130,300	3,490,300
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,304,825,570	2,729,988,525
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,301,220,750	2,726,383,705
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,604,820	3,604,820
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42,443,000	28,507,300
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29,430,000	28,507,300
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13,013,000	0

1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	196,760,090	87,743,957
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,179,947	3,179,947
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,992,490	39,085,342
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,700,000	17,700,000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,412,653	18,768,668
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000	4,000,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47,475,000	5,010,000
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362,623,628	295,100,537
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84,873,954	69,830,863
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277,749,674	225,269,674
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180,155,400	164,037,213
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,351,400	114,053,213
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,804,000	49,984,000
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	673,831,752	505,420,226
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100,945,455	24,244,825
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	16,401,630	0
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	84,543,825	24,244,825
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	184,060,226	98,885,451
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9,601,999	0
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	66,441,475	24,357,550
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	55,488,700	40,884,723
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	16,618,392	16,618,392
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	35,909,660	17,024,786
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	386,010,350	382,289,950
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	94,528,200	90,498,200
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	136,900,000	217,870,000
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	149,332,150	73,921,750
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5,250,000	0
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2,815,721	0
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2,815,721	0
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12,522,413,857	11,297,207,835
					DINAS SOSIAL		
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,407,442,626	6,864,815,199
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,178,000	21,078,000

1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,049,000	6,949,000
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,150,000	1,150,000
1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,150,000	1,150,000
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,079,000	6,079,000
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,750,000	5,750,000
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,418,324,856	5,082,607,617
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,014,224,856	4,766,882,617
1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	389,160,000	302,780,000
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,940,000	12,945,000
1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,150,000	0
1	6	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,150,000	0
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57,600,000	41,110,000
1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39,600,000	41,110,000
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18,000,000	0
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	530,368,058	473,374,248
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54,987,360	48,540,550
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125,238,873	125,238,873
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119,999,825	119,999,825
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	4,000,000
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94,000,000	84,000,000
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96,842,000	58,595,000
1	6	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33,300,000	33,000,000
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111,337,715	106,882,690
1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111,337,715	106,882,690
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899,191,997	772,470,644
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,000,000	20,000,000
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360,411,597	290,840,244
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53,150,000	0
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461,630,400	461,630,400
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367,292,000	367,292,000
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255,412,000	255,412,000
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111,880,000	111,880,000
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,739,012,731	1,521,554,266
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,739,012,731	1,521,554,266
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	569,586,285	461,030,285
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	414,902,591	395,702,591
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	679,419,890	601,481,390

					Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	63,633,965	63,340,000
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	11,470,000	0
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	42,443,000	12,243,000
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	42,443,000	12,243,000
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	42,443,000	12,243,000
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,566,981,600	1,409,005,600
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	870,404,800	764,328,800
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	657,454,800	559,328,800
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	175,460,000	167,510,000
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	0
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0	0
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	37,490,000	37,490,000
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	696,576,800	644,676,800
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	391,750,000	339,850,000
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	304,826,800	304,826,800
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,315,115,400	1,118,565,270
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,315,115,400	1,118,565,270
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0	0
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	48,565,400	12,750,000
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,266,550,000	1,105,815,270
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0	0
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	412,006,000	333,991,000
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	412,006,000	333,991,000
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	153,100,000	84,495,000
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	110,600,000	95,600,000
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	80,100,000	68,100,000
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0	0
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	68,206,000	85,796,000
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0	0

1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	0	0
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	39,412,500	37,033,500
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39,412,500	37,033,500
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39,412,500	37,033,500
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7,371,480,161	6,135,636,536
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,226,610,827	5,425,136,267
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,296,270	51,296,270
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,173,765	32,173,765
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,402,755	10,402,755
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,719,750	8,719,750
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,470,224,492	4,851,265,758
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,112,034,842	4,493,076,108
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340,429,800	340,429,800
2	8	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17,759,850	17,759,850
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53,640,000	53,640,000
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40,640,000	40,640,000
2	8	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13,000,000	13,000,000
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	326,334,089	212,179,089
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,944,895	4,944,895
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,285,433	60,285,433
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,981,412	11,981,412
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53,322,349	53,322,349
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000	3,600,000
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24,500,000	24,500,000
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167,700,000	53,545,000
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,656,100	31,656,100
2	8	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,656,100	31,656,100
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,860,000	34,860,000
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,800,000	10,800,000
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,060,000	24,060,000
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258,599,876	190,239,050
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,399,876	148,039,050
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42,200,000	42,200,000
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	143,427,250	105,888,000
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52,027,250	52,027,250
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	0	0

2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	52,027,250	52,027,250
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	91,400,000	53,860,750
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	91,400,000	53,860,750
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	585,641,484	233,918,484
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	380,223,000	28,500,000
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	28,500,000	28,500,000
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	351,723,000	0
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205,418,484	205,418,484
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	205,418,484	205,418,484
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3,500,000	0
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,500,000	0
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	3,500,000	0
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	332,279,010	332,279,010
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	332,279,010	332,279,010
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	332,279,010	332,279,010
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0

2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	80,021,590	38,414,775
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,414,775	38,414,775
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,414,775	38,414,775
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,606,815	0
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,606,815	0
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	247,713,924	136,182,975
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	247,713,924	136,182,975
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	247,713,924	136,182,975
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	162,088,600	136,182,975
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	85,625,324	0
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	0
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,392,858,838	4,354,188,510
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	165,750,245	165,750,245
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24,710,520	24,710,520
2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	0	0
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0	0
2	14	2	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	24,710,520	24,710,520
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141,039,725	141,039,725
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	0	0
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	110,219,275	110,219,275
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	30,820,450	30,820,450
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,298,808,488	3,260,138,160
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,911,491,400	1,911,491,400
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	176,030,000	176,030,000
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0	0

2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPB melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	445,686,000	445,686,000
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	1,289,775,400	1,289,775,400
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,387,317,088	1,348,646,760
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	0
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	0
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,239,363,000	1,239,363,000
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	109,283,760	109,283,760
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	38,670,328	0
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	928,300,105	928,300,105
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	928,300,105	928,300,105
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	99,853,105	99,853,105
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	743,000,000	743,000,000
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0	0
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13,142,863,152	10,830,300,834
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,748,855,833	10,420,510,199
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,527,950	37,137,850
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,406,150	15,516,050
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,121,800	21,621,800
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,648,692,482	8,734,819,095
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,640,632,632	8,734,819,095
2	9	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8,059,850	0
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74,425,000	64,000,000

2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49,930,000	45,310,000
2	9	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6,495,000	3,690,000
2	9	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18,000,000	15,000,000
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	287,801,974	265,428,159
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,768,000	13,268,000
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,856,474	88,650,639
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55,469,200	56,269,200
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,810,000	7,810,000
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,252,300	46,677,320
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,900,000	5,900,000
2	9	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	0	0
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,346,000	31,553,000
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0
2	9	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15,400,000	15,300,000
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	356,125,483	127,968,735
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	45,946,125	45,237,000
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83,151,735	82,731,735
2	9	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227,027,623	0
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,170,033,600	1,094,613,600
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,200,000	7,200,000
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399,300,000	393,300,000
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	763,533,600	694,113,600
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167,249,344	96,542,760
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,711,344	44,270,760
2	9	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	800	0
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,872,000	18,236,000
2	9	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	35,046,000	34,036,000
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35,820,000	0
2	9	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0	0
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,189,778,964	241,421,985
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	120,325,480	116,807,480
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9,920,250	8,952,250
2	9	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6,959,350	4,959,350
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	103,445,880	102,895,880
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	963,433,564	21,786,585
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	963,433,564	21,786,585
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	106,019,920	102,827,920
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	34,311,270	32,969,270

2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	71,708,650	69,858,650
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	140,605,650	133,957,650
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	140,605,650	133,957,650
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30,758,650	24,950,650
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	109,847,000	109,007,000
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	63,622,705	34,411,000
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	63,622,705	34,411,000
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	0
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11,943,325	1,000,000
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	0
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	51,679,380	33,411,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,246,621,160	712,689,572
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	72,797,784	46,065,250
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	46,485,250	46,065,250
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0	0
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0	0
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	46,485,250	46,065,250
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	26,312,534	0
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	26,312,534	0
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0	0
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,045,133,540	622,614,942
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	58,613,493	56,666,493
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	58,613,493	56,666,493
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	986,520,047	565,948,449
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	986,520,047	565,948,449
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	128,689,836	44,009,380
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	128,689,836	44,009,380
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	128,689,836	44,009,380
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5,767,884,308	2,584,280,979
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,045,593,732	1,319,906,617
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	572,420,395	206,526,805

3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14,107,062	0
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	558,313,333	206,526,805
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,254,572,227	904,223,152
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	633,279,502	609,610,227
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	621,292,725	294,612,925
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	194,990,200	192,346,000
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	194,990,200	192,346,000
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	23,610,910	16,810,660
3	27	2	2.05	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	0	0
3	27	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3,100,000	1,300,000
3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20,510,910	15,510,660
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,489,268,045	318,080,000
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1,489,268,045	318,080,000
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	70,510,000	0
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	194,179,000	0
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	423,837,450	198,240,000
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	800,741,595	119,840,000
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,988,947,275	854,867,755
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,837,700	20,837,700
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	20,837,700	20,837,700
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	242,879,665	16,533,765
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	242,879,665	16,533,765
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,655,699,910	765,466,290
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	995,092,058	491,744,390
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	14,246,125	11,436,125
3	27	4	2.04	3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	646,361,727	262,285,775
3	27	4	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	69,530,000	52,030,000
3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	69,530,000	52,030,000
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	244,075,256	91,426,607
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	244,075,256	91,426,607
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	166,982,950	79,848,678
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	77,092,306	11,577,929

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	67,877,769,907	62,272,649,028
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,552,342,008	16,016,454,472
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134,226,500	140,194,114
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,750,000	28,951,900
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,000,000	18,271,450
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,000,000	16,122,000
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19,788,900	21,990,800
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17,000,000	19,986,564
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,337,600	15,809,500
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,350,000	19,061,900
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,652,140,569	12,520,537,819
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,935,860,619	11,935,860,619
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	691,080,000	562,790,000
2	11	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,288,400	2,728,400
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,194,050	2,194,050
2	11	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8,522,000	7,022,000
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9,573,800	9,131,900
2	11	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,621,700	810,85
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97,495,000	74,720,800
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66,460,000	63,220,000
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31,035,000	11,500,800
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	666,307,821	595,636,525
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,483,975	39,421,375
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148,097,894	147,257,894
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49,498,757	44,462,389
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84,250,000	70,450,000
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	292,854,675	275,484,675
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,913,520	7,920,000
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34,209,000	10,640,192
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240,226,133	301,799,280
2	11	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,819,000	0
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,099,667,751	1,718,734,200
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31,650,000	26,650,000
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369,259,096	325,428,920
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,907,800	8,560,800
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,612,850,855	1,358,094,480

2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662,278,234	664,831,734
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170,856,000	165,189,500
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107,140,234	107,140,234
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	267,650,000	276,710,000
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116,632,000	115,792,000
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	10,000,000	5,000,000
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	10,000,000	5,000,000
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	10,000,000	5,000,000
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,857,389,475	751,974,799
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	873,779,837	426,400,034
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	604,083,682	183,224,879
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	269,696,155	243,175,155
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	983,609,638	325,574,765
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	76,806,270	82,956,270
2	11	3	2.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	860,303,368	217,718,495
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	46,500,000	24,900,000
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	132,370,000	107,370,000
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	132,370,000	107,370,000
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	25,000,000	0
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	107,370,000	107,370,000
2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	0	0
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	96,937,500	95,278,700
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96,937,500	95,278,700
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31,562,700	31,562,700
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29,974,800	1,500,000
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	35,400,000	62,216,000
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	82,189,600	82,349,600
2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	41,094,800	41,174,800

2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	41,094,800	41,174,800
2	11	7	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	41,094,800	41,174,800
2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	41,094,800	41,174,800
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2,983,287,371	2,498,730,651
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,983,287,371	2,498,730,651
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	157,376,755	111,664,715
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2,825,910,616	2,387,065,936
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	427,085,397	218,302,681
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	427,085,397	218,302,681
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	427,085,397	218,302,681
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	49,573,300	43,542,000
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	49,573,300	43,542,000
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	49,573,300	43,542,000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	45,686,595,256	42,453,646,125
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	45,686,595,256	42,453,646,125
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	72,900,000	37,175,000
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3,288,527,352	3,007,279,990
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10,828,464,790	9,487,321,456
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	11,162,801,223	10,852,039,086
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	19,973,401,891	18,910,180,598
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	360,500,000	159,649,995
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13,342,176,734	12,532,125,301
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,066,146,855	11,885,990,126
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,978,884	174,184,783
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,259,045	8,659,045
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,120,439	4,976,338
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,799,500	17,999,500

2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,799,900	142,549,900
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,832,261,266	7,430,024,833
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,389,231,366	7,149,829,933
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	440,580,000	277,745,000
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121,360,000	125,079,333
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91,460,000	86,430,000
2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29,900,000	5,000,000
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	33,649,333
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	338,038,713	1,542,524,795
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,999,888	9,999,888
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113,615,755	1,304,483,087
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,075,000	37,075,000
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,999,774	29,999,774
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,500,000	9,500,000
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137,848,296	151,467,046
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,435,101,570	1,245,990,370
2	12	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	801,039,921	801,039,921
2	12	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	634,061,649	444,950,449
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,221,350,022	1,280,880,412
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,499,800	39,901,980
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,999,000	31,999,000
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,070,000	0
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,132,781,222	1,208,979,432
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,056,400	87,305,600
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62,625,600	62,625,600
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,430,800	24,680,000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,472,427,734	101,676,404
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	82,599,000	56,569,404
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	48,899,500	42,449,500
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	33,699,500	12,119,904
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	2,000,000
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	1,107,098,292	6,607,000
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	1,107,098,292	6,607,000
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	282,730,442	38,500,000
2	12	2	2.03	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	204,451,210	38,500,000
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	78,279,232	0
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	507,586,738	312,595,518
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	241,795,518	213,445,518
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	25,650,618	23,650,618
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	216,144,900	189,794,900
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	130,250,000	40,400,000

2	12	3	2.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	10,000,000	0
2	12	3	2.02	3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	44,850,000	37,900,000
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	75,400,000	2,500,000
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	135,541,220	58,750,000
2	12	3	2.03	3	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	71,900,000	58,750,000
2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	63,641,220	0
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	276,892,474	218,440,320
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	113,985,280	100,385,280
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	113,985,280	100,385,280
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162,907,194	118,055,040
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81,404,940	81,404,940
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30,258,454	0
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	51,243,800	36,650,100
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	19,122,933	13,422,933
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	19,122,933	13,422,933
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2,853,783	2,853,783
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	16,269,150	10,569,150
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	45,924,306,763	42,360,866,306
					DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,127,901,067	13,033,847,022
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,469,080	21,489,080
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,672,151	9,892,151
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,599,600	5,599,600
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,197,329	5,997,329
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,207,816,475	10,387,235,118
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,626,010,267	10,016,008,910
2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	564,780,000	357,000,000
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17,026,208	14,226,208
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198,480,000	123,480,000
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,203,497,118	1,194,472,330
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,378,633	17,378,633
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335,163,433	335,163,433
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	286,171,042	327,107,254

2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449,931,010	460,931,010
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	9,240,000
2	15	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	15,900,000	4,452,000
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,953,000	2,200,000
2	15	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	38,000,000	38,000,000
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,014,956	65,195,956
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29,819,000	0
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	65,195,956	65,195,956
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548,245,122	437,695,122
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,500,000	6,275,000
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239,510,322	264,535,322
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118,500,000	0
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,734,800	166,884,800
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850,378,316	804,279,416
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,750,000	38,750,000
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	568,281,916	542,281,916
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133,909,400	125,909,400
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82,938,000	82,938,000
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,499,000	14,400,100
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30,927,669,516	28,460,782,854
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	26,549,703,045	24,642,386,145
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21,184,103,745	21,984,103,745
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3,535,192,030	827,875,130
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	0	0
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,830,407,270	1,830,407,270
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1,655,839,063	1,430,318,101
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1,655,839,063	1,430,318,101
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	503,670,508	503,670,508
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	425,636,927	425,636,927
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78,033,581	78,033,581
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,064,746,000	1,051,096,000
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100,950,000	0
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	865,696,000	952,996,000
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	98,100,000	98,100,000
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,153,710,900	833,312,100

2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,084,750,700	764,351,900
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	68,960,200	68,960,200
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	868,736,180	866,236,430
2	15	3	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	868,736,180	866,236,430
2	15	3	2.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	0	0
2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	561,494,100	558,994,350
2	15	3	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	307,242,080	307,242,080
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11,020,662,127	8,400,737,542
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,617,781,273	5,406,534,764
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,257,091	23,984,840
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,099,010	7,099,010
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,800,000	1,800,000
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,300,000	3,300,000
2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,300,000	1,300,000
2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,300,000	1,300,000
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,928,230	4,703,230
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,529,851	4,482,600
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,428,783,576	4,886,332,899
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,923,085,946	4,435,622,236
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174,910,762	209,250,762
2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	316,620,000	235,650,000
2	16	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,180,000	1,180,000
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,098,967	900
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9,887,901	3,729,901
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,680,000	61,600,000
2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50,680,000	51,600,000
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000	10,000,000
2	16	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	259,978,654	209,343,087
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,137,061	8,172,594
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174,940,346	154,321,696
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,777,247	29,957,797
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,200,000	8,880,000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27,924,000	8,011,000
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460,864,452	15,391,938

2	16	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	76,705,781	0
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362,243,921	15,391,938
2	16	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	21,914,750	0
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,596,000	135,596,000
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,500,000	7,500,000
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,207,600	36,207,600
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215,621,500	74,286,000
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,532,000	32,866,000
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,250,000	41,420,000
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123,839,500	0
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,000,189,814	608,645,094
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,000,189,814	608,645,094
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	428,365,500	310,930,700
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	102,537,920	36,756,145
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	114,189,850	114,189,850
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	109,980,500	62,980,500
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	125,528,145	0
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	40,295,999	24,895,999
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	79,291,900	58,891,900
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3,402,691,040	2,385,557,684
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,041,870,627	390,947,854
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	129,531,990	111,020,640
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	912,338,637	279,927,214
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,360,820,413	1,994,609,830
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,600,000	5,600,000
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1,510,144,925	1,462,282,840
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	291,080,000	130,440,000
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	68,839,800	3,999,800
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	385,153,350	334,537,190
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10,000,000	5,000,000
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	86,002,338	52,750,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	559,708,964	461,510,813
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	559,708,964	461,510,813

2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	559,708,964	461,510,813
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	130,772,845	104,074,345
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30,808,936	0
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	41,850,000	41,850,000
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	71,690,000	71,690,000
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	0	0
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	284,587,183	243,896,468
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	246,785,480	206,565,480
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	246,785,480	206,565,480
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	246,785,480	206,565,480
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24,991,800	19,991,800
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66,990,000	43,190,000
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	92,903,680	90,903,680
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61,900,000	52,480,000
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11,689,537,464	10,015,622,955
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,976,570,741	9,388,841,478
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,134,800	2,430,000
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,860,000	1,980,000
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,336,000	0
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,336,000	0
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,872,000	450
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	730,8	0
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,010,352,093	8,578,397,197
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,531,311,093	8,277,617,197
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	478,480,000	300,780,000
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	561	0
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39,860,000	38,302,000
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39,860,000	38,302,000
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	208,181,381	145,966,271

2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	3,254,371
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,822,654	61,861,500
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,500,000	6,500,000
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,920,000	29,110,000
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64,118,775	33,480,400
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,760,000	11,760,000
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,059,952	0
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,504,019	17,522,797
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447,938,400	420,105,013
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366,600,000	338,766,613
2	17	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81,338,400	81,338,400
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,600,048	186,118,200
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27,312,000	27,312,000
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,313,600	3,235,200
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,520,000	69,280,000
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,454,448	86,291,000
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2,760,100	0
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,760,100	0
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,760,100	0
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	55,496,802	16,846,838
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	55,496,802	16,846,838
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35,616,000	0
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	19,880,802	16,846,838
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	3,668,091	0
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,668,091	0
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3,668,091	0
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	394,448,639	394,448,639
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	394,448,639	394,448,639
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	394,448,639	394,448,639

					Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8,823,091	0
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,823,091	0
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8,823,091	0
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	16,770,000	14,700,000
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	16,770,000	14,700,000
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	16,770,000	14,700,000
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	231,000,000	200,786,000
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	231,000,000	200,786,000
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	231,000,000	200,786,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2,881,849,901	2,653,017,822
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	75,019,752	38,940,000
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0	0
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0
3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0	0
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0	0
3	30	2	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75,019,752	38,940,000
3	30	2	2.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	75,019,752	38,940,000
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,328,693,140	2,171,269,341
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,994,897,040	2,006,889,400
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	647,725,040	659,717,400
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,347,172,000	1,347,172,000
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	333,796,100	164,379,941
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	119,346,100	36,198,200
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	214,450,000	128,181,741

3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75,788,450	86,963,300
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6,900,000	6,900,000
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6,900,000	6,900,000
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	68,888,450	80,063,300
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	62,744,450	73,979,300
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6,144,000	6,084,000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	32,674,769	0
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32,674,769	0
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	32,674,769	0
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	0	0
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	360,323,690	355,845,181
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	360,323,690	355,845,181
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	360,323,690	355,845,181
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	9,350,100	0
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	9,350,100	0
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9,350,100	0
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	415,277,482	173,956,250
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	405,636,882	170,755,250
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	405,636,882	170,755,250
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	40,905,030	38,473,350
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	232,437,500	0
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	77,690,000	77,690,000
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	54,604,352	54,591,900
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	3,201,000	3,201,000
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3,201,000	3,201,000
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	3,201,000	3,201,000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	6,439,600	0

3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	6,439,600	0
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6,439,600	0
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	606,247,096	388,878,785
					DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	241,735,544	217,874,208
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	224,594,208	217,874,208
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	224,594,208	217,874,208
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17,141,336	0
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17,141,336	0
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	172,269,110	2,700,600
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	27,914,110	2,700,600
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	27,914,110	2,700,600
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	144,355,000	0
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	0	0
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	144,355,000	0
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	192,242,442	168,303,977
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74,329,822	62,874,467
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	22,880,360	11,425,005
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	51,449,462	51,449,462
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	117,912,620	105,429,510
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24,962,620	12,479,510
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	92,950,000	92,950,000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10,890,065,932	9,392,830,057
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,057,594,783	8,786,908,435
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,300,000	25,300,000
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,600,000	15,600,000
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,500,000	4,500,000
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,200,000	5,200,000
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,204,378,983	8,087,260,018

2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,712,249,783	7,734,060,918
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	474,129,200	337,199,200
2	18	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18,000,000	15,999,900
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69,680,000	69,260,000
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69,680,000	69,260,000
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	404,844,539	311,373,394
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,199,435	5,199,435
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,449,770	4,636,625
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	169,335,434	168,915,434
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,700,000	62,700,000
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,648,900	60,858,900
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,338,000	9,063,000
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,173,000	0
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	37,060,920
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	0	16,729,900
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	20,331,020
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289,479,168	213,884,908
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,740,000	4,740,000
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,007,544	106,007,544
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172,731,624	103,137,364
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,912,093	42,769,195
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11,366,500	5,934,200
2	18	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	5,000,000	0
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,790,000	21,470,000
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,755,593	15,364,995
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	102,654,000	73,004,000
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	102,654,000	73,004,000
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	89,850,000	61,200,000
2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	12,804,000	11,804,000
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	0
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0	0
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	38,430,000	21,610,000
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38,430,000	21,610,000
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38,430,000	21,610,000
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	237,748,200	104,391,200

2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	237,748,200	104,391,200
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25,668,000	15,501,000
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	193,300,200	70,110,200
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9,480,000	9,480,000
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9,300,000	9,300,000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	349,697,599	335,499,699
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	349,697,599	335,499,699
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	49,800,000	49,800,000
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185,772,999	185,772,999
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	114,124,600	99,926,700
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	103,941,350	71,416,723
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103,941,350	71,416,723
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	103,941,350	71,416,723
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15,290,941,561	12,074,500,245
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,984,544,808	8,425,428,046
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,900,000	22,400,000
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,200,000	11,700,000
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,100,000	8,100,000
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,600,000	2,600,000
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,726,793,683	7,289,920,426
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,301,411,933	6,929,088,676
2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	419,081,650	354,531,650
2	19	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,300,100	6,300,100
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76,130,000	69,710,000
2	19	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64,130,000	57,710,000
2	19	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,000,000	12,000,000
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	637,939,725	579,716,220
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,326,295	9,326,295
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203,754,575	152,643,250

2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187,792,704	182,602,824
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153,786,151	151,863,851
2	19	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,920,000	13,920,000
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,360,000	69,360,000
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334,217,400	283,117,400
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,575,000	8,475,000
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157,580,000	117,580,000
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157,062,400	157,062,400
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180,564,000	180,564,000
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,924,000	44,924,000
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,680,000	59,680,000
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,960,000	75,960,000
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,877,456,865	1,398,376,868
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	579,724,760	150,390,563
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	88,170,000	30,215,500
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	352,434,760	61,501,063
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	66,075,000	0
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	73,045,000	58,674,000
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,297,732,105	1,247,986,305
2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	0	0
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1,297,732,105	1,247,986,305
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4,342,015,558	2,163,771,001
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	848,390,000	86,900,000
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	451,600,000	44,025,000
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	396,790,000	42,875,000
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	332,920,000	0
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	332,920,000	0
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	0	0
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3,160,705,558	2,076,871,001
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	497,990,147	0
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2,662,715,411	2,076,871,001

2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	0	0
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	86,924,330	86,924,330
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	86,924,330	86,924,330
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	86,924,330	86,924,330
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2,016,918,212	1,059,771,948
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	685,488,702	193,602,265
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	373,258,770	193,602,265
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	329,128,370	150,476,865
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	44,130,400	43,125,400
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	312,229,932	0
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	46,863,995	0
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	265,365,937	0
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	464,320,000	245,838,200
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	464,320,000	245,838,200
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	121,310,000	98,330,000
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	343,010,000	147,508,200
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0	0
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	867,109,510	620,331,483
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	867,109,510	620,331,483
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0	0
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	126,904,897	62,516,794
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	678,647,425	496,257,501
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	61,557,188	61,557,188
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10,213,522,332	8,444,097,984
					DINAS PERPUSTAKAAN		
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,458,732,684	7,947,015,246
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,320,000	13,611,500
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,800,000	8,091,500
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,270,000	2,270,000
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,250,000	3,250,000
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,650,242,566	6,544,805,948
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,353,972,566	6,359,253,748

2	23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	285,780,000	177,580,000
2	23	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,490,000	7,972,200
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94,889,000	32,910,000
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36,330,000	32,910,000
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58,559,000	0
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209,960,874	171,809,819
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,641,520	12,639,376
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,821,823	48,277,768
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,029,256	20,029,256
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,440,000	21,440,000
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,153,275	49,153,275
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000	10,255,000
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,400,000	0
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46,475,000	10,015,144
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158,990,299	166,692,700
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158,990,299	166,692,700
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946,169,945	739,188,695
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,080,000	4,080,000
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213,886,345	153,430,095
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,504,000	1,704,000
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	707,699,600	579,974,600
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383,160,000	277,996,584
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58,440,000	58,440,000
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57,760,000	63,360,000
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266,960,000	156,196,584
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	754,789,648	497,082,738
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	498,075,728	335,881,918
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66,801,524	34,697,020
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59,955,000	59,955,000
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	25,130,000	0
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	346,189,204	241,229,898
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256,713,920	161,200,820
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	186,548,620	96,414,820
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	70,165,300	64,786,000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	209,094,640	101,269,800
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	204,614,640	101,269,800
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	92,945,740	7,789,800
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	76,225,740	5,649,800
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	16,720,000	2,140,000

2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	58,630,000	58,630,000
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	58,630,000	58,630,000
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	53,038,900	34,850,000
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	53,038,900	34,850,000
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	4,480,000	0
2	24	3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	4,480,000	0
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	4,480,000	0
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH	60,185,952,440	55,091,604,206
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,426,130,712	41,048,434,924
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119,643,696	119,641,074
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,742,996	45,740,374
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49,999,900	49,999,900
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,900,800	23,900,800
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,834,591,052	21,854,441,843
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,449,450,266	20,647,957,335
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,363,001,010	1,184,344,732
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22,139,776	22,139,776
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,500,000	20,500,000
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20,500,000	20,500,000
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	486,739,700	499,239,700
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	243,840,000	196,340,000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26,000,000	21,200,000
4	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18,399,850	23,199,850
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14,000,000	14,000,000
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24,000,000	24,000,000
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52,499,850	52,499,850
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	108,000,000	168,000,000
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,163,498,301	3,183,946,615
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191,773,660	191,689,264
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180,104,037	180,104,037
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	355,350,000	355,350,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	299,999,865	285,528,575
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,000,000	50,000,000
4	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	1,846,248,739	1,743,266,739
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240,022,000	378,008,000
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,113,744,025	1,527,810,575

4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,198,270,000	755,660,000
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	99,311,375	39,858,125
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	816,162,650	732,292,450
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,920,320,050	3,519,039,250
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,220,000	20,220,000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,859,215,650	1,859,215,650
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,481,704,000	1,008,454,000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559,180,400	631,149,600
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,505,915,100	2,672,443,350
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	507,860,000	507,860,000
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502,218,000	433,938,000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315,901,550	340,701,800
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274,291,550	424,299,550
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	905,644,000	965,644,000
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	953,407,098	946,193,625
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	182,951,443	175,737,970
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55,200,000	55,200,000
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	715,255,655	715,255,655
4	1	1	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2,531,699,760	3,187,785,260
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2,531,699,760	3,187,785,260
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	1,168,773,593	1,049,856,089
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	416,031,558	383,893,054
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	392,494,538	375,515,538
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	67,066,145	44,316,145
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	85,704,303	62,954,303
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	207,477,049	183,177,049
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,607,298,337	2,467,537,543
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	647,871,539	542,501,503
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	954,514,892	922,563,680
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1,004,911,906	1,002,472,360
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12,681,983,152	10,629,334,452
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	6,801,075,615	6,456,223,615
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	5,497,349,903	5,246,665,903
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	96,440,270	108,918,270
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1,207,285,442	1,100,639,442
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4,327,937,354	2,776,172,354
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,583,063,464	1,033,298,464
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	490,661,974	489,661,974

4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1,254,211,916	1,253,211,916
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,357,248,940	1,238,215,240
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	592,624,056	577,129,056
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	460,966,954	400,752,954
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	303,657,930	260,333,230
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	195,721,243	158,723,243
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	195,721,243	158,723,243
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5,077,838,576	3,413,834,830
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1,675,712,311	1,307,142,311
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	458,496,100	423,246,100
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	627,802,398	455,508,398
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	238,762,613	194,376,613
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	49,829,100	49,829,100
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	300,822,100	184,182,100
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,245,110,210	899,976,464
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	768,012,726	644,111,476
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	165,440,496	0
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	311,656,988	255,864,988
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,025,622,774	1,085,233,774
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250,999,746	181,148,746
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	486,155,704	451,516,704
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,288,467,324	452,568,324
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	131,393,281	121,482,281
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	111,263,801	101,352,801
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	20,129,480	20,129,480
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	2				SEKRETARIAT DPRD	53,049,245,828	44,972,108,057
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40,553,766,318	37,837,370,547
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,757,406	7,757,406
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,999,693	1,999,693
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,757,720	2,757,720
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,999,993	2,999,993
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,838,152,197	5,698,770,705
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,210,144,922	5,192,004,690
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65,600,000	65,600,000
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	561,028,360	439,787,100
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,378,915	1,378,915
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51,051,545	0
4	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	51,051,545	0
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148,172,000	46,000,000
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46,000,000	46,000,000

4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102,172,000	0
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,971,233,388	1,443,504,345
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75,762,274	65,035,031
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152,754,629	144,634,199
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76,848,718	76,848,718
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	987,171,667	757,171,667
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174,073,500	138,543,130
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75,798,600	75,798,600
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149,937,000	62,744,000
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278,887,000	122,729,000
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	864,617,939	362,101,248
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	48,465,800	27,899,500
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	816,152,139	334,201,748
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,490,138,572	2,300,197,772
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496,498,984	496,498,984
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220,949,963	75,477,988
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,772,689,625	1,728,220,800
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,182,516,200	1,204,449,000
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193,750,000	193,750,000
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73,672,000	73,672,000
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	49,000,000	49,000,000
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321,368,000	299,093,000
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	544,726,200	588,934,000
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26,466,816,530	26,335,566,530
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26,146,566,530	26,146,566,530
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	189,000,000	189,000,000
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	131,250,000	0
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	533,310,541	439,023,541
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	533,310,541	439,023,541
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12,495,479,510	7,134,737,510
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	437,727,141	217,327,141
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2,234,815	2,234,815
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11,008,993	11,008,993
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	80,859,000	80,859,000
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	339,904,710	119,504,710
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	3,719,623	3,719,623
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	17,464,000	17,464,000
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	3,338,500	3,338,500
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3,338,500	3,338,500
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	4,110,000	4,110,000

4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	3,338,500	3,338,500
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3,338,500	3,338,500
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	55,280,250	55,280,250
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	10,710,000	10,710,000
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10,710,000	10,710,000
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10,710,000	10,710,000
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10,710,000	10,710,000
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2,955,000	2,955,000
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9,485,250	9,485,250
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3,086,508,321	1,955,883,321
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	2,321,098,000	1,456,473,000
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	464,935,000	264,935,000
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294,000,000	228,000,000
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	6,475,321	6,475,321
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,767,108,180	2,767,108,180
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3,340,000	3,340,000
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	2,763,768,180	2,763,768,180
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	29,969,618	29,969,618
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	3,719,623	3,719,623
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	26,249,995	26,249,995
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	6,101,422,000	2,091,705,000
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4,819,842,000	1,760,908,000
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	125,905,000	103,220,000
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	44,760,000	44,760,000
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1,110,915,000	182,817,000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1				PERENCANAAN	12,184,145,326	9,845,656,616
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,018,163,670	8,264,372,956
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,337,392	70,785,920
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,183,177	23,204,195
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,790,770	3,790,770
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,766,170	6,479,925
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,766,170	3,766,170
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,766,170	3,479,925
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,933,515	11,433,515
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,131,420	18,631,420
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,976,661,393	6,821,571,752
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,366,954,113	6,255,858,112
5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,839,900	0
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	567,623,500	526,899,660
5	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17,376,000	11,661,000
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,867,880	4,917,880

5	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,000,000	12,635,000
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,000,000	6,200,100
5	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,000,000	3,400,000
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29,757,170	29,757,170
5	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,965,800	1,965,800
5	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,990,700	5,990,700
5	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,965,800	1,965,800
5	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3,943,900	3,943,900
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,963,790	5,963,790
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,963,590	4,963,590
5	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4,963,590	4,963,590
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226,769,725	122,250,300
5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	22,800,000	13,800,000
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83,970,000	60,038,000
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0
5	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5,999,995	5,999,995
5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,999,995	5,999,995
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48,000,000	22,400,000
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29,999,735	14,012,310
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,000,000	0
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,036,395,076	700,688,582
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,989,577	24,409,146
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305,358,192	207,217,000
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263,115,307	188,181,279
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61,000,000	49,000,000
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,000,000	14,205,000
5	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	86,730,000	66,188,000
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149,557,000	28,246,507
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,000,000	3,000,000
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119,645,000	120,241,650
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,990,995	19,990,995
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,990,995	19,990,995
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493,689,119	329,385,437
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29,178,950	15,000,000
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194,214,332	155,661,600
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161,801,625	50,309,625
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108,494,212	108,414,212
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,562,800	169,942,800
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,252,800	40,252,800
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,400,000	44,560,000

5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81,910,000	85,130,000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,799,255,201	1,066,952,275
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	638,938,900	527,026,700
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	237,795,300	162,833,700
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	107,180,800	91,978,400
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	293,962,800	272,214,600
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	635,050,301	216,623,875
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100,332,700	0
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	370,320,092	100,200,000
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164,397,509	116,423,875
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	525,266,000	323,301,700
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	294,940,000	196,930,000
5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	132,900,000	44,212,700
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	97,426,000	82,159,000
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,366,726,455	514,331,385
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	484,999,700	119,852,800
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145,100,000	3,820,000
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24,999,900	10,899,900
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9,700,000	1,100,000
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	45,780,000	26,818,000
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	79,859,900	6,740,000
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20,199,900	12,474,900
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10,100,000	1,900,000
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	149,260,000	56,100,000
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	401,224,255	136,318,585
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	179,089,790	36,030,000

5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41,238,585	19,988,585
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19,913,665	5,300,000
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	105,195,240	61,800,000
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,475,240	0
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8,744,855	2,000,000
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11,133,440	2,700,000
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	13,433,440	8,500,000
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	480,502,500	258,160,000
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171,289,755	140,300,000
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6,049,955	4,750,000
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7,849,720	5,700,000
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	14,304,720	11,350,000
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	167,647,740	8,260,000
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6,411,150	4,200,000
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7,849,720	3,350,000
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	99,099,740	80,250,000
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,224,467,060	666,298,875
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,224,467,060	666,298,875
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	304,276,580	190,644,800
5	5	2	2.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	244,286,780	134,525,000
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	59,989,800	56,119,800
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	224,550,980	145,294,875

5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	224,550,980	145,294,875
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	389,119,500	175,837,000
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150,192,150	84,002,000
5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	99,114,450	9,412,000
5	5	2	2.03	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	74,714,450	68,680,000
5	5	2	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	65,098,450	13,743,000
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	306,520,000	154,522,200
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	225,370,000	131,071,100
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	54,940,000	20,451,000
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	26,210,000	3,000,100
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
					BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	2				KEUANGAN	127,724,108,319	104,003,135,401
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,565,375,953	25,747,215,334
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,400,000	5,280,000
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,820,000	1,320,000
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,120,000	0
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,820,000	1,320,000
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,820,000	1,320,000
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,820,000	1,320,000
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27,371,456,025	21,545,542,235
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,127,526,025	20,396,277,235
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,240,680,000	1,149,265,000
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,250,000	0
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232,190,000	71,150,000
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142,190,000	71,150,000
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90,000,000	0
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,084,129,108	782,519,189
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,995,922	19,995,922
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311,940,736	311,100,736
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201,500,000	201,500,000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	414,548,450	221,922,531
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28,000,000	28,000,000
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108,144,000	0

5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,187,484,200	490,360,600
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	928,470,400	290,206,800
5	2	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	58,860,000	0
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,153,800	200,153,800
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,894,252,780	1,888,582,780
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,300,000	23,730,000
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	931,595,900	956,595,900
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,543,600	20,543,600
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	927,813,280	887,713,280
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772,463,840	963,780,530
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346,689,200	346,689,200
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253,858,140	253,858,140
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171,916,500	363,233,190
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	82,289,713,949	68,257,417,318
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5,426,463,855	3,983,232,855
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	366,330,975	492,030,975
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	366,330,975	492,030,975
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	617,210,000	321,470,000
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	615,960,000	32,220,000
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	142,585,000	148,045,000
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	210,360,000	216,170,000
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	746,238,110	753,117,110
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	935,314,170	842,994,170
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	482,985,825	230,985,825
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	113,849,800	5,799,800
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	262,348,000	45,998,000
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	173,698,000	10,798,000
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	393,253,000	391,573,000
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	887,057,400	211,385,960
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16,010,000	16,010,000
5	2	2	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8,587,500	4,675,000
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9,307,500	8,275,000
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	8,587,500	2,175,000
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	93,189,520	11,750,000
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	13,259,900	10,234,900

5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27,362,500	23,900,000
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	490,495,000	11,025,000
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	48,254,760	23,875,000
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	87,347,160	16,850,000
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	84,656,060	82,616,060
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,075,911,694	644,627,883
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9,376,929	988,464
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	187,219,527	41,194,181
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	9,240,654	7,740,654
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	47,562,252	26,362,252
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	153,012,252	149,592,252
5	2	2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	35,926,929	6,726,929
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	134,011,684	109,711,684
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6,826,929	2,376,929
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	87,176,929	101,976,929
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	8,276,929	5,976,929
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	146,727,429	71,227,429
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	244,626,322	117,626,322
5	2	2	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	5,926,929	3,126,929
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	74,045,765,000	62,825,824,620
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	74,045,765,000	62,825,824,620
5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	854,516,000	592,346,000
5	2	2	2.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	163,295,000	89,295,000
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	593,305,000	405,435,000
5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	97,916,000	97,616,000
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8,647,927,693	6,354,542,137
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	8,647,927,693	6,354,542,137
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	65,300,000	65,300,000

5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	0
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	38,799,800	38,799,800
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	164,299,800	0
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	6,239,699,000	4,270,375,820
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	412,835,000	411,995,000
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	9,000,000	9,000,000
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1,316,846,517	1,316,846,517
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	243,905,000	242,225,000
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	157,242,576	0
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4,221,090,724	3,643,960,612
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4,221,090,724	3,643,960,612
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	9,000,000	9,000,000
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	710,680,000	589,550,000
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22,950,000	41,550,000
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	464,252,713	512,568,163
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	40,000,000	94,500,000
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	450,700,000	794,975,000
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	486,774,562	0
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	178,774,310	178,774,310
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	387,763,731	206,923,731
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0	0
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	584,129,433	565,529,433
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	110,335,975	99,999,975
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	159,990,000	159,990,000
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	615,740,000	390,600,000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	3				KEPEGAWAIAN	15,808,455,240	11,954,989,625
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,668,251,734	9,611,128,042
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,285,000	39,130,000
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,100,000	12,100,000
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,110,000	2,710,000
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,810,000	2,410,000
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,750,000	2,350,000
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,390,000	1,990,000

5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,800,000	9,800,000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,325,000	7,770,000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,728,342,112	8,897,491,264
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,999,865,072	8,240,364,224
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	699,179,040	633,529,040
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,960,000	2,960,000
5	3	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,038,000	5,038,000
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21,300,000	15,600,000
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69,000,000	37,200,000
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69,000,000	37,200,000
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	350,752,808	331,284,808
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,807,480	10,807,480
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180,050,221	180,050,221
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107,261,107	107,261,107
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000	12,000,000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,634,000	21,166,000
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194,038,957	121,755,725
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	57,601,005	0
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103,937,952	100,855,725
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32,500,000	20,900,000
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,059,500	107,657,500
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,970,000	19,157,500
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,960,000	48,900,000
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,510,000	24,600,000
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15,619,500	15,000,000
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121,773,357	76,608,745
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,508,745	39,508,745
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,629,987	17,000,000
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41,634,625	20,100,000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5,140,203,506	2,343,861,583
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,022,799,000	54,450,000
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	102,700,000	20,000,000
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	752,138,000	2,750,000
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	38,865,000	3,600,000
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	104,950,000	22,450,000
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	24,146,000	5,650,000
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	653,921,500	478,862,500
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	162,363,000	119,100,000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	173,997,500	95,244,500
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	317,561,000	264,518,000

5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	2,012,082,806	1,128,082,083
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	591,528,480	260,062,000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	157,225,413	800
5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	51,727,433	51,727,433
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	764,164,000	550,115,150
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	193,608,000	64,230,000
5	3	2	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	141,879,980	96,517,000
5	3	2	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	3,990,000	0
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	102,229,000	98,900,000
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2,000,000	2,000,000
5	3	2	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	3,730,500	3,730,500
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,451,400,200	682,467,000
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125,740,000	45,370,000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	477,213,000	212,890,000
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	16,500,000	3,980,000
5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	391,456,200	50,000,000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	352,141,000	281,877,000
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	88,350,000	88,350,000
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4,561,993,957	4,031,955,099
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,561,993,957	4,031,955,099
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4,561,993,957	4,031,955,099
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
					INSPEKTORAT		
6	1				INSPEKTORAT DAERAH	10,479,367,486	9,465,736,210
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,347,135,286	8,775,276,230
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,089,575	15,089,575
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,999,950	6,999,950
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999,95	999,95
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999,95	999,95
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,089,775	3,089,775
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,999,950	2,999,950
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,389,895,243	8,046,726,629
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,387,835,318	8,044,666,704
6	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,059,925	2,059,925
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000	60,000,000
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60,000,000	60,000,000
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	339,109,843	240,981,593
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,995,070	5,995,070
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,978,953	84,978,953
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,003,070	12,003,070
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61,650,000	61,650,000

6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53,395,750	60,354,500
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21,000,000	16,000,000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,087,000	0
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51,841,625	51,841,625
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	51,841,625	51,841,625
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353,862,000	251,339,808
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600	0
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,412,000	35,412,000
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53,991,600	3,150,000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263,858,400	212,777,808
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137,337,000	109,297,000
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,142,000	36,144,000
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76,190,000	56,148,000
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17,005,000	17,005,000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	315,536,200	26,340,000
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	307,096,200	17,900,000
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	194,450,000	2,450,000
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2,450,000	0
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	7,725,000	7,725,000
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	7,725,000	7,725,000
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	73,146,200	0
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	21,600,000	0
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8,440,000	8,440,000
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2,000,000	2,000,000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6,440,000	6,440,000
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	816,696,000	664,119,980
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	323,420,000	280,443,980
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2,300,000	2,300,000
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	321,120,000	278,143,980
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	493,276,000	383,676,000

6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2,600,000	0
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	148,876,000	148,876,000
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	223,900,000	232,900,000
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	117,900,000	1,900,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	10,036,670,404	8,279,341,625
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,305,985,726	7,822,156,735
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,524,155	11,193,435
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,124,800	0
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,309,765	5,309,765
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,199,880	3,199,880
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,109,945	2,683,790
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,779,765	0
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,398,687,828	7,143,086,015
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,684,563,238	6,614,646,015
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	692,920,000	509,840,000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,379,990	0
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	754,8	0
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,600,000	18,600,000
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	469,8	0
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,509,900	0
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,509,900	0
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69,830,000	79,980,000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69,830,000	79,980,000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	184,031,410	134,522,885
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,998,913	7,998,913
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,388,243	61,803,718
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,199,937	7,199,937
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,540,000	36,540,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,000,317	19,000,317
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,980,000	1,980,000

7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,924,000	0
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93,930,000	53,930,000
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53,930,000	53,930,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378,824,433	294,166,400
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,807,593	69,864,160
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251,016,840	224,302,240
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139,648,000	105,278,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,848,000	64,848,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,000,000	35,630,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,800,000	4,800,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	186,213,150	97,923,400
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	139,913,250	81,253,300
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	139,913,250	81,253,300
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	46,299,900	16,670,100
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46,299,900	16,670,100
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105,144,188	50,149,400
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36,050,000	26,050,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36,050,000	26,050,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	69,094,188	24,099,400
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	69,094,188	24,099,400
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	127,466,447	111,996,447
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	127,466,447	111,996,447
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	127,466,447	111,996,447
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	311,860,893	197,115,643
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	311,860,893	197,115,643
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	311,860,893	197,115,643

7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	410,137,345	291,466,198
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218,546,880	186,110,198
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,990,225	0
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,990,225	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46,318,715	31,311,480
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,369,490	4,852,125
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,259,351	20,562,156
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,510,163	1,590,824
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,199,711	3,811,375
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,980,000	495
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141,802,150	141,826,293
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,596,790	23,620,933
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118,205,360	118,205,360
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,435,790	12,972,425
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13,440,800	12,274,400
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,994,990	698,025
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19,300,450	7,200,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19,300,450	7,200,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,300,450	7,200,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78,934,015	36,131,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	78,934,015	36,131,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31,006,000	30,196,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47,928,015	5,935,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64,666,000	54,340,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	64,666,000	54,340,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	64,666,000	54,340,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28,690,000	7,685,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28,690,000	7,685,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	28,690,000	7,685,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	423,030,254	301,059,812
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224,487,158	185,138,140
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,490,225	0
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,490,225	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41,746,651	33,257,543
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,999,740	2,472,030
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,258,092	19,794,086
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,509,707	5,189,707
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,999,112	5,306,720
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,980,000	495
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,556,724	140,498,569
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,952,484	20,894,329
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,604,240	119,604,240
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,693,558	11,382,028
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,697,728	9,382,218
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,995,830	1,999,810
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19,120,450	15,120,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19,120,450	15,120,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,120,450	15,120,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85,449,291	38,274,117
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	85,449,291	38,274,117
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30,530,829	30,530,829
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54,918,462	7,743,288
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61,145,800	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	61,145,800	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	61,145,800	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32,827,555	12,527,555
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32,827,555	12,527,555
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32,827,555	12,527,555
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	423,619,536	301,498,227
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	235,938,964	206,759,624
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,055,225	1,426,545
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,055,225	1,426,545
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51,022,133	46,838,458
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,998,328	3,474,653
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,499,086	27,499,086
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,001,122	6,001,122
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,543,597	8,543,597
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,980,000	1,320,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148,373,016	145,038,430
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,768,776	25,434,190
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,604,240	119,604,240
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,488,590	13,456,191
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,493,600	7,461,201
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,994,990	5,994,990
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,470,225	7,652,990
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18,470,225	7,652,990
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18,470,225	7,652,990
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	89,515,347	33,855,613
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	89,515,347	33,855,613
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23,332,791	23,332,791
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66,182,556	10,522,822
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63,215,000	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	63,215,000	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	63,215,000	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16,480,000	3,230,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16,480,000	3,230,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16,480,000	3,230,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	393,761,249	279,280,816
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	213,465,869	187,798,048
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,150,225	0
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,150,225	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40,313,527	38,828,527
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,999,740	3,999,740
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,766,414	22,766,414
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,509,877	5,509,877
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,057,496	6,057,496
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,980,000	495
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,005,318	137,580,681
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,401,078	17,976,441
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,604,240	119,604,240
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,996,799	11,388,840
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13,999,959	5,392,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,996,840	5,996,840
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19,120,450	9,600,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19,120,450	9,600,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,120,450	9,600,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65,215,130	24,332,768
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	65,215,130	24,332,768
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,564,605	16,754,605
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47,650,525	7,578,163
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62,359,800	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	62,359,800	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	62,359,800	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33,600,000	7,550,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33,600,000	7,550,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	33,600,000	7,550,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	10,965,786,784	9,276,539,829
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,353,494,128	8,824,083,695
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53,199,900	29,010,000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,600,000	2,905,000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,995,000	6,950,000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,750,000	5,750,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,874,900	5,425,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,980,000	7,980,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,455,298,394	7,344,214,677
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,633,898,394	6,522,814,677
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	801,400,000	801,400,000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,000,000	11,000,000
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,500,000	2,500,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,000,000	5,000,000
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,500,000	1,500,000
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,000,000	1,000,000
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,000,000	1,000,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78,880,000	58,630,000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69,880,000	49,630,000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000	9,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	211,873,339	181,993,939
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,484,420	6,484,420
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125,050,869	125,050,869
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,981,600	12,549,600
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,350,000	15,350,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,668,450	13,919,050
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,640,000	8,640,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13,698,000	0
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243,281,831	0
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	76,767,058	0
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166,514,773	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,197,831,200	1,140,786,579

7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294,958,800	237,914,179
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	902,872,400	902,872,400
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,129,464	68,448,500
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,246,400	44,246,400
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,883,064	24,202,100
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	118,291,320	77,505,820
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	106,270,920	71,510,920
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	106,270,920	71,510,920
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12,020,400	5,994,900
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12,020,400	5,994,900
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136,428,581	55,457,861
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55,933,681	22,162,961
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55,933,681	22,162,961
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80,494,900	33,294,900
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	80,494,900	33,294,900
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116,012,800	86,699,800
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	116,012,800	86,699,800
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	116,012,800	86,699,800
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	241,559,955	232,792,653
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	241,559,955	232,792,653
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11,460,000	11,460,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	230,099,955	221,332,653
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	288,825,507	167,490,332
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,197,844	15,197,844
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,199,024	8,199,024

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,999,124	2,999,124
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,199,900	5,199,900
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,998,820	6,998,820
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,998,820	6,998,820
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,000,100	1,000,100
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,000,100	1,000,100
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,000,100	1,000,100
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	166,218,563	68,204,388
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	166,218,563	68,204,388
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18,403,193	18,403,193
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	143,817,170	45,802,995
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	3,998,200	3,998,200
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97,021,000	73,700,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	97,021,000	73,700,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	97,021,000	73,700,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,388,000	9,388,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9,388,000	9,388,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9,388,000	9,388,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	309,949,262	184,589,529
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,692,200	7,692,200
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,698,300	4,698,300
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,498,200	1,498,200
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,200,100	3,200,100
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,993,900	2,993,900
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,993,900	2,993,900
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	974,9	974,9
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0

7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	974,9	974,9
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	974,9	974,9
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	197,829,010	92,557,429
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	197,829,010	92,557,429
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30,260,115	30,260,115
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166,568,895	61,297,314
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	1,000,000	1,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94,453,152	74,365,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	94,453,152	74,365,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	94,453,152	74,365,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,000,000	9,000,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9,000,000	9,000,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9,000,000	9,000,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	294,250,512	170,779,050
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,239,175	13,239,175
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,270,575	8,270,575
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,115,575	3,115,575
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,155,000	5,155,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,968,600	4,968,600
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,968,600	4,968,600
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,402,000	1,402,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,402,000	1,402,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,402,000	1,402,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130,859,886	77,375,190
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	130,859,886	77,375,190
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27,006,891	27,006,891
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	101,552,995	48,068,299
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	2,300,000	2,300,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	117,201,451	76,462,685
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	117,201,451	76,462,685

7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	117,201,451	76,462,685
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31,548,000	2,300,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31,548,000	2,300,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	31,548,000	2,300,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	298,571,190	170,174,807
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,114,975	13,823,975
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,793,975	7,793,975
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,763,725	2,763,725
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,030,250	5,030,250
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,321,000	6,030,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,321,000	6,030,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,200,000	1,200,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,200,000	1,200,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,200,000	1,200,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	146,510,274	81,346,274
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	146,510,274	81,346,274
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26,663,450	26,663,450
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117,546,824	52,382,824
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	2,300,000	2,300,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80,452,143	63,158,760
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80,452,143	63,158,760
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	80,452,143	63,158,760
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38,293,798	10,645,798
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38,293,798	10,645,798
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	292,415,756	163,980,991
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,738,560	13,738,560
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,983,000	4,983,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,498,200	1,498,200
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,484,800	3,484,800

7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,755,560	8,755,560
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,755,560	8,755,560
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,127,300	1,127,300
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,127,300	1,127,300
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,127,300	1,127,300
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	187,291,696	88,059,931
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	187,291,696	88,059,931
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19,700,955	19,700,955
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	146,605,741	61,853,976
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	20,985,000	6,505,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81,238,200	58,800,200
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	81,238,200	58,800,200
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	81,238,200	58,800,200
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ILMU	9,020,000	2,255,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9,020,000	2,255,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9,020,000	2,255,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	10,788,206,884	9,789,337,047
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,160,541,766	9,333,599,086
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,563,500	18,013,500
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,479,500	11,329,500
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,671,000	1,671,000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,671,000	1,671,000
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,671,000	1,671,000
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,671,000	1,671,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,400,000	0
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,124,651,340	8,476,256,015
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,917,189,897	7,402,604,572
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,179,011,693	1,042,201,693
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11,645,750	11,645,750
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,543,500	1,543,500
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12,720,250	15,720,250
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,540,250	2,540,250

7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,275,250	0
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,275,250	0
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89,410,000	84,190,000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89,410,000	84,190,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	419,106,767	387,435,767
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,847,451	6,847,451
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,228,426	72,228,426
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	255,379,602	255,379,602
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,440,000	26,915,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,386,288	17,065,288
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000	9,000,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,825,000	0
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178,243,905	64,412,800
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178,243,905	64,412,800
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205,297,400	205,297,400
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205,297,400	205,297,400
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,993,604	97,993,604
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,149,604	51,149,604
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,160,000	44,160,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,684,000	2,684,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122,457,620	42,276,230
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110,685,330	34,003,940
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	110,685,330	34,003,940
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11,772,290	8,272,290
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11,772,290	8,272,290
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	137,908,063	70,178,663
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88,158,663	58,378,663
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88,158,663	58,378,663
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	49,749,400	11,800,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	49,749,400	11,800,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82,762,185	102,324,868

7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	82,762,185	102,324,868
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	82,762,185	102,324,868
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	284,537,250	240,958,200
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	284,537,250	240,958,200
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26,285,750	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	258,251,500	240,958,200
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	236,676,183	107,473,183
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,612,350	16,612,350
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16,612,350	16,612,350
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,380,100	2,380,100
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,825,000	6,825,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,407,250	7,407,250
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152,859,833	38,156,833
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	152,859,833	38,156,833
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13,220,000	11,220,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139,639,833	26,936,833
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47,734,000	40,534,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	47,734,000	40,534,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	47,734,000	40,534,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19,470,000	12,170,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19,470,000	12,170,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	19,470,000	12,170,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	271,016,519	154,649,974
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,993,219	20,993,219
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,993,219	20,993,219
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,986,164	2,986,164
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,400,000	8,400,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,607,055	9,607,055
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	186,674,745	70,308,200
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	186,674,745	70,308,200

7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11,099,900	11,099,900
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,574,845	59,208,300
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41,348,986	41,348,986
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	41,348,986	41,348,986
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	41,348,986	41,348,986
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21,999,569	21,999,569
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21,999,569	21,999,569
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21,999,569	21,999,569
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	266,245,250	132,674,125
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,906,625	18,906,625
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18,906,625	18,906,625
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,952,145	2,952,145
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,980,000	7,980,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,974,480	7,974,480
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	180,031,125	56,060,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	180,031,125	56,060,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13,270,000	11,270,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166,761,125	44,790,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44,262,500	42,162,500
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	44,262,500	42,162,500
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	44,262,500	42,162,500
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23,045,000	15,545,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23,045,000	15,545,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	23,045,000	15,545,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	261,902,806	134,566,803
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,583,180	20,583,180
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,583,180	20,583,180
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,619,590	2,619,590
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,400,000	8,400,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,563,590	9,563,590

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178,325,453	60,249,900
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	178,325,453	60,249,900
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11,459,900	11,459,900
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166,865,553	48,790,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45,473,273	45,473,273
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	45,473,273	45,473,273
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	45,473,273	45,473,273
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17,520,900	8,260,450
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	17,520,900	8,260,450
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17,520,900	8,260,450
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	240,423,164	117,250,343
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,889,450	18,889,450
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18,889,450	18,889,450
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,750,110	2,750,110
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,980,000	7,980,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,159,340	8,159,340
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	153,617,821	49,470,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153,617,821	49,470,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11,220,000	11,220,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142,397,821	38,250,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46,573,993	40,798,993
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46,573,993	40,798,993
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	46,573,993	40,798,993
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21,341,900	8,091,900
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21,341,900	8,091,900
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21,341,900	8,091,900
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	8,524,683,954	7,437,335,286
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,696,810,548	6,827,847,460

7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,770,350	28,800,250
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,720,400	5,720,400
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,450,000	2,450,000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,450,000	2,450,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,150,000	5,150,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,999,950	13,029,850
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,851,805,398	6,105,259,681
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,223,822,376	5,606,200,536
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	616,342,312	487,418,745
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,040,000	5,040,000
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,390,000	1,390,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,948,610	3,948,300
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,262,100	1,262,100
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,970,000	72,970,000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72,160,000	72,160,000
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	810	810
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,000,000	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	179,111,537	164,375,537
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,804,455	4,804,455
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,821,832	75,821,832
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,999,750	11,999,750
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	30,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,557,500	32,557,500
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,192,000	9,192,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14,736,000	0
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157,847,867	81,899,744
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157,847,867	81,899,744
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304,961,996	298,898,848
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228,023,596	221,960,448
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76,938,400	76,938,400
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,343,400	75,643,400
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,012,000	42,772,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,107,400	31,647,400
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,224,000	1,224,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	207,011,430	185,082,930
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	193,651,430	171,722,930
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	193,651,430	171,722,930

7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13,360,000	13,360,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13,360,000	13,360,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130,212,019	100,965,269
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65,220,404	44,403,654
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65,220,404	44,403,654
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	64,991,615	56,561,615
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	64,991,615	56,561,615
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11,820,750	11,820,750
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11,820,750	11,820,750
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11,820,750	11,820,750
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	478,829,207	311,618,877
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	478,829,207	311,618,877
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	41,724,330	9,000,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	437,104,877	302,618,877
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	443,596,029	285,936,709
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147,950,362	133,553,962
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,992,312	80,992,312
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80,992,312	80,992,312
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,908,850	9,912,450
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,498,200	408,6
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000	6,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,410,650	3,503,850
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,469,200	38,469,200
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,469,200	38,469,200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,580,000	4,180,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,580,000	4,180,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	185,533,376	88,787,747
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	185,533,376	88,787,747

7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26,080,000	26,080,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159,453,376	62,707,747
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	77,612,291	55,100,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	77,612,291	55,100,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	77,612,291	55,100,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32,500,000	8,495,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32,500,000	8,495,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32,500,000	8,495,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	425,843,359	226,531,608
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137,081,442	137,081,442
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,640,542	79,640,542
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79,640,542	79,640,542
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13,091,700	13,091,700
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,498,200	1,498,200
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,210,000	6,210,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,383,500	5,383,500
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,469,200	38,469,200
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,469,200	38,469,200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,880,000	5,880,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,880,000	5,880,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	192,125,426	20,135,250
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	192,125,426	20,135,250
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13,625,250	13,625,250
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	178,500,176	6,510,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75,136,491	62,727,916
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75,136,491	62,727,916
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	75,136,491	62,727,916
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21,500,000	6,587,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21,500,000	6,587,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21,500,000	6,587,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		

7	1				KECAMATAN	397,474,832	255,788,872
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134,344,582	128,371,182
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,992,312	80,992,312
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80,992,312	80,992,312
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,043,070	7,489,670
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,001,070	456,27
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000	5,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,042,000	2,033,400
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,469,200	38,469,200
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,469,200	38,469,200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,840,000	1,420,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,840,000	1,420,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	166,779,319	64,212,510
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	166,779,319	64,212,510
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18,545,000	18,545,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	148,234,319	45,667,510
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62,350,431	56,427,680
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	62,350,431	56,427,680
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	62,350,431	56,427,680
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34,000,500	6,777,500
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34,000,500	6,777,500
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	34,000,500	6,777,500
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	420,623,737	267,680,222
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149,582,712	149,582,712
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,992,312	80,992,312
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80,992,312	80,992,312
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,541,200	12,541,200
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,469,200	38,469,200
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,469,200	38,469,200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,580,000	17,580,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,580,000	17,580,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	190,835,825	63,097,510
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	190,835,825	63,097,510
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21,825,000	21,825,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169,010,825	41,272,510

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58,205,200	48,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	58,205,200	48,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	58,205,200	48,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22,000,000	7,000,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22,000,000	7,000,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	22,000,000	7,000,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	12,428,760,676	10,302,556,048
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,574,198,666	9,725,715,038
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,180,000	15,630,000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,940,000	7,940,000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,900,000	1,900,000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,900,000	1,900,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,440,000	3,440,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,000	450
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,169,222,717	8,843,051,609
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,364,282,717	8,186,784,609
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	796,900,000	652,480,000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	510	0
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,620,000	1,970,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,320,000	1,817,000
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	590	0
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,235,000	1,380,000
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	845	0
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	690	0
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,700,000	1,380,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78,710,000	59,980,000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64,230,000	58,730,000
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,080,000	900
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,400,000	350
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,000,000	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225,961,990	173,869,382
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,765,961	3,784,116
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123,692,103	100,067,644
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,683,051	21,688,322
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,500,000	20,025,000

7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,638,875	11,714,300
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,840,000	15,840,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22,762,000	0
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,080,000	750
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286,384,645	159,452,185
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	23,429,230	19,348,905
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262,955,415	140,103,280
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511,832,314	358,886,522
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314,557,812	161,612,020
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197,274,502	197,274,502
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281,672,000	113,465,340
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114,492,000	77,107,840
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,560,000	10,397,500
7	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	49,930,000	0
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101,690,000	25,960,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81,323,160	50,783,160
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74,003,160	48,233,160
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74,003,160	48,233,160
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7,320,000	2,550,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7,320,000	2,550,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	215,613,500	123,403,500
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99,038,500	76,333,500
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,038,500	76,333,500
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	116,575,000	47,070,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	116,575,000	47,070,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	174,814,350	125,814,350
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	174,814,350	125,814,350
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	174,814,350	125,814,350
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	382,811,000	276,840,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	382,811,000	276,840,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26,675,000	0

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	356,136,000	276,840,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	365,400,072	274,050,272
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137,977,072	137,960,272
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14,000,970	13,984,170
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,001,070	1,001,070
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000	6,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,999,900	6,983,100
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,840,000	3,840,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,840,000	3,840,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,000,000	1,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,000,000	1,000,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,000,000	1,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	107,058,000	57,250,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	107,058,000	57,250,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16,500,000	16,500,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90,558,000	40,750,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,000,000	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69,365,000	27,840,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	69,365,000	27,840,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6,900,000	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	62,465,000	27,840,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	324,309,084	250,081,552
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135,044,316	129,524,052
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,836,214	7,851,950
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	994,264	486,35
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,745,000	2,520,000

7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,096,950	4,845,600
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,072,000	1,536,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,072,000	1,536,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,000,000	1,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,000,000	1,000,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,000,000	1,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87,021,723	49,225,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	87,021,723	49,225,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,180,000	14,180,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72,841,723	35,045,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,000,000	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51,243,045	20,332,500
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	51,243,045	20,332,500
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6,974,710	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	44,268,335	20,332,500
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	353,997,852	265,908,352
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133,016,352	134,216,352
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,040,250	10,240,250
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,135,000	1,135,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000	6,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,905,250	3,105,250
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,840,000	3,840,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,840,000	3,840,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,100,000	1,100,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,100,000	1,100,000

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	109,431,500	40,892,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	109,431,500	40,892,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19,542,000	19,542,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	89,889,500	21,350,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,000,000	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60,450,000	39,700,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60,450,000	39,700,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8,000,000	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52,450,000	39,700,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	358,596,752	268,896,752
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138,735,252	138,735,252
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14,759,150	14,759,150
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,135,000	1,135,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000	6,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,624,150	7,624,150
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,840,000	3,840,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,840,000	3,840,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,100,000	1,100,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,100,000	1,100,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,100,000	1,100,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	112,061,500	56,061,500
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	112,061,500	56,061,500
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19,542,000	19,542,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92,519,500	36,519,500
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000

7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,000,000	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56,700,000	23,000,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56,700,000	23,000,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8,000,000	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	48,700,000	23,000,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	344,606,302	257,786,302
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137,324,802	137,324,802
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14,348,700	14,348,700
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	998,8	998,8
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,350,000	6,350,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,999,900	6,999,900
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,840,000	2,840,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,840,000	2,840,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,000,000	1,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,000,000	1,000,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,000,000	1,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,361,500	48,961,500
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,361,500	48,961,500
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18,380,000	18,380,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81,981,500	30,581,500
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,000,000	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55,920,000	20,500,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	55,920,000	20,500,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6,020,000	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	49,900,000	20,500,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		

7	1				KECAMATAN	358,594,537	268,632,037
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137,555,037	137,555,037
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13,998,935	13,998,935
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999,935	999,935
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000	6,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,999,000	6,999,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,420,000	3,420,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,420,000	3,420,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,000,000	1,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,000,000	1,000,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,000,000	1,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	116,324,000	58,482,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	116,324,000	58,482,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,182,000	17,182,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	99,142,000	41,300,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,000,000	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53,715,500	21,595,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53,715,500	21,595,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	53,715,500	21,595,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	363,308,852	272,472,852
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138,416,352	138,416,352
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14,440,250	14,440,250
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,135,000	1,135,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000	6,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,305,250	7,305,250
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,136,102	120,136,102
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,136,102	120,136,102

7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,840,000	3,840,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,840,000	3,840,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,100,000	1,100,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,100,000	1,100,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,100,000	1,100,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	117,592,500	68,081,500
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	117,592,500	68,081,500
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19,542,000	19,542,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	98,050,500	48,539,500
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,000,000	50,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56,200,000	14,875,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56,200,000	14,875,000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7,500,000	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	48,700,000	14,875,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	9,269,088,323	8,741,551,854
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,763,186,216	8,426,789,307
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,591,500	56,442,000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,199,500	5,199,500
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,720,000	5,720,000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,785,000	3,785,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,400,000	4,400,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56,487,000	37,337,500
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,783,593,565	7,625,668,565
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,197,498,565	7,197,498,565
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	581,160,000	423,235,000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,575,000	1,575,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,360,000	3,360,000
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	700	0

7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	700	0
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83,060,000	46,330,000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83,060,000	46,330,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192,029,478	182,105,189
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,989,917	5,989,917
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115,852,359	105,928,070
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,058,936	19,058,936
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,000,000	24,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,468,266	20,468,266
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,660,000	6,660,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72,310,450	72,310,450
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,310,450	72,310,450
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445,397,193	375,293,903
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205,993,491	137,820,201
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239,403,702	237,473,702
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,504,030	68,639,200
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,490,730	58,018,200
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,888,300	10,621,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,125,000	0
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81,202,691	49,812,691
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73,612,691	42,222,691
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	73,612,691	42,222,691
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7,590,000	7,590,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7,590,000	7,590,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	126,940,976	89,704,376
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55,646,656	46,646,656
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55,646,656	46,646,656
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	71,294,320	43,057,720
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	71,294,320	43,057,720
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	118,802,000	107,300,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	118,802,000	107,300,000

7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	118,802,000	107,300,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	178,956,440	67,945,480
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	178,956,440	67,945,480
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	178,956,440	67,945,480
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	437,589,035	314,364,780
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191,481,252	183,152,112
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16,131,710	13,481,710
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,981,710	1,981,710
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,650,000	7,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,500,000	4,500,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,675,302	156,675,302
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156,675,302	156,675,302
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,674,240	12,995,100
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8,374,240	4,909,600
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,300,000	8,085,500
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	135,652,229	50,083,229
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	135,652,229	50,083,229
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18,017,979	18,017,979
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117,634,250	32,065,250
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	72,970,786	69,220,786
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	72,970,786	69,220,786
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	72,970,786	69,220,786
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37,484,768	11,908,653
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	37,484,768	11,908,653
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	37,484,768	11,908,653
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	437,944,004	326,163,595
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191,688,572	186,520,472
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16,729,270	14,239,270
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,499,270	2,499,270
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,780,000	5,040,000

7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,450,000	6,700,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,675,302	156,675,302
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156,675,302	156,675,302
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,284,000	15,605,900
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7,984,000	7,984,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,300,000	7,621,900
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	151,163,909	78,187,527
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	151,163,909	78,187,527
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21,564,012	21,564,012
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129,599,897	56,623,515
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53,100,000	53,100,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	53,100,000	53,100,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	53,100,000	53,100,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41,991,523	8,355,596
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	41,991,523	8,355,596
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	41,991,523	8,355,596
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	436,213,714	329,356,709
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	184,027,902	168,331,002
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19,930,700	11,655,700
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	930,7	930,7
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000	5,025,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,000,000	5,700,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,675,302	156,675,302
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156,675,302	156,675,302
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,421,900	0
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,426,400	0
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,995,500	0
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	160,691,486	97,287,111
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	160,691,486	97,287,111
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18,078,982	18,078,982
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142,612,504	79,208,129
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53,400,000	53,400,000

7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	53,400,000	53,400,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	53,400,000	53,400,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38,094,326	10,338,596
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38,094,326	10,338,596
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	38,094,326	10,338,596
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN	449,894,454	324,468,664
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	178,121,502	176,126,502
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	17,480,700	15,485,700
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	930,7	930,7
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,750,000	9,755,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,800,000	4,800,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,675,302	156,675,302
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156,675,302	156,675,302
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,965,500	3,965,500
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,965,500	3,965,500
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	182,135,647	82,762,162
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	182,135,647	82,762,162
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,999,303	17,999,303
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164,136,344	64,762,859
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53,400,000	53,400,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	53,400,000	53,400,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	53,400,000	53,400,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36,237,305	12,180,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	36,237,305	12,180,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36,237,305	12,180,000
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7,100,056,849	6,621,043,680
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK		
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,392,809,459	2,170,517,742
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,200,000	6,300,000
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,200,000	4,800,000
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	1,500,000

8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,642,518,309	1,508,766,492
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,642,518,309	1,508,766,492
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29,400,000	17,400,000
8	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17,400,000	17,400,000
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,000,000	0
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177,878,782	149,130,882
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,770,600	0
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,051,700	61,051,700
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,000,000	17,000,000
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,903,482	41,093,182
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000	3,600,000
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,553,000	26,386,000
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,920,000	6,920,000
8	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,920,000	6,920,000
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521,500,368	482,000,368
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,399,023	37,899,023
8	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,975,345	28,975,345
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448,126,000	415,126,000
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,392,000	0
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,392,000	0
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	269,010,230	237,546,985
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	269,010,230	237,546,985
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	269,010,230	237,546,985
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3,394,778,953	3,394,778,953
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3,394,778,953	3,394,778,953
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	3,394,778,953	3,394,778,953

					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8,250,000	0
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8,250,000	0
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8,250,000	0
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	159,358,207	0
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	159,358,207	0
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	159,358,207	0
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	875,850,000	818,200,000
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	875,850,000	818,200,000
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	659,250,000	615,600,000
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216,600,000	202,600,000
TOTAL						1,869,498,506,700	1,671,471,969,966

BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2021. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan berusaha mencapai target-target tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang memuat kondisi perekonomian Kota Pontianak pada saat ini, kebijakan Keuangan serta perubahan program dan kegiatan Prioritas APBD sebagaimana terlampir dalam dokumen ini yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan standar pelayanan minimal.

Dokumen Perubahan RKPD ini merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta sebagai dasar dan pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pontianak Tahun 2021.

Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana program/kegiatan APBD, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.



WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO